



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT
KOMISI IX DPR RI**

Tahun Sidang	: 2021-2022
Masa Persidangan	: III
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Dengan	: Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan
Hari, Tanggal	: Kamis, 20 Januari 2022
Waktu	: Pukul 10.03 s.d 15.55 WIB
Sifat Rapat	: Terbuka
Tempat	: Ruang Rapat Komisi IX DPR RI, Gedung Nusantara I Lt. 1 Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta
Ketua Rapat	: Emanuel Melkiades Laka Lena
Acara	: Evaluasi kinerja Tahun 2021 dan Pembahasan Program Kerja BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2022
Sekretaris Rapat	: Suryatna, S.IP.
Hadir	: A. Anggota DPR RI: 51 dari 51 orang Anggota Komisi IX DPR RI dengan rincian:

Pimpinan Komisi IX DPR RI

1. Felly Estelita Runtuwene, S.E. (F-P. NASDEM)
2. Charles Honoris (F-PDIP)
3. Emanuel Melkiades Laka Lena (F-P. GOLKAR)
4. Dr. Hj. Nihayatul Wafiroh, M.A. (F-PKB)
5. H. Ansory Siregar, Lc. (F-PKS)

Fraksi-Fraksi:

1. Fraksi PDI Perjuangan (F-PDIP)
10 dari 10 orang Anggota
 1. Dra. Elva Hartati, S.IP., M.M.
 2. Tuti Nusandari Roosdiono
 3. Dr. H. Edy Wuryanto, S.KP., M.Kep.
 4. Rahmad Handoyo, S.PI., M.M.
 5. Muchamad Nabil Haroen, S.Pd., M.Hum.
 6. Dr. Dewi Aryani, M.Si.
 7. Krisdayanti
 8. H. Abidin Fikri, S.H., M.H.
 9. I Ketut Kariyasa Adnyana, S.P.
 10. Harvey B. Malaihollo
2. Fraksi Partai Golongan Karya (F-P. GOLKAR)

6 dari 6 orang Anggota

1. Delia Pratiwi Sitepu, S.H.
2. Drs. H. Darul Siska
3. Hj. Saniatul Lativa, S.E.
4. Hj. Dewi Asmara, S.H., M.H.
5. Dra. Wenny Haryanto, S.H.
6. M. Yahya Zaini, S.H.

3. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (F-P. GERINDRA)

7 dari 7 orang Anggota

1. dr. H. Suir Syam, M.Kes., M.M.R.
2. Ade Rezki Pratama, S.E., M.M.
3. Dr. Ir. H.A.R. Sutan Adil Hendra, M.M.
4. Ir. Sri Meliyana
5. drg. Putih Sari
6. Ramson Siagian
7. Dra. Hj. Ruskati Ali Baal

4. Fraksi Partai Nasional Demokrasi (F-P. NASDEM)

4 dari 4 orang Anggota

1. Irma Suryani, S.E.
2. Nurhadi, S. Pd.
3. Ratu Ngadu Bonu Wulla, S.T.
4. Drg. Hj. Hasnah Syam, MARS.

5. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB)

5 dari 5 orang Anggota

1. Hj. Nur Nadlifah, S.Ag., M.M.
2. H. Sukamto, S.H.
3. Arzeti Bilbina, S.E., M.A.P
4. Ir. Nur Yasin, M.B.A., M.T.
5. H. Haruna, M.A., M.B.A.

6. Fraksi Partai Demokrat (F-P. DEMOKRAT)

5 dari 5 orang Anggota

1. Drs. H. Zulfikar Achmad
2. Linda Megawati, S.E., M.Si.
3. Dra. Lucy Kurniasari
4. Hasan Saleh
5. Hj. Aliyah Mustika Ilham, S.E.

7. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS)

3 dari 3 orang Anggota

1. Dr. Hj. Kurniasih Mufidayati, M.Si
2. Dr. Hj. Netty Prasetuyani, M.Si.

3. H. Alifuddin, S.E., M.M.

8. Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN)
4 dari 4 orang Anggota
 1. Dr. Saleh Partaonan Daulay, M.Ag., M.Hum., M.A.
 2. Dr. (HC) H. Zulkifli Hasan, S.E., M.M.
 3. H. Sungkono
 4. Drs. H. Ashabul Kahfi, M.Ag.

9. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP)
2 dari 2 orang Anggota
 1. Hj. Nurhayati
 2. Sy. Anas Thahir

B. Undangan:
Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan

Jalannya Rapat:

KETUA RAPAT (EMANUEL MELKIADES LAKA LENA):

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Selamat pagi

Salam sejahtera buat kita semua

Shalom

Om Swastiastu

Namo Buddhaya

Salam Kebajikan

Yang terhormat Saudara Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan beserta jajaran,

Yang kami hormati para Pimpinan dan anggota Komisi IX DPR RI serta hadirin yang berbahagia.

Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan hidayahNya pada hari ini kita dapat mengikuti Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI dengan Direktur Utama dan Direksi BPJS Ketenagakerjaan.

Sebelum rapat ini kita mulai alangkah baiknya kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing.

Berdoa mulai.

(RAPAT: BERDO'A)

Berdoa selesai.

Pada saat ini yang mengikuti rapat secara fisik dan virtual dari 51 anggota belum memenuhi ketentuan 281 ayat (1) Peraturan DPR RI Nomor 1

Tahun 2020 tentang Tata Tertib sehingga rapat kita skors 10 menit sebelum kita buka lagi, jadi kalau sudah kita skors sudah bisa kita lanjutkan. Saya skors 10 menit ya.

(RAPAT DI SKORS PUKUL 10:03 WIB)

Masa skors tadi skors saya cabut.

**(SKORS DICABUT DAN
RAPAT DIBUKA KEMBALI PUKUL 10:13 WIB)**

Berdasarkan ketentuan Pasal 281 setelah kita skors bisa kita lanjutkan rapat maka rapat saya nyatakan kuorum serta dinyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 10:15 WIB)

Waktu rapat jam 10:15 WIB ini sampai jam 12:00 WIB bisa disepakati?

(RAPAT: SETUJU)

Rapat hari ini kita akan membahas tentang evaluasi kinerja tahun 2021 dan pembahasan program kerja BPJS Ketenagakerjaan tahun 2022. Untuk itu, kepada Saudara Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan kami persilakan menyampaikan paparan kurang lebih 15 menit. Kami persilakan kepada Pak Dirut.

DIREKTUR UTAMA BPJS KETENAGAKERJAAN (ANGGORO EKO CAHYO, M.M.):

Baik.

Bismillahirrahmanirrahim.

Yang kami hormati Pimpinan Komisi IX DPR RI

KETUA RAPAT:

Sebentar Pak Dirut, ini saya dapat catatan dulu nih. Saya setelah sebentar Pak Dirut. Jadi ini catatan pembukaan dari teman-teman TA yang sudah mempersiapkan dan sudah disampaikan kepada kami berdasarkan catatan yang kami peroleh bahwa hari ini kita akan membahas terkait dengan tata kelola penyelenggaraan jaminan sosial dan rencana kerja anggaran tahun 2022 saat ini yang kemudian nanti sudah di apa namanya dibahas di internal BPJS TK dan hari ini akan disampaikan kepada kami. Termasuk juga terkait dengan program kepesertaan yang kami harapkan juga ditingkatkan, juga terkait dengan skema investasi dan layanan masyarakat bagi peserta serta lokasi anggaran yang diberikan kepada Dewas Direksi BPJS Ketenagakerjaan.

Kemarin juga sama Pak Dirut, jadi BPJS Kesehatan juga kami minta yang sama jadi apabila ada yang perlu di *support* dan tentu kami akan *support*

dengan bagian kami di Komisi IX dan juga teman-teman yang mungkin di Banggar dan sebagainya.

Kemudian juga kami berharap agar dan kami minta agar di pertemuan kali ini juga disampaikan terkait dengan berbagai hal untuk diketahui oleh Komisi IX terkait aset dana jaminan sosial baik itu menyangkut bantuan iuran, dana jaminan sosial ketenagakerjaan, termasuk juga pengalihan aset iuran jaminan sosial yang menjadi hak peserta dari BUMN yang menyelenggarakan jaminan sosial serta sumber lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undang untuk aset dana jaminan sosial.

Kemudian juga catatan yang kami ini juga didapatkan pada pertemuan kali ini terkait dengan pembayaran manfaat ataupun pembiayaan layanan jaminan sosial termasuk juga yang kami sudah lihat di media adalah biaya operasional ya yang juga kami dengar ada penurunan yang bisa disampaikan di sini, juga bisa menjadi catatan bagi kami untuk bisa direspon ke depan termasuk juga investasi dan instrumen investasi dengan sesuai dengan jaminan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Saya kira mungkin ini beberapa hal dan juga beberapa hal terkait dengan hasil rapat-rapat kerja atau sesuai di rapat dengar pendapat dengan kami selama ini, kami ingin juga disampaikan kepada Komisi IX beberapa catatan yang mungkin bisa menjadi evaluasi baik itu terkait tadi sudah disampaikan ya kepesertaan, kemudian juga menyangkut tentang keterlibatan kementerian lembaga lain yang kita sudah mendapatkan kebijakan presiden ya untuk bisa kita meningkat kepesertaan maupun juga evaluasi terkait dengan berbagai macam hambatan yang perlu diperbaiki ke depan dengan dukungan Komisi IX untuk berbagai program dari BPJS Ketenagakerjaan.

Juga terkait dengan bagaimana cakupan peserta non ASN di daerah yang juga sudah selama berbagai sosialisasi yang kemitraan antara kami dan BPJS TK itu juga teman-teman Komisi IX selalu disampaikan ke lapangan agar peningkatan kepesertaan non ASN yang di daerah juga bisa kita lakukan ke depan.

Dan tentu dalam pertemuan ini kami berharap agar berbagai gambaran ini yang kami minta bisa dipaparkan seperti sudah-sudah (07:13) kami sampaikan dan semoga pertemuan hari ini kita juga selain membahas berbagai kendala yang dihadapi oleh BPJS Ketenagakerjaan juga bisa banyak hal yang bisa kita berikan apa namanya respon bagi publik secara luas.

Sebelum Pak Dirut menyampaikan juga, kami ingin sampaikan bahwa di Komisi IX ada anggota yang bertukar jadi dulu Pak Fadholi di sini dari Fraksi NasDem sekarang berpindah ke Komisi V dan sekarang dari Fraksi NasDem adalah Ibu Irma Suryani Chaniago A357 dari Sumsel 2. Bu Irma ni saya kira bagi semua apa namanya yang bergerak di bidang ketenagakerjaan bukan orang baru, ini adalah seorang aktivis buruh yang sudah selama ini mengadvokasi banyak sekali persoalan-persoalan buruh terutama di aspek

terutama di pelabuhan-pelabuhan. Beliau ni lama di urusan-urusan di sana. Nanti sebentar secara ini nanti biar Bu Irma disampaikan sendiri.

Dan kemudian yang kedua, nanti ada Pak Harvey Malaihollo saya kira juga bukan orang yang asing kalau Bu Irma tadi di bidang perburuhan, kalau Pak Harvey ini di bidang pernyanyian. Jadi ini saya kira baik kita semua bisa paham. Sebelum di oleh Pak Dirut mungkin biar Bu Irma sedikit untuk memperkenalkan diri dan nanti Pak Harvey. Silakan Bu Irma.

F-P. NASDEM (IRMA SURYANI, S.E.):

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Terima kasih Ketua.

**Pimpinan Komisi IX, kawan-kawan Komisi IX yang saya hormati,
Direksi BPJS Tenagakerja yang saya hormati.**

Mungkin banyak juga yang masih di 2014-2019 ya tapi saya nggak tahu direksi yang baru ini, apa masih semuanya diganti atau masih ada yang lama saya nggak tahu tapi *Insy Allah* mungkin teman-teman masih kenal sama saya ya. Terima kasih, Ketua.

KETUA RAPAT:

Ya, baik terima kasih Bu Irma. Ini salah satu teman energi kami di Komisi IX dan membuat Bu Felly sudah lebih, lebih tenang ini pasti. Silakan berikutnya Pak Harvey Malaihollo.

F-PDIP (HARVEY B. MALAIHOLLO):

Terima kasih Pak Pimpinan dan juga teman-teman di Komisi IX.

Yang terhormat Bapak Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan beserta jajarannya.

Saya Harvey Malaihollo dari Fraksi PDI Perjuangan. Saya murid baru di sini. Sebetulnya saya sedang *adjusting* di, di Komisi IX ini karena saya baru PAW tepatnya 1 minggu 2 hari yang lalu gitu. Itu saja, terima kasih banyak mudah-mudah kita bisa bekerja sama untuk mewakili Dapil saya di Papua Barat. Terima kasih. Makasih Pak Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih Pak Harvey dan Bu Irma.

Selanjutnya kami persilakan kepada Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Pak Anggoro Eko Cahyo kami persilakan.

DIREKTUR UTAMA BPJS KETENAGAKERJAAN:

Baik, terima kasih Bapak Pimpinan.

Yang kami hormati Pimpinan Komisi IX DPR RI, Bapak Melki, Ibu Felly, seluruh anggota Komisi IX, juga salam kenal Pak Harvey dan Bu Irma.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Salam sejahtera untuk kita semua

Om Swastiastu

Namo Buddhaya

Salam Kebajikan

Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas undangan pagi ini kami lengkap Bapak Pimpinan bertujuh. Sebelah kanan saya Pak Pram mungkin sudah kenal tapi saya *refresh* lagi tadi, Bu Irma juga menanyakan. Pak Pram Direktur Renstra dan IT, lalu Pak Edwin Direktur Investasi, Ibu Oci yang paling cantik Direktur Layanan, lalu sebelah kiri saya Pak Zainudin Direktur Kepesertaan, di belakang saya ada Pak Asep Direktur Keuangan, dan Pak Ari Direktur Human Capital dan Umum. Jadi kami semua baru Bu Irma sejak Februari tahun lalu jadi bulan depan ulang tahun pertama Bu yang di sini.

Pak Pimpinan, sesuai dengan undangan dan juga tadi disampaikan Pak Pimpinan kita akan menyampaikan evaluasi kinerja 2021 juga evaluasi inpres yang tadi Bapak Pimpinan sampaikan, selama ini sudah sosialisasi lalu apa dukungan yang dibutuhkan mungkin di poin kedua ini kita akan sampaikan kebutuhan dukungan apa. Yang ketiga adalah apa program unggulan di tahun 2022 agar mandat kepada kami bisa dijalankan dengan baik.

Slide pertama, evaluasi kinerja. Kinerja di 2021 semua masih tumbuh positif walaupun kita tahun kondisi pandemi kalau kita lihat dana investasi tumbuh 13,64% *year on year* per Desember 553 triliun. Jadi jika dibandingkan target 102%. Iuran, iuran sampai dengan akhir tahun 79,1 koma 12% triliun atau 103%. Kepesertaan aktif tumbuh 2,2% kami melihat pada saat pertengahan tahun sudah mulai cukup tinggi pertumbuhannya namun juga pada saat adanya pandemi gelombang kedua juga terjadi penurunan sehingga aktifnya berkurang namun tetap tumbuh 2% secara *year on year* dari target 91% totalnya 30,6 juta TK aktifnya. Hasil investasi tumbuh 9,37% atau 35,3 triliun di tahun lalu. Klaim jaminan tumbuh 17,6% atau 42 triliun. Klaim jaminan memang kami melihat dampak dari covid ini peningkatan klaim meningkat karena banyaknya klaim kematian itu yang kami melihat dari salah satu sebab tingginya klaim jaminan.

Berikutnya kita lihat agak lebih detail, bagaimana pergerakan kepesertaan aktif sejak 2019 sampai dengan 2021 terakhir. Kalau kita lihat tahun 2019 bulan Desember total TK aktif kita sekitar 34 juta, di 2020 dikarenakan covid turun kurang lebih hampir 4,5 juta menjadi 29,9 juta. Kuartal 1 tahun 2021 masih turun, kuartal kedua sudah mulai sedikit naik, kuartal ketiga naik dan kuartal keempat kita tutup dengan angka 30,6 triliun. Artinya kita sudah mulai ke angka psikologis 130 juta maaf 30 juta TK aktif.

Target memang ditetapkan 33,6 namun memang pada saat pertengahan tahun pada saat covid gelombang kedua kami coba prognosa perkiraan target pesertaan ada di 30,5 karena proyeksi penurunan dari PHK yang dirumahkan itu akan menyebabkan TK aktif akan turun. Jadi kalau dari prognosa kami dipertengahan tahun sampai dengan akhir tahun masih sedikit di atas prognosa yaitu 30,5 juta, di akhir tahun 30,66 juta.

Kalau kita lihat sebenarnya dari segmen penerima upah tetap tumbuh 4%, segmen bukan penerima upah tumbuh 42% karena bukan penerima upah memang jadi target kami yang terbaru dimana pekerja informal banyak yang belum terlindungi sehingga tahun lalu dan tahun ini dan tahun depan akan menjadi target utama kami, maka tahun lalu tumbuh 42%. Yang turun adalah jasa konstruksi karena kita tahu jasa konstruksi memang berkurang karena *refocusing* anggaran kepada Covid sehingga para pekerja di sektor konstruksi jumlahnya berkurang sehingga secara keseluruhan total pekerja TK aktif tahun 2021 masih tumbuh di angka 2,27%.

Demikian juga dengan iuran yang atas, iuran di tahun 2020 total iuran yang kami terima 73 triliun, tahun 2021 tumbuh menjadi 79 triliun naik 8% dibandingkan tahun sebelumnya dimana target yang ditetapkan adalah 76,5 triliun. Artinya tarif iuran bisa dilampaui. Begitu juga penambahan peserta sebenarnya Bapak Ibu kalau kita lihat di tahun 2021 total peserta baru yang bergabung itu adalah 19,7 juta dari target 18 juta tetapi kalau kita melihat di tabel yang kiri grafik yang kiri kenapa kok pertumbuhannya hanya 1 juta lebih karena yang turun yang keluar menjadi peserta juga banyak karena adanya covid sehingga mereka tidak bekerja kembali sehingga nggak mengiur. Jadi sebenarnya peserta baru yang bergabung cukup banyak tetapi yang keluar juga cukup banyak di tahun kemarin. Ini tantangan kami semoga tahun ini lebih sehat lagi pertumbuhannya karena yang keluar kita harapkan nggak setinggi yang lalu.

Berikut dari sisi layanan tahun lalu kami sudah memulai digitalisasi untuk layanan jadi kalau kita lihat grafik yang biru di atas itu adalah grafik klaim yang dilakukan total klaim yang melalui lapak asik menggunakan online, lalu yang warna hijau itu yang datang ke cabang 29.000 totalnya, lalu yang warna merah sejak Agustus itu adalah menggunakan Jamsostek Mobile ini baru kita luncurkan di bulan Agustus, September total klaim di tahun lalu jumlahnya 3.000.000 klaim. Kalau kita lihat yang warna merah yang menggunakan mobile sekarang jumlahnya sudah lebih tinggi dari yang ke cabang jadi yang warna hijau itu sudah lebih rendah dibandingkan ke cabang.

Kita terus akan mendorong yang mobile karena memudahkan peserta tidak perlu datang kantor cabang cukup melalui handphone mereka bisa klaim dan saat ini kalau kita lihat grafik yang sebelah kanan Januari, Februari tahun lalu *success ratio red claim* secara nasional itu 55%. Artinya dari 100 orang yang klaim 55 berhasil 45 tidak berhasil, per posisi terakhir *success claim* 95%. Artinya apa artinya dari 100 orang datang 95 orang bisa berhasil klaim karena selain kemudahan dengan digitalisasi juga dengan simplifikasi proses bisnis. Nah inilah yang kami melihat ke depan akan kami terus dorong Jamsostek

Mobile ini agar memudahkan peserta agar stigma bahwa mengklaim itu sulit itu semakin lama semakin hilang.

Slide berikut, lalu bagaimana dengan hasil investasi tadi Bapak Pimpinan juga sempat menyampaikan komposisi investasi saat ini 81% adalah di *fixed income* lalu yang 17,8% ada di *equity based*, yang dibawah 1% adalah *direct investment*. Kita melihat realisasi *fresh fund* kalau kita lihat tahun lalu tahun 2020 itu total iuran yang kita dapat adalah 73 triliun, tahun 2021 79 triliun, namun kalau kita lihat klaim di tahun 2021 juga tinggi 42 triliun tadi yang sempat kami sampaikan sekilas adanya klaim dari jaminan kematian yang meningkat sehingga kalau kita lihat tahun lalu jumlah *fresh fund* yang mampu dikelola oleh kami adalah 32 triliun artinya lebih kecil dibandingkan dengan *fresh fund* di tahun 2020. Namun investasi yang dihasilkan mampu tumbuh 9,37%. Artinya kami berusaha mengoptimalkan *fresh fund* yang lebih sedikit dengan *return* yang lebih baik.

Tadi Bapak Pimpinan juga menyampaikan bagaimana dengan DAOPS tahun lalu jumlah DAOPS yang kami serap artinya yang kami gunakan 4,11 triliun 4,23 dari anggarannya, artinya kita mencoba lebih efisien penggunaan DAOPS tersebut. Kami menyebutnya *cost conscious* supaya program itu selalu harus ada impectnya terhadap peserta.

Berikutnya tingkat kesehatan sesuai dengan peraturan di PMK yang kiri biasanya kita sebut *current ratio* aset lancar dibandingkan aktivitas jangka pendek kalau kita lihat target minimalnya ada di 200% saat ini rasionya ada 528. Artinya sehat karena jauh di atas target minimal, begitu juga dengan BOPO yang warna kuning, BOPOnya ada maksimal 95% saat ini ada di 90%, lalu yang hijau *equity* itu kalau kita lihat rasio 303% target minimalnya 150%. Artinya tingkat kesehatan berdasarkan PMK 242 itu kita sampaikan bahwa sehat.

Berikutnya rasio yang lainnya rasio likuiditas JHT saat ini adalah 5.000% ya artinya ini karena memang JHTnya aset lancarnya besar dan kewajibannya saat ini masih kecil, juga JKK, JP Jaminan Pensiun dan JKM. Jadi dari ketiga program ini ketiga-tiganya sehat JKM tadi 82% dikarenakan kita melihat tingginya klaim di masa covid sehingga dia di bawah 1%. Jadi yang menjadi catatan kami adalah JKM namun memang JKM ini di luar kontrol karena klaim JKM meninggal ini kita nggak ingin mudah-mudahan tahun depan jumlah klaim meninggalnya lebih sedikit karena covid yang sudah mereda. Berikut dari kinerja badan perspektif yang kita miliki, ada empat perspektif 40 indikator saat ini skornya adalah 106% artinya baik karena di atas 100%.

Slide berikutnya, tadi adalah kinerja 2021 yang pada intinya secara keseluruhan kinerja BPJS Ketenagakerjaan baik juga rasio-rasio keuangannya juga cukup baik. Lalu Inpres tadi Bapak Pimpinan sampaikan dukungan apa yang sudah yang dibutuhkan, kami pertama-tama mengapresiasi dukungan dari Komisi IX karena ikut mendorong bersama-sama Inpres 9 dan tahun lalu dalam rangka Inpres ini dukungan yang konkret sudah terlihat dimana dari Kementerian lembaga sudah muncul 4 permen dari Mendagri, Menko Ekonomi, Kemenaker, KKP, 14 surat edaran, 5 PKS dan 1 Kepmen Kementerian Agama.

Lalu di pemerintah daerah lebih banyak lagi ada 58 peraturan daerah, 32 lagu peraturan gubernur, 244 peraturan bupati, 233 surat edaran, 65 instruksi dan 151 MoU yang intinya sebenarnya dukungan ini ditujukan kepada perlindungan non ASN termasuk RT, RW, aparatur desa, guru, tenaga pendidikan dan tenaga penyuluh karena kami melihat potensi atau yang belum terlindungi masih cukup besar di non ASN dan juga pekerja rentan dan inilah yang kami dorong terus dimana tahun lalu banyak anggaran yang mungkin belum maksimal karena masih fokus covid namun tahun 2022 kami melihat sudah banyak pemerintah daerah yang boleh menganggarkan untuk perlindungan non ASN atau pekerja rentan. Kita berharap tahun 2022 kita bisa lebih akselerasi lagi mohon dukungan Bapak dan Ibu Komisi IX untuk mendorong ini karena di daerah-daerah rasanya sangat-sangat tinggi dan mereka juga sudah mulai menyiapkan anggarannya Bapak Pimpinan. Yang tahun lalu rasanya masih terpakai untuk covid.

Berikut, nah ini adalah angka realisasi tahun lalu kalau kita lihat potensinya non ASN itu masih besar potensinya karena saat ini baru kurang lebih 23% yang terealisasi dari total potensi 13,6 juta baru 3 juta yang terealisasi artinya tahun ini kita akan fokus untuk mendorong 77% sisanya dimana sisanya yang terbesar adalah di RT RW kalau kami melihat data dari total 9 juta potensi RT RW seluruh Indonesia baru 175.000 yang terlindungi sehingga masih ada potensi sangat besar.

Begitu juga guru tenaga pendidikan, dari 1,1 juta baru 340.000 nah inilah yang mungkin kami butuh *support* juga dari Bapak Ibu Komisi IX untuk bisa bersama-sama mendorong pemerintah daerah memberikan perlindungan kepada RT RW, RWnya non ASN dan juga guru tenaga kependidikannya yang saat ini masih belum terlindungi.

Pekerja rentan tadi sempat disampaikan juga kalau kita melihat data untuk di Sulawesi Utara, di tempat Bu Felly itu cukup tinggi Bu perlindungan pekerja rentannya 216.000 untuk pekerja rentan, 10 supir, 25.000 nelayan, lalu pedagang 6.000. beberapa daerah juga sudah mengikuti dan rasanya ini tahun 2022 kami yakin bisa kita dorong lebih tinggi karena kami udah bisa saling ngomporin Pak Ketua, ini wilayah daerah sini udah lama ini yang ini kok belum jadi bisa saling dorong supaya yang lain juga ikut memberikan perlindungan kepada pekerja rentan memang nanti isunya pada anggaran yang mereka siapkan.

Berikut, maaf tadi saya mundur sedikit. Untuk Papua juga termasuk yang tinggi *coverage*-nya, jadi Papua 90.000 jadi untuk *coverage* Papua itu termasuk yang tinggi karena jumlah pekerjanya hampir sebagian besar terlindungi dan dapat paritera juga kalau nggak salah kemarin ya Papua Paritrana Award, Papua Barat ya.

Berikutnya lagi, *slide* berikut, beberapa program unggulan tahun 2022 yang pertama kami akan melanjutkan percepatan transformasi digital dan penguatan teknologi informasi. Kami melihat integrasi data antar lembaga ini menjadi penting juga didahului atau bersamaan dengan program JKP Jaminan

Kehilangan Pekerjaan yang mengintegrasikan data antar BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan ini bagian penting. Pemanfaatan teknologi biometrik saat ini para pekerja yang belum terdaftar mereka bisa mendaftar tidak perlu ke cabang bisa hanya dengan handphone dengan mobile mereka bisa mendaftar memasukkan nomor NIK dan mereka menggunakan foto dirinya selfie untuk dapat biometriknya. Lalu juga penguatan infrastruktur dan IT, keamanan data ini menjadi penting karena begitu kita mulai integrasi data maka keamanan data harus menjadi fokus utama.

Yang kedua implementasi, koordinasi, dan evaluasi Pengembangan JKP Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang bulan depan sudah mulai akan berjalan dimana saat ini sudah fokus kita sosialisasi program kepada seluruh stakeholder, lalu bimbingan dan konsultasi teknis juga kepada pengantar kerja, mediator di kabupaten, dan juga kita membuat beberapa series-series expert talk. Ini memang sekarang series-series seperti itu memudahkan untuk pemahaman dan juga monitoring implementasi JKP. Ini akan jadi fokus kita di tahun ini.

Yang ketiga kami melanjutkan harmonisasi tadi koordinasi tentang Inpres Nomor 2 2021, bagaimana kita meneruskan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian bersama Kemenko PMK, KSP, dan Setcap dalam konteks rencana aksi yang sudah dibuat. Lalu Monev kepada Kementerian lembaga, gubernur, dan walikota dan juga mendorong *campaignnya*. Kami berharap di tahun 2022 akselerasi inves menjadi lebih baik karena anggarannya sudah mulai terbagi.

Lalu peningkatan kualitas layanan tadi salah satunya adalah bagaimana kita memperbaiki *customer* jernihnya *success ratio* sudah menaik jadi 95%, bagaimana kita mengembangkan job service inklusif center untuk difabel, ekosistem untuk Jamsostek Mobile nanti yang terkait dengan penyediaan informasi lapangan kerja itu akan kita usahakan masuk ke Jamsostek Mobile. Lalu peningkatan promotif preventif bagi pekerja sesuai dengan K3, lalu membership untuk *empowerment benefitnya*.

Yang kelima adalah pengembangan dan informasi layanan syariah. Akhir tahun lalu kami sudah memulainya di Aceh dan kita akan menjadikan Aceh sebagai tempat kita mengevaluasi begitu sudah *smooth* maka syariah ini akan kita wujudkan secara nasional. *Roadmap* syariah dan juga penyusunan almanya untuk terutama JHTnya Jaminan Hari Tua untuk layanan syariah karena dia sifatnya adalah investasi dan juga tadi bagaimana kita melihat piloting di Aceh untuk kita ambil pelajarannya agar pada saat nanti kita *roll-out* nasional kita sudah lebih siap.

Berikutnya, demikian Bapak Pimpinan dan anggota di Komisi IX beberapa update dari evaluasi kinerja 2021. Lalu evaluasi inpres terkait pesertaan dan juga beberapa fokus program unggulan di tahun 2022. Demikian saya kembalikan Bapak Pimpinan. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih paparan dari Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Pak Anggoro terkait evaluasi kinerja 2021, evaluasi implementasi Inpres Nomor 02 2021, dan program kerja unggulan 2022. Kita lihat di sini ada banyak catatan yang bisa dijadikan bahan untuk kita dalam dan bisa kita buat jadi rekomendasi baik itu dalam aspek evaluasi tahun lalu maupun juga program unggulan tahun ini dan beberapa catatan kesehatan kita ambil lagi dari bahan Pak Dirut. Untuk itu kami persilakan Bapak Ibu sekalian anggota dan Pimpinan Komisi IX untuk menyampaikan pertanyaan nanti kita mulai dari Pak Darul Siska, kemudian nanti Bu Elva, Bu Irma Suryani, dan Pak Edy Wuryanto nanti yang lain menyusul. Silakan Pak Darul.

F-P. GOLKAR (DRS. H. DARUL SISKA):

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pak Pimpinan rapat, Ibu Ketua, teman-teman Komisi IX, Pak Direktur BPJS Tenaga Kerja dan segenap jajaran yang hadir.

Pertama selamat tahun baru Pak kita baru ketemu setelah setahun yang lalu mudah-mudahan tahun ini buat kita lebih baik daripada tahun yang lalu dan dari yang Bapak sampaikan agak enak kita dengarlah tahun 2021 ada yang enak kita dengar mudah-mudahan tahun 2022 makin enak kita mendengar Pak Dirut menyampaikan *reportnya* di sini.

Pertanyaan saya yang agak pendalaman, yang pertama Pak di halaman 3 Bapak iurannya bisa 100% lebih tapi kepesertaannya di bawah target Pak cuman 91% barangkali bagi saya yang agak awam nih boleh dijelaskan Pak kok bisa kepesertanya tidak mencapai target tapi iurannya bisa melebihi target.

Kemudian yang agak mengkhawatirkan kita klaimnya juga besar Pak tahun lalu nah boleh kami diberi informasi tentang jenis klaim terbesar darimana Pak kalau itu JKM berapa yang korban covid Pak yang mendapat dibayar klaimnya oleh BPJS TK.

Tadi Bapak menyampaikan target pesertanya 33 juta tapi kemudian karena covid membuat produk prognosa 30 juta sekian dan capaiannya masih di atas prognosa tapi menurut saya bikin prognosa ini bukankah untuk menghibur diri sendiri Pak jadi kalau target nggak tercapai yang menang prognosa kami nggak, nggak segitulah kira-kira gitu. Nah menurut saya justru prognosa kalau boleh jangan melemahkan semangat Pak tetap saya menurut saya target walaupun ada prognosa di internal jangan disampaikan disinilah gitu loh ini kan kesannya ini dalam rangka menghibur dirilah kalau nggak tercapai ya memang prognosa kami sekian.

Kemudian ini sudah diperbaiki ternyata data yang di sebelah kanan itu Pak di halaman 4 udah diperbaiki di kami masih dibandingkan dengan tahun 2021 sebelumnya tadi disajikan udah 2020 ya.

Kemudian ini yang menyangkut realisasi fresh fund Pak, itu kan turun minus 4% lebih nah saya kira ini harus menjadi catatan Pak walaupun ada kompensasinya hasil investasi yang tumbuh tapi kalau boleh yang turun-turun ini tahun ini tidak kita dengar lagi Pak.

Kemudian dari dukungan regulasi yang disampaikan oleh kementerian, lembaga, Pemda pasca inpres Pak kalau boleh kami diberi rinciannya Pak supaya kami lihat pemda-pemda di dapil kami yang kurang respon sehingga kita bisa dorong karena ini dalam rangka perlindungan warga kita sehingga kalau Pemdanya belum buat edaran, belum ada perda kita mau dorong supaya mereka mengeluarkan ada aturan-aturan yang memberi dukungan bagi perlindungan masyarakat di daerahnya yang memang dimungkinkan dari perpres ini.

Nah yang kita lihat ceruk pesertanya masih besar sekali Pak, nah saya kira ini tantangan buat BPJS Tenaga Kerja, RT RW baru 2% padahal inikan strukturnya mudah dilihat Pak artinya orang yang bisa diketahui dia dari kelurahan itu RTnya siapa, RWnya siapa begitu. Jadi mustinya ini bisa lebih mudah didekati dan bisa lebih maksimal pencapaiannya di samping tenaga kependidikan ini saya kira penting Pak di dekati lebih serius karena mereka mencerdaskan kehidupan bangsa salah satu tugasnya melaksanakan pencapaian cita-cita kemerdekaan kita tapi kan banyak guru-guru ini yang tidak terlindungi Pak. Nah saya kira ini mohon yang menyangkut guru TK, guru tenaga pendidikan ini mohon mendapatkan perhatian lebih dalam rangka keikutsertaannya sebagai peserta BPJS TK.

Dari program yang disajikan akan dilakukan tahun 2022 ini targetnya masih kuan kualitatif Pak nah bolehkah kita diberi target-target yang kuantitatif supaya kita bisa melihat berapa sih capaian target pesertanya tahun 2022 kalau begini kan kita nggak bisa lihat nih Bapak mau berapa pesertanya walaupun ini cuman disebut nih yang unggulan-unggulan tapi disamping yang unggulan kalau bisa yang konkret-konkret juga kita bisa lihat.

Nah yang terakhir kami ingin mendengar juga Pak, perkembangan investasi yang potential loss tahun lalu Pak yang dilakukan oleh direksi lama, adakah langkah-langkah atau perkembangan-perkembangan yang dilakukan oleh direksi baru selama periode 2021 ini sehingga kita bisa melihat mudah-mudahan potential loss itu tidak loss betulan sudah ada langkah-langkah yang diambil agar tidak loss. Terima kasih Pak Ketua.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Waalaiikumsalam

Banyak catatan dari Pak Darul.

Berikutnya kepada Bu Elva nanti bersiap-bersiap Ibu Irma Suryani. Silakan Bu Elva.

F-PDIP (Dra. ELVA HARTATI, S.IP.. M.M.):

Terima kasih Pimpinan.

**Pimpinan beserta teman-teman Komisi IX yang saya hormati,
Bapak Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan beserta jajarannya,
serta para Direksi.**

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pada *slide* yang ketiga Pak, kami lihat yang, bentar Pak mohon maaf sebentar saya lihat catatan saya. Di *slide* yang ketiga disajikan investasi BPJS Ketenagakerjaan per 31 Desember realisasinya mencapai 553,50 triliun tentu dana ini dana kelola masih diinvestasikan di berbagai surat-surat berharga, entah ditarik atau ditanam kembali namun kami ingin mendalami masih terkait dengan keamanan dananya Pak, sebagaimana RDP yang lalu bagaimana keamanan dana pada investasi saham Garuda dan saham yang berisiko lainnya.

Di samping itu pada saat yang sama iuran kepesertaan per 31 Desember 2021 mencapai 79,12 triliun. Tentu saat ini iuran tersebut ada di dalam pengelolaan keuangan BPJS Ketenagakerjaan, apabila mengacu kepada Undang-Undang BPJS untuk mengukur kinerja maka capaian kinerja investasi dan iuran tersebut yang pengelolaan dananya ditujukan untuk penggunaan sebesar-besarnya kepentingan untuk kepentingan peserta. Hal ini diukur ke dalam pengelolaan aset dana jaminan sosial dan aset BPJS yang tidak boleh menghilangkan unsur kepentingan peserta yang paling utamanya. Ternyata capaian kinerja BPJS Ketenagakerjaan dalam penggunaan investasi dana tersebut sampai saat ini di masyarakat terutama saat pandemi Covid-19 ini untuk peserta perusahaan dan pekerja belum terlihat signifikan.

Hal ini juga didukung dengan realisasi data klaim pada *slide* 3, realisasi per 31 Desember 2021 hanya mencapai 42,89 triliun dibandingkan dengan investasi sebesar 553,50 triliun tentu ini dapat menunjukkan keberpihakan investasi belum sebesar-besarnya kepentingan peserta untuk kepentingan. Bagaimana meningkatkan kinerja BPJS Ketenagakerjaan sementara keberpihakannya belum terlihat.

Lanjutnya berkaitan dengan agenda hari ini apakah evaluasi kinerja BPJS Ketenagakerjaan tidak melaporkan data biaya operasional? Karena berdasarkan pemaparan yang diberikan tidak satupun *slide* yang membahas anggaran operasional BPJS Ketenagakerjaan, juga tidak ada *slide* tentang aset BPJS dan aset dana jaminan sosial yang diamanatkan Undang-Undang BPJS untuk pengelolaannya. Dan bagaimana mengukurnya apabila evaluasinya jika tidak ada pemaparannya karena perlu pemaparan yang transparan. Demikian dari saya terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam

Terima kasih Bu Elva, berikutnya Bu Irma Suryani bersiap-siap Pak Edy Wuryanto.

F-P. NASDEM (IRMA SURYANI, S.E.):

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pimpinan dan Direksi BPJS Tenaga Kerja yang saya hormati.

Saya mulai pendalam pendalaman ini dari *slide* nomor 1 tentang dana investasi. Dana investasi memang naik di atas target sekitar 2,5% 0,5% tapi hasil investasi masih di bawah target walaupun kinerja BPJS TK sudah menunjukkan kinerja yang positif.

Untuk iuran saya, saya menengarai ya saya menengarai atau mengira-ngira iurannya naik kemudian klaimnya banyak itu dikarenakan banyak peserta yang mengajukan klaim sehingga secara tiba-tiba mereka mengaktifkan atau membayar iuran jadi iuran yang dibayarkan itu semata-mata untuk persyaratan klaim pengajuan klaim. Nah hal ini yang harus juga menjadi perhatian BPJS Tenaga Kerja.

Kntuk kepesertaan aktif sama seperti yang iuran tadi ada kaitannya karena untuk mengajukan klaim tiba-tiba mereka mengaktifkan kembali dan kemudian membayar iuran ini kan juga perlu menjadi perhatian jangan sampai karena mereka mau melakukan klaim kemudian kepesertaannya tiba-tiba diaktifkan dan mereka membayar iuran artinya kenaikan-kenaikan yang ada di sini adalah kenaikan-kenaikan semu menurut saya.

Hasil investasi tadi saya sudah sampaikan walaupun kinerja BPJS TK positif tapi masih di bawah target, kenapa dana investasinya naik tapi investasinya belum mencapai belum maksimal. Klaim jaminan seperti yang disampaikan Pak Darus Siska tadi bahwa klaim jaminan kita masih tinggi segera itu tadi yang menjadi alasan kenapa tiba-tiba iurannya naik kepesertaannya juga naik.

Kemudian saya ingin menyampaikan juga terkait total pengajuan klaim JHT melalui online. Saya kira belum semua pekerja Indonesia dapat terakses dengan layanan online dengan baik tentu hal ini harus diperhatikan mengingat program-program online yang ada di Indonesia ini masih terkendala dengan IT Pak, masih terkendala dengan kesiapan dari pemerintah terkait misalnya dengan signal-signal yang ada di Indonesia ini yang namanya *blank spot*nya juga masih banyak, kemudian juga SDM-nya tentu kalau SDM-nya tidak dipersiapkan dengan baik yang namanya layanan online juga nggak ada gunanya juga Pak ya ketika mereka misalnya mengakses tiba-tiba SDM-nya

tidak siap akhirnya yang mereka terima cuman biasanya sih apa namanya lain kali telepon kembali belum tersambung coba kembali. Hal-hal seperti ini kan sering terjadi di layanan-layanan online. Untuk itu maka, BPJS Ketenagakerjaan harus betul-betul memperhatikan hal ini.

Berikutnya terkait persentase realisasi non ASN dibandingkan potensi sebesar jika dibandingkan potensi sebesar 23% sehingga masih dapat ya masih ada pekerja ASN non ASN sekitar 77% yang belum terlindungi dalam program BPJS Ketenagakerjaan tentu seperti yang tadi Pak, Bu Elva dan Pak Darus Siska sampaikan ini juga perlu digarisbawahi untuk bisa melakukan jemput bola Pak karena masih banyak yang non ASN ini yang belum menjadi anggota BPJS Tenaga Kerja.

Dan Bapak perlu tahu bahwa, kenapa masyarakat Indonesia yang belum mengerti manfaat BPJS TK ini karena mereka belum ngerti manfaatnya maka kemudian mereka nggak mau belum, belum menjadi anggota BPJS Tenaga Kerja, karena apa? Karena sosialisasinya juga belum, belum apa belum masif. Di daerah ketika kita melakukan program misalnya sosialisasi BPJS TK ketika kita tanyakan dari 100 orang yang hadir itu paling 2, 3 orang yang mengerti apa itu manfaat menjadi anggota BPJS TK. Padahal untuk bisa menjadi anggota BPJS TK ini kan gampang ya, gampang hanya dengan KTP, KK misalnya tapi kenapa mereka tidak mau belum mau menjadi anggota BPJS TK atau belum terdaftar menjadi anggota BPJS TK karena mereka belum tahu manfaatnya. Jadi sosialisasinya masih sangat kurang.

Kemudian yang selanjutnya, di sini disampaikan pemerintah membuat regulasi sebagai landasan untuk membantu pekerja sektor informal dan pekerja sosial yang mana mereka sudah banyak melakukan hal-hal terbaik bagi masyarakat ya Badan Pusat Statistik pada bulan Februari 2021 mencatat jumlah pekerja informal mencapai 78,14 juta tapi mereka juga banyak yang belum terlindungi Pak. Pertanyaannya skema pembiayaan seperti apa yang akan dilakukan BPJS Naker untuk membantu pemerintah untuk membantu pekerja sektor informal dan pekerja sosial ini. Jadi skemanya Pak, skema seperti apa sehingga mereka yang belum masuk ke dalam program BPJS Tenaga Kerja ini bisa menjadi anggota BPJS Tenaga Kerja.

Kemudian sama-sama kita tahu JKP BPJS Ketenagakerjaan yang diatur dalam PP JKP yakni Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan Pak, nah pertanyaannya bagaimana pelaksanaan program baru JKP BPJS pasca terbitnya PP 37 Tahun 2021 dilaksanakan oleh BPJS Naker. Sama-sama juga kita tahu Pak akibat *site* efek dari pandemi ini banyak sekali terjadi PHK, ya kan, banyak sekali terjadi PHK.

Nah untuk itu PP 37 ini, ini kan perlu ya perlu di, di, difokuskan atau di dipikirkan oleh BPJS Naker untuk bisa bersama-sama dengan Kementerian Tenaga Kerja ya melakukan memberikan perlindungan kepada kawan-kawan yang korban PHK ini seperti apa. Ini yang harus sama-sama dikoordinasikan antara BPJS Tenaga Kerja dengan Kementerian Tenaga Kerja karena *site* efeknya luar biasa Pak pengangguran banyak sementara kartu pra kerja juga

belum berjalan secara efektif sehingga korban atau *site* efek dari pandemic ini luar biasa membuat masyarakat Indonesia miskin. Untuk itu, BPJS Naker harus ambil peran dalam mengatasi masalah-masalah ini bersama-sama dengan Kementerian Tenaga Kerja.

Saya kira itu saja yang ingin saya sampaikan mohon dapat penjelasan dan saya ingin program-program BPJS Naker yang seperti apa ya yang mampu bisa menjawab *site* efek dari pandemi yang kemudian membuat banyak PHK di seluruh Indonesia ini. Terima kasih.

*Wabillahi Taufiq Wal Hidayah
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih Bu Irma.

Berikutnya Edy Wuryanto bersiap-siap Pak Sukamto.

F-PDIP (Dr. H. EDY WURYANTO, S.KP., M.Kep.):

Terima kasih, Pimpinan.

**Pimpinan, anggota yang saya hormati,
Pak Dirut beserta seluruh jajaran yang saya hormati.**

Berapa pendalaman saya mungkin sudah disampaikan yang lain tetapi ya perlu saya sampaikan ulang. Pertama apa yang menyebabkan ya tadi peserta BPJS Naker tidak maksimal data saya hanya 2,27% peningkatannya. Apakah Inpres Nomor 2 Tahun 2021 ini memberikan kenaikan kepesertaan secara signifikan tentu momentum Inpres Nomor 2 Tahun 2021 harus digunakan betul dan itu menurut saya senjata yang harus dimanfaatkan oleh BPJS Naker agar dari sisi kepesertaan itu meningkat.

Yang kedua apa kendala bagi BPJS Naker sehingga belum bisa menindaklanjuti Putusan MK, Putusan MK Nomor 70 Tahun 2011 memperbolehkan pekerja formal yang tidak kunjung didaftarkan oleh pengusaha ke BPJS Naker dapat mendaftarkan sendiri ke BPJS Tenaga Kerja namun sampai saat ini BPJS Naker belum bisa menerima pendaftaran sendiri dari pekerja formal. Ini saya kira pendalaman sayang kedua.

Yang ketiga hampir sama dengan Bu Irma tadi, mengapa BPJS Naker belum mempublikasikan kepesertaan JKP ke pekerjaan apa upaya direksi untuk meningkatkan kepesertaan JKP bagi perusahaan yang masih mendaftarkan pekerjanya sebagian atau mendaftarkan pekerjanya hanya sebagian program di BPJS Naker. Datanya saya kira sudah banyak karena tidak perlu saya ulang tapi bahwa saya setuju dengan Bu Irma persoalan jaminan kehilangan pekerjaan ini harus mendapat *priority* terutama di era pandemi covid.

Yang keempat ini bagaimana proses pembahasan PBI di JKK dan JKM serta JHT karena saya kira persoalan PBI tentang JKK, JKM, JHT ini sudah di endos, apa kendalanya.

Yang kelima apa upaya direksi untuk meningkatkan kepesertaan BPJS Naker khususnya dari segmen pekerja penerima upah swasta dan PBPJ karena dilihat dari jumlah pekerja formal dan informal berdasarkan data BPS masih banyak potensi kepesertaan di sektor pekerja formal dan informal.

Yang ketujuh tentang kepesertaan, bagaimana strategi Direksi BPJS Naker untuk meningkatkan kepesertaan dari sisi penegakan hukum karena kalau saya melihat alokasi anggaran untuk penegakan hukum itu hanya 5 milyar dari total anggaran operasional BPJS Naker 4,57 triliun dan tampaknya sosialisasi penyuluhan juga anggarannya hanya 383 milyar dari total anggaran operasional BPJS Naker.

Sosialisasinya kurang, penegakan hukumnya juga lemah, regulasi sudah ada maka bagi perusahaan yang nakal yang sudah ada tendensi pelanggaran hukum maka menurut saya BPJS Naker harus mengoptimalkan penegakan hukum ini kalau sudah urusan pidana pelanggaran hukum ya saya kira untuk perlindungan pekerja, untuk kesejahteraan pekerja, maka jangan sungkan-sungkan untuk menindak perusahaan yang sudah mapan tapi tidak memperhatikan sektor ketenagakerjaan di perusahaan perusahaan yang sudah mapan. Ini saya kira hal yang penting kalau memang persoalan sosialisasi yang tadi disampaikan oleh teman-teman itu anggarannya lemah ya diperkuat termasuk juga penegakan hukum.

Yang seterusnya persoalan investasi, bagaimana strategi Direksi BPJS Ketenagakerjaan untuk meningkatkan imbal hasil investasi yang tadi juga Bu Irma sudah disampaikan bahwa dengan mengelola dana pekerja yang sudah mencapai 553,5 triliun per 31 Desember 2021 tentunya direksi dituntut untuk lebih profesional mengelola dana pekerja tersebut sehingga bisa mendapatkan hasil imbal hasil investasi yang lebih besar.

Selama 4 tahun ini imbal hasil investasi cenderung turun sehingga imbal hasil JHT kepada pesertapun mengalami penurunan. Dengan imbal hasil sebesar 35,36 triliun dari total dana kelolaan sebesar 553,5 triliun berarti imbal hasil yang dicapai tahun ini sekitar 6,38% bila dibanding tahun 2020 hasil investasi sebesar 32,33 triliun dengan dana kelolaan sebesar 487,5 triliun artinya imbal hasil di 2020 yang sebesar 6,63% menunjukkan bahwa tahun 2021 ini imbal hasil itu relatif turun. Saya kira tadi sudah disampaikan oleh Bu Irma. Ini karena dana kelolaan dana tidak ditambah di instrumen saham dan reksadana yang memberikan imbal hasil lebih baik dari instrumen deposito dan SBN. Ini saya kira persoalan ini sudah banyak dibahas pada rapat-rapat sebelumnya.

Lalu persoalan bagaimana direksi menghitung imbal hasil dana kelolaan di instrumen LPI pada tiap tahunnya. Kita tahu bahwa sejak hadirnya PP Nomor 374 Tahun 2020 turunan Undang-Undang Cipta Kerja tentang Lembaga Pengelola Investasi, Direksi BPJS Tenaga Kerja akan menempatkan dana

pekerja di LPI sekitar 5% atau sekitar 24 triliun tentunya ini investasi jangka panjang yang imbal hasilnya belum bisa dapat dalam waktu dekat belum tentu dalam waktu setahun atau 5 tahun bahkan mungkin bisa mencapai 10 tahun dengan demikian ini akan berdampak pada nilai imbal hasil yang dapat BPJS Naker pada tahun ini atau tahun depan. Direksi harus menginformasikan pengelolaan dana di LPI kepada peserta secara transparan. Saya kira ini hal yang hal-hal yang penting karena ini bagian dari dampak dari disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja. Saya kira itu Pimpinan beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Terima kasih.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Waalaikumsalam

Berikutny Pak Sukamto, nanti bersiap-siap Ramson dan kemudian Bu Nadlifah, dan Pak Anas. Silakan Pak Sukamto.

F-PKB (H. SUKAMTO, S.H.):

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

**Pimpinan beserta anggota Komisi IX yang terhormat,
Bapak Direktur BPJS Tenaga Kerja seluruh jajarannya yang sangat kami hormati.**

Saya sedikit ingin menyampaikan. Sebenarnya Pak program ini mestinya sangat menarik oleh masyarakat terutama pekerja-pekerja yang non perusahaan non gaji ini sangat memerlukan ini tapi sosialisasi Pak yang ini yang kurang. Tolong ini berkali-kali saya pada rapat minta sosialisasi, sehebat dan sebaik apapun kalau sosialisasinya kurang otomatis tidak bisa sampai ke bawah.

Baik untuk para pekerja-pekerja perusahaan yang mendapatkan gaji secara otomatis pimpinan perusahaan juga pasti akan memasukkan karyawannya tapi bagi mereka-mereka yang pekerja tanpa mendapatkan upah Pak misalnya kayak pedagang ini pedagang itu dan sebagainya itu kan lebih banyak dan mereka pada umumnya belum pada tahu. Untuk itu Pak, sosialisasi yang paling tepat melalui anggota dewan begitu bergerak sudah seluruh Indonesia semua provinsi ada yang kita mewakili di sini. Nah untuk itu tolong ditambah untuk sosialisasinya yang melalui dewan ini benar-benar membantu, membantu apa itu informasi ini pada masyarakat.

Terlebih kalau anggota dewan yang ngundang, biasanya RT, RW, Pak Lurah, Pak Dukuh, itu diundang sehingga mereka kayak ToT *Training of Trainer* sehingga mereka akan menyampaikan pada masyarakat. Satu contoh Pak ya, dengan hanya membayar Rp 16.000 1 bulan kalau dia meninggal dia dapat 42 juta itu lampu nggak akan bisa itu sampai kapanpun meskipun di tabungan

hampir tabungan 100 tahun itu nggak, nggak, nggak, nuntut itu. Ini sebetulnya sangat menarik sekali dan sangat membantu pada, pada masyarakat meskipun tidak semuanya orang yang, yang ikut itu akan menikmati tapi dengan adanya yang 16 juta, 16 ribu, 42 juta ini kan semua pasti akan menikmati kalau dia tidak pernah sakit dan sebagainya. Ini, ini pun kok tidak masyarakat belum pada tahu itu lho Pak tolong ini sosialisasi ditingkatkan kalau perlu Pak dewan jangan hanya 5 kali, 10 kali jadi biar merata ini semua akan, akan, akan apa itu mensosialisasikan ini.

Ada meskipun tadi udah di singgung kami tegaskan sekali Pak dengan adanya pandemi ini banyak karyawan yang di PHK, semula mereka udah tanggung oleh perusahaan tapi setelahnya mereka di PHK otomatis putus Pak dari perusahaan. Nih bagaimana nasibnya, apakah mereka juga karena PHK mereka ada kemudahan mereka tidak berubah ya tetap menjadi anggota apakah dia tetap harus membayar sendiri. Ini yang menjadi permasalahan karena banyak sekali hal-hal akibat PHK ini baik BPJS Kesehatan maupun BPJS Tenaga Kerja ini banyak yang mereka tidak mampu karena mereka PHK ya PHK dan masa pandemi ini terus terang saja pengeluaran masyarakat lebih tinggi. Kenapa lebih tinggi? Makan seadanya harus setiap hari makan ya mereka anak tidak bisa tatap muka daring yang sekarang ini *alhamdulillah* sudah mulai tatap muka ya dan sebagainya dan sebagainya.

Untuk itu, mereka harus beli masker dan sebagainya. Ini kan juga menambah *cost* kalau keluarganya 5 satu hari 1 orang masker 2 aja udah 10 masker. Ini aja sementara itu Pimpinan yang dapat saya sampaikan nanti kalau perlu kita tambah lagi, makasih.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam

Pak Sukamto. Berikutnya kami persilakan Pak Ramson, bersiap-siap Ibu Nadlifah dan Pak Anas dan nanti Pak Nurhadi. Silakan Pak Ramson.

F-P. GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Makasih Pak Ketua.

**Yang saya hormati Pak Ketua Rapat, Pimpinan, dan rekan-rekan anggota dewan yang terhormat,
Pimpinan BPJS Tenaga Kerja.**

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Salam sejahtera untuk kita semuanya

Pak Dirut BPJS ini sebenarnya enak nih jadi Dirut BPJS Tenaga Kerja hanya bagaimana seni mengelola uang yang ada aja. Ini saya lihat strukturnya ini biarpun bukunya kecil ini dana investasi ada 553 triliun menghasilkan dari

hasil investasi tahun 2021 35,3 triliun, sementara klaim jaminan hanya 42,8 triliun jadi kalau dari hasil investasi aja hampir bisa menutupi klaim jaminan hanya kurang 7 triliun aja. Sementara iuran 79,12 triliun untuk 2021. Jadi sebenarnya cukup bagus artinya maksud saya tidak susah selamat yang di sini nggak dikasih tahu bonusnya direksi berapa nih dengan hasil investasi ini 35,36 triliun nanti tolong di, diberitahukan.

Terus yang kedua biaya operasional berapa karena saya pikir klaim jaminan ini belum termasuk biaya operasional BPJS tenaga kerja.

Terus yang kedua bahwa ada di sini di halaman 4, 2019 yang kepesertaan aktif 34,1 triliun, jasa konstruksi pesertanya 11,2 triliun, 2020 7,8 triliun, 2021 6,2 triliun. Memang 2019 percepatan pembangunan sektor konstruksi dari pemerintahan Jokowi tetapi 2021 jauh lebih rendah dari 2020 sementara penerimaan negara bertambah signifikan di 2021 melewati target. Nah ini tolong dijelaskan bagaimana apanya yang salah itu, artinya kan tentunya menurunnya kepesertaan aktif dari jasa konstruksi karena jasa konstruksi itu kan tidak *fix* artinya temporer ya sesuai dengan perkembangan pembangunan konstruksi jadi tenaga kerjanya juga menyesuaikan ini tolong dijelaskan.

Jadi terus yang kedua ini juga yang hasil investasi direktur investasinya yang mana nih Pak siapa? Pak siapa? Oh Pak Edwin, ini seharusnya bisa lebih besar Pak karena fluktuatif di 2021 itu luar biasa kalau pintar-pintar itu bisa *gainnya* besar sekali itu seharusnya sehingga aturan kapital *gainnya* bisa menutupi klaim jaminan sehingga itu aja udah udah bisa menutupi tanpa disedot dari iuran, iuran menambah dana investasi. Ini karena memang ini apa namanya uangnya tenaga kerja ini diserahkan sama BPJS TK ini bagaimana mengelolanya kalau pintar-pintar mengelola bagus karena ini untuk rakyat tapi kalau salah-salah mengelola bahaya juga.

Tapi saya juga apresiasi masih bisa 35,36 triliun dengan perbedaan klaim hanya 7 triliun hanya pertanyaan juga klaimnya 42,8 triliun apakah banyak yang tidak direalisasikan klaim dari tenaga kerja sehingga hanya 42,8 triliun tetapi kalau hampir semua sudah direalisasikan dengan perbandingan dengan hasil investasi ya saya juga apresiasi ini artinya tanpa harus dibayar dari iuran gitu artinya dibayar tapi hanya 7 triliun sementara iuran di sini saya lihat untuk 31 Desember 2021 79,12 triliun ini maksudnya iuran 1 tahun ya Pak ya? Iya, jadi cukup bagus juga sih artinya tenaga kerja kita juga sebenarnya cukup menurut pengamatan saya cukup loyal untuk membayar iuran-iuran tenaga kerja justru itu perlu di, di apa namanya *feedbacknya service* pelayanan yang bagus dari rekan-rekan yang ada di BPJS TK.

Saya sekali lihat ini saya bisa ngerti Pak apa yang Bapak kerjakan di sini tapi tadi kata yang terhormat Pak tadi anggota yang terhormat soal di DP di apa di dapil memang perlu juga itu jangan terlalu pelit-pelit untuk sosialisasi di dapil anggota dewan terhormat semua di *check-check* saya lihat itu. Kebetulan juga ada di dapil saya juga dari BPJS terlalu banyak ininya gitu waktu apa sembako atau apa itu jadi itu perlu juga apalagi ditingkatkan apa, apanya iya jadi sehingga apa namanya rekan-rekan anggota yang terhormat khususnya

anggota Komisi IX lebih dekat dengan rakyat hasil dari perjuangan bersama antara BPJS TK dengan rekan-rekan anggota yang terhormat Komisi IX. Itu aja dari saya Pak Ketua. Terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Salam sejahtera kita semuanya

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam

Baik, terima kasih Pak Ramson, yang tadi memang semuanya itu diperuntukan bagi pekerja di daerah jadi tetap buat pekerja di daerah. Kami persilakan yang berikutnya Ibu Nadlifah, bersiap-siap Bu Netty, dan nanti Pak Anas dan Pak Nurhadi. Silakan Bu Nadlifah.

F-PKB (Hj. NUR NADLIFAH, S.Ag., M.M.):

Terima kasih, Pimpinan.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

**Pimpinan dan Bapak Ibu anggota Komisi IX yang saya hormati,
Bapak Dirut BPJS Ketenagakerjaan beserta seluruh jajarannya yang saya hormati.**

Saya ucapkan selamat tahun 2022 semoga sukses selalu dan sehat bahagia. Pertama saya memberikan apresiasi terhadap kinerja jajaran, jajaran dari BPJS Ketenagakerjaan atas capaiannya di 2021 mudah-mudahan 2022 menjadi jauh lebih baik.

Saya menambahi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ramson jadi biar tidak panjang-panjang saya ingin menambahi saja. Biaya operasionalnya Bapak belum laporkan ditambah lagi ini sudah saya tanyakan beberapa kali ada nggak dana nasabah yang gantung, gantung dalam hal ini misalnya seperti ini, ada karyawan yang ikut BPJS Ketenagakerjaan misalnya sudah bayar 3, 4 bulan atau 1 tahun kemudian berhenti nah ini kalau walaupun iurannya kecil tapi akumulasi dari jumlah nasabah itu besar maka akan menjadi besar juga.

Ini sebenarnya sudah saya tanyakan beberapa kali untuk itu saya minta laporannya akumulasi dari dana nasabah yang gantung ini berapa dan posisinya dimana apakah *include* dalam akumulasi yang 553,50 triliun itu atau bagaimana. Nah dari angka ini adakah alokasi yang diberikan untuk masyarakat, kalau dulu ya semacam CSR kalau CSR kan sudah tidak boleh lagi ya di, di BPJS Ketenagakerjaan ada nggak alokasi itu.

Kemudian yang berikutnya ini saya tunggu ya Pak ya data, data dari nasabah gantung ini karena ini kan uangnya masyarakat juga dan kalau misalkan harus dialokasikan ke mana ya kita perlu tahu juga gitu.

Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan kepesertaan. Saya tahu bahwa sumber dana utama dari BPJS ini adalah iuran dari peserta maka kita harapkan peserta yang sudah ikut ini menjadi aktif saya apresiasi ada penambahan *coverage* di, di manfaat BPJS Ketenagakerjaan ini misalnya ada tambahan beasiswa untuk anak-anaknya ini bagus sekali dengan iuran yang sangat kecil. Nah kita saya jujur saya bingung kalau misalnya perusahaan asuransi swasta bisa berkembang begitu dengan bagusnya kalau kita tidak berarti ada yang kurang pas kenapa masyarakat dengan iuran yang sangat kecil dan manfaat yang luar biasa itu masih belum mau ikut BPJS Ketenagakerjaan mungkin ada penyampaian-penyampaian yang tidak ketemu antara yang dibutuhkan, yang dibutuhkan masyarakat dengan apa yang disampaikan.

Nah ini berarti sosialisasi yang harus dilakukan oleh BPJS ini harus dimodifikasi sedemikian rupa sehingga masyarakat itu merasa oh ya saya butuh punya proteksi, oh ya saya harus punya proteksi bagaimana dengan anak-anak saya bagaimana dengan keluarga saya ketika saya sebagai pencari nafkah ketika saya sebagai tulang punggung keluarga harus berhenti bekerja. Nah ini harus dipahami betul kepada masyarakat di semua tingkatan.

Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ini dan masih ada 77% non ASN, artinya masyarakat masih jauh lebih banyak yang belum masuk di kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan meskipun itu kalau saya lihat di sini yang bukan penerima upah ada peningkatan di tahun 2021 42,36% berarti masyarakat kita yang bukan penerima upah ini sesungguhnya memiliki kesadaran yang baik tinggal bagaimana kita memberikan masukan kita memberikan sentuhan dan kita memahami bahwa kita semua butuh proteksi. Nah ini, ini perlu, perlu apa kreativitas dari semua pihak dan kami Komisi IX pasti akan *mensupport* itu.

Kemudian kalau saya lihat dari data yang dilaporkan oleh, oleh Pak Dirut di sini ada K/L pusat, K/L pusat masih 31% ini di pusat loh justru kalah dengan provinsi dan kabupaten kota yang kabupaten kota yang angkanya sampai 94% ini kan berarti perlu ada komunikasi koordinasi di tingkat kementerian lembaga yang ada di pusat bagaimana semuanya bisa ikut terproteksi di, di BPJS Ketenagakerjaan ini. Mungkin orang kalau masih sehat segar bugar penghasilannya banyak merasa tidak perlu proteksi ini tapi ini kita harus mengingatkan bahwa *accident* bisa terjadi kapan saja.

Kemudian yang berikutnya saya sepakat dengan teman-teman yang lain ada guru, tenaga pendidik, RT, RW, RT, RW ini di *zoomnya* gampang jalurnya jelas lewat intruksi bisa. Nah ini kan berarti perlu kerja sama di semua sektor untuk peningkatan ini. Saya yakin manakala kepesertaan ini maksimal dan berkesinambungan berkelanjutan maka dana dari BPJS ini akan menjadi semakin baik dan akumulasi dana yang besar ini akan menimbulkan akan menumbuhkan investasi yang jauh lebih besar daripada dana kecil begitu juga nanti Bapak-Bapak bisa berkreaitivitas untuk menambahkan manfaat *coveragenya* manakala ada akumulasi data iuran dana iuran ini yang besar gitu. Nah ini saya dorong sekali untuk apa namanya kepesertaan ini bagaimana

menjadi lebih optimal dan berkelanjutan jadi tidak hanya, tidak hanya pada saat itu kemudian oke iya saya masuk 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan habis itu berhenti jangan sampai seperti itu.

Kemudian yang berikutnya tentang percepatan informasi digital, integrasi data ini harus menjadi perhatian karena data menjadi pondasi awal kita mau bangun apa-apa mau merencanakan apa-apa itu sumbernya dari data. Apa langkah yang dilakukan BPJS Ketenagakerjaan dalam rangka upaya integrasi data ini dan bagaimana proteksinya agar data ini tidak bocor kita kan lagi, lagi latah dengan kebocoran data ini Pak, dimana-mana data bocor, BPJS Kesehatan bocor, Kemenkes bocor, jangan sampai BPJS Ketenagakerjaan juga bocor kasihan nasabahnya.

Mohon dijelaskan juga secara rinci tentang program jaminan kehilangan pekerjaan, ini masa-masa covid banyak orang yang kehilangan pekerjaan jangan sampai mereka yang kehilangan pekerjaan sesungguhnya mempunyai hak manfaat jaminan kehilangan pekerjaan tapi mereka tidak bisa mengakses itu karena mereka tidak tahu atau sengaja disembunyikan oleh oknum tertentu ya agar tidak klaim gitu ini kan ya jangan sampai juga gitu atau ada, ada korporasi atau ada, ada sindikat tertentu yang kemudian mengambil manfaatnya ini, ini jangan sampai juga ini penting ini Pak.

Kemudian yang berikutnya apa saja implementasi *campaign* tentang Inpres Nomor 2 Tahun 2021 yang sudah dilakukan oleh BPJS. Mungkin itu Pimpinan yang bisa saya sampaikan untuk pendalaman ini kurang lebihnya mohon maaf.

*Wallahul Muwafiq Ila Aqwamith Thariq
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

KETUA RAPAT:

Waalaiikumsalam

Terima kasih. Berikutnya Bu Netty nanti bersiap-siap Pak Anas dan Pak Nurhadi, nanti pelan-pelan Pak muter. Silakan Bu Netty.

F-PKS (Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si.):

Iya, terima kasih Pak Ketua.

*Bismillahirrahmanirrahim
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Ibu Bapak Pimpinan dan juga anggota Komisi IX DPR RI yang saya cintai saya banggakan baik yang hadir secara fisik maupun daring dan juga Pak Dirut beserta seluruh jajarannya.

Saya juga ingin mengucapkan selamat tahun 2022 ya semoga BPJS Ketenagakerjaan selalu menghadirkan harapan baru ya bagi seluruh peserta

dan juga masyarakat Indonesia. Sudah banyak sebetulnya yang disampaikan oleh teman-teman tadi namun memang ada beberapa hal yang harus terus didalami Pak Dirut agar kinerja BPJS Ketenagakerjaan ini semakin baik ya karena memang kita meyakini kehadiran BPJS Ketenagakerjaan ini menjadi salah satu instrumen yang dibentuk oleh negara untuk menghadirkan atau memastikan kesejahteraan ini bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia karena memang amanat konstitusi kita menyebutkan setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak serta jaminan sosial.

Nah oleh karena itu, terkait dengan salah satu pilar yang menentukan keberhasilan BPJS Ketenagakerjaan, saya ingin menyoroti sama halnya dengan teman-teman yang lain tentang bagaimana strategi perluasan kepesertaan jadi kalau kita lihat dari paparan Pak Dirut tadi peserta aktif kita peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan ini mencapai 30.660.901 pekerja ya padahal kita melihat ya dari berbagai catatan angkatan kerja kita itu lebih dari 139 juta kemudian juga usia produktifnya lebih dari 190 juta.

Nah kira-kira bagaimana ya strategi akan dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk meningkatkan peserta aktif ya peserta aktif ini tentu banyak sekali faktornya ya Pak Dirut ya sehingga saya ingin kita punya *roadmap* begitu karena salah satu yang sudah kita lakukan di daerah pemilihan ya tentu saja kita mengapresiasi jika BPJS Ketenagakerjaan ini terus membangun sebuah skema kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan agar bukan hanya kita menunggu perusahaan atau orang mendaftar tapi memang kita melakukan sebuah strategi proaktif jemput bola sehingga semakin banyak peserta BPJS Ketenagakerjaan ini dari sektor yang informal ya sektor yang hari ini *unreachable* begitu ya dan bahkan kalau kita mau kerucutkan lagi ada segmen petani nelayan yang hari ini menjadi kelompok paling rentan dan bahkan mungkin terpinggirkan ya. Nah itu yang pertama.

Kemudian yang kedua terkait dengan Inpres Nomor 2 Tahun 2021 yang sudah berjalan 10 bulan ya saya pikir ini juga perlu dioptimalkan Pak Dirut ya kenapa? Karena ini salah satu cara salah satu bentuk regulasi yang “memaksa” ya seluruh pemangku kepentingan kementerian lembaga bahkan pemerintah daerah untuk bisa menjalankan inpres ini ya. Nah kira-kira apa yang hari ini menjadi tantangan ya untuk bisa mengimplementasikan Inpres Nomor 2 Tahun 2021 secara optimal.

Yang ketiga masih dalam konteks kepesertaan Pak Dirut, kalau kita bicara tentang pengawasan dan penegakan hukum yang kemudian ditugaskan kepada jaksa agung dan Menteri Ketenagakerjaan saya pikir kita juga perlu ya mendorong ya pengawas ketenagakerjaan ini agar bisa secara maksimal meningkatkan kepesertaan dari perusahaan-perusahaan yang tadi disebutkan oleh teman-teman “nakal ya” begitu tidak mendaftarkan pekerjanya jadi kalau kita kemudian memiliki diksi perusahaan daftar sebagian ini ternyata banyak sekali Pak Dirut dan bahkan mungkin mereka bersembunyi di balik pandemi jadi menjadikan pandemi sebagai alasan untuk melakukan PHK kepada para pekerjanya. Nah tentu ini juga harus mulai dijadikan salah satu peluang untuk

menambah kepesertaan aktif kita ya termasuk di apa namanya di DPR ini juga mungkin banyak, banyak sekali Pak Ketua ya Ibu Pimpinan yang juga perlu diadvokasi seperti itu.

Nah yang berikutnya kalau kemudian kita bicara tentang salah satu manfaat yang di akan diperoleh oleh peserta yaitu jaminan hari tua ini nampaknya ada beberapa regulasi atau kemudian persyaratan Pak Dirut yang perlu dievaluasi ya kenapa? Karena ternyata banyak peserta yang kesulitan untuk mengklaim dana JHT ya salah satunya karena tidak diberikan surat keterangan kerja oleh perusahaan ya pada saat PHK itu dilakukan ya. Nah memang ada perusahaan yang sengaja tidak memberikan surat keterangan kerja sehingga mempersulit ya pekerjanya mencairkan dana JHTnya. Nah oleh karena itu, ini yang menjadi salah satu catatan saya dan teman-teman ya.

Berikutnya ini mungkin juga salah satu aspirasi ya yang disampaikan kalau kita melihat bahwa program jaminan sosial ini meliputi JKK, JKM, JHT, pensiun, dan juga kehilangan pekerjaan ini mungkin aspirasi ya Pak Dirut ya kalau non ASN ini sampai hari ini masih dua program begitu ya. Nah mudah-mudahan ke depan ya ini juga bisa didorong dengan komunikasi yang baik dengan setiap pemangku kepentingan agar manfaat ini bisa di, ditingkatkan ya bukan hanya jaminan kematian dan juga jaminan kecelakaan kerja tapi juga mudah-mudahan ya bisa ditambah dengan jaminan hari tua.

Nah yang ingin juga saya sampaikan adalah bagaimana strategi kita ini juga sering saya sampaikan ke direktur kepesertaan ini bahwa ternyata BPS mencatat ada 78,14 juta ya warga kita yang memang menekuni pekerjaan sektor informal nah ini lagi-lagi bagaimana kemudian kita bisa meningkatkan skema kolaborasi jadi kalau di paparan Pak Dirut tadi di halaman 4 ya meskipun belum terlalu menggembirakan tapi ada nampaknya ada kenaikan seperti itu nah ini mungkin juga perlu ada kajian Pak Jay ya apasih sebetulnya yang menjadi faktor peningkatan kepesertaan ini ya kalau memang itu ternyata sangat apa namanya sangat strategis ya tentu itu yang harus kita perbanyak termasuk ya kalau saya perhatikan kita juga perlu ya me, melibatkan seperti misalnya kalau pembatik ya pengusaha batiknya ya, kalau apa produk-produk makanan lokal berarti para penadahnya ya memang punya gerai punya tokonya seperti itu.

Nah terakhir saya ingin mencermati dari paparan Pak Dirut ini ya kalau saya lihat dari depan sampai belakang ini ada angka-angka yang melampaui target ya melampaui target seperti itu lebih dari 100% ya di halaman 7 misalnya kemudian juga di halaman 8, halaman 9 kinerja badan dan sebagainya ini menurut saya sama seperti tadi yang sampaikan oleh Bu Irma tentu saja jangan menjadi *pseudo happiness* begitu ya menjadi sebuah kebahagiaan yang semu kenapa? Karena PR kita masih sangat banyak ya jadi artinya jangan berpuas karena pekerjaan rentan yang tadi saya sebutkan ya tentu saja ini menjadi PR Pak Dirut beserta seluruh jajaran dan tentu saja dengan kolaborasi kita semua ya.

Terakhir saya ingin memberi catatan ini Pak Dirut tentang percepatan transformasi digital dan penguatan teknologi informasi, ini satu hal yang

memang tidak terhindarkan di era disrupsi tapi tentu saja pada kawasan-kawasan tertentu ya kita juga sudah mendapatkan berbagai informasi bahwa dukungan jaringan, signal ini juga sangat menentukan. Kemarin pekerja rumah tangga saya coba aplikasi JEMO Pak Dirut berhasil gitu dan bahkan harus berulang-ulang begitu ya. Nah tentu ini juga menjadi salah satu yang patut dievaluasi diawal 2022 ini.

Nerikutnya yang juga menjadi harapan saya di Februari ini menjadi bulan K3 pada manusia ini menjadi momentum yang sangat strategis ya bagi BPJS Ketenagakerjaan untuk terus memperbaiki apa *company branding* ya *branding* di tengah masyarakat karena berkali-kali kita turun ke masyarakat sebagaimana yang kemarin saya sampaikan di BPJS Kesehatan jika kita menyebut BPJS maka yang di kepala masyarakat BPJS Kesehatan jadi memang belum terlalu populer BPJS Ketenagakerjaan ini padahal manfaatnya luar biasa.

Terakhir pertanyaan kecil saja Pak Dirut ini ada satu hal yang saya belum, belum paham mungkin tadi pas dijelaskan saya belum datang ke ruangan ini. Di *slide* ke keempat di halaman 4 penambahan peserta baru sampai dengan Desember 2021 sebesar 19 juta sekian atau 106% dari target 2021 dan naik 13% dibanding tahun 2021 ini mohon dijelaskan. Itu saja mungkin Pimpinan terima kasih.

*Billahi Taufiq Wal Hidayah
Wallahul Muwafiq Ila Aqwamith Thariq
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih, Bu Netty.

Berikutnya Pak Anas Thahir, Pak Nurhadi, Bu Meliyana, nanti Bu Arzeti, dan Pak Kahfi. Silakan Pak Anas.

F-PPP (SY. ANAS THAHIR):

Makasih.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

**Pimpinan yang saya hormati,
Pak Dirut BPJS Ketenagakerjaan dan seluruh jajaran yang terhormat,
Rekan-rekan anggota Komisi IX yang juga saya hormati.**

Ada 2 program baru BPJS Ketenagakerjaan yang ingin saya tanyakan. Yang pertama program kredit kepemilikan rumah karena program ini di samping baru juga memang menurut saya sangat menarik dan setiap kali kita informasikan kepada masyarakat mereka sangat antusias cuma biasanya program-program yang kelewat menarik itu manis di program pahit di lapangan Pak. Saya ingin tanyakan progres dan perjalanan di lapangan seperti apa

apakah ditemui kendala-kendala teknis misalnya kesulitan masyarakat untuk memenuhi persyaratan-persyaratan administratif karena disinikan melibatkan bank eksekutor BTN jika kesulitan-kesulitan masyarakat ini tidak kita lakukan pendampingan berupa kemudahan-kemudahan kita khawatir di ujung tahun nanti program ini serapannya juga rendah, ini yang pertama.

Yang kedua program beasiswa Pak, saya mohon penjelasannya strateginya karena beasiswa baik untuk SD, SMP, SMA, bahkan untuk mahasiswa ini secara masif sudah digelontorkan oleh pemerintah melalui Disdikbud, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Agama bahkan LPDP lalu sasarannya ini siapa apakah masih cukup menarik bagi para pekerja untuk memanfaatkan program ini dimana semua orang sedang berbondong-bondong memanfaatkan beasiswa yang sedang digelontorkan oleh pemerintah, anggota DPR yang Komisi X satu orang saja secara cuma-cuma memberikan lebih dari 25.000 beasiswa 25 orang tiap tahun,

Yang ketiga saya ingin menguatkan apa yang disampaikan Bu Netty tadi soal sosialisasi, saya kemarin akhir tahun keliling ke dapil melakukan sosialisasi soal program BPJS Ketenagakerjaan sebagian besar masyarakat di dapil saya itu yang mengenal BPJS Ketenagakerjaan itu jauh lebih kecil dibandingkan yang mengenal BPJS Kesehatan bahkan hampir semua yang mereka kenal cuma BPJS Kesehatan karenanya saya usul agar sosialisasi program BPJS Ketenagakerjaan yang menarik dan memberi manfaat kepada masyarakat ini untuk dilakukan peningkatan sosialisasi dengan strategi yang lebih baik dengan volume kegiatan yang lebih banyak dan dengan pendekatan-pendekatan yang lebih bisa dipahami oleh masyarakat. Saya kira itu saja. Terima kasih dan.

*Wallahul Muwafiq Ila Aqwamith Thariq
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam

Pak Anas, karena Pak Anas ni satu dapil sama Bu Nihayatul Wafiroh ini mewakili dua, dua pendapat berarti Banyuwangi butuh tambahan sosialisasi ini.

Berikutnya kami persilakan Nurhadi nanti bersiap-siap Ibu Meliyana, Bu Arzeti, dan Pak Kahfi.

F-P. NASDEM (NURHADI, S.Pd.):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

**Yang saya hormati Pimpinan dan anggota Komisi IX,
Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan beserta jajaran.**

Langsung saja yang pertama terkait pemaparan kepesertaan pekerja bukan penerima upah mengalami kenaikan di tahun 2021 kemarin, yang ingin saya tanyakan adalah di sini belum ada keterangan secara detailnya supaya kami tahu Bapak apakah guru honorer ini juga sudah termasuk persentase kepesertaannya berapa, kemudian guru ngaji, ojol di tiap kabupaten dan kota supaya kami bisa tahu bagaimana kondisi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di daerah kami masing-masing. Apakah perluasan kepesertaan untuk menjangkau guru ngaji, ojek online, dan lain sebagainya ini sudah bisa terealisasi dan sudah berapa banyak yang bergabung menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan ini kami minta data konkretnya.

Kemudian yang kedua terkait klaim JHT di sini *alhamdulillah* dipaparkan terlihat progres positif dikatakan bahwa *success red* klaim JHT terus mengalami peningkatan, yang ingin saya tahu yang mengklaim memang pekerja yang sudah memasuki hari tua atau pekerja yang mengalami PHK jika yang mengklaim kebanyakan pekerja yang mengalami PHK menurut saya ini menjadi tidak sesuai dengan filosofi yang tujuan agar para pekerja yang sudah waktunya pensiun mendapat memiliki hari tua yang lebih terjamin.

Berikutnya terkait pemaparan perlindungan pekerja rentan yang dipresentasikan tadi tampilkan hanya yang baik-baik saja saya mohon juga daerah yang di sini yang belum baik mohon disampaikan kendalanya apa agar kami bisa bantu di dapil kami masing-masing Bapak.

Yang terakhir kalau melihat dari hasil investasi yang didapatkan sebesar *alhamdulillah* sekitar 35,36 triliun ini menjadi tidak adil kalau saya melihat di PP 55 Tahun 2015 di situ tentang perubahan PP Nomor 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ketika CSR atau dalam BPJS Ketenagakerjaan ini bahasanya adalah TJSJ ya Tanggung Jawab Sosial Lingkungan itu hanya 1% saya kok nggak melihat ya kearifan sosial yang dimiliki oleh BPJS Ketenagakerjaan ketika Gunung Semeru meletus saya waktu itu saya turun ke Gunung Semeru itu BPJS Ketenagakerjaan tidak ada di sana tidak ada tampil di sana untuk membantu masyarakat di sana dimana BUMN yang lain berlomba-lomba membantu masyarakat di sana saya kira PP 55 Tahun 2015 ini perlu didorong Bapak untuk direvisi dirubah mungkin 10 sampai 15% begitu bisa dialokasikan untuk kegiatan TJSJ Tanggung Jawab Sosial Lingkungan atau CSR.

Di sisi lain dari keuntungan 35,36 triliun itu saya ingin tahu *surplusnya* berapa, *surplusnya* berapa yang akhirnya tadi kalau diusulkan oleh Pak Kamto bahwa untuk penguatan program sosialisasi ke kabupaten dan kota itu selama ini kami merasa sangat minim sekali ini nah saya ingin keterbukaan dari BPJS Ketenagakerjaan selain terkait dengan Tjsl tadi juga dengan keterkaitan program. Saya kira ini mohon diperhatikan ada peningkatan kearifan sosial yang dimiliki oleh BPJS Ketenagakerjaan. Terima kasih Pimpinan.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih Pak Nurhadi.

Mengingatkan kita semua khususnya BPJS TK. Berikutnya Ibu Meliyana, bersiap-siap Ibu Arzeti dan Pak Kahfi nanti.

F-P. GERINDRA (Ir. SRI MELIYANA):

Terima kasih, Ketua ini karena ngomongnya miring jadi agak, agak miring.

KETUA RAPAT:

Agak miring apanya nih Bu Meli?

F-P. GERINDRA (Ir. SRI MELIYANA):

Pandangannya Pak Direktur langsung kelihatan. Terima kasih Ketua.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Para Pimpinan dan anggota Komisi IX yang saya cintai dan banggakan, Pak Direktur Dirut BPJS Ketenagakerjaan beserta jajaran yang saya hormati.

Senang sekali, selamat tahun baru Pak semoga sukses di tahun ini dan minimal tahun ini kita menyelesaikan keluhan tahun kemarin Pak banyak keluhan di, di, di ruang rapat kita ini tahun kemarin semoga jadi catatan banyak buat Bapak-Bapak dan Ibu untuk kita selesaikan tahun ini.

Sebelum saya memulai yang dari lembaran presentasi saya memperkuat testimoni teman-teman Pak tentang betapa pentingnya sosialisasi sama di dapil saya juga mereka tidak tahu bahwa dengan Rp 16.800 sebulan seseorang itu sudah ada jaminan kematian kalau uangnya jaminan itu menjadi uang saya gambarkan kepada mereka seperti mereka memberi warisan kepada keluarganya itu 44 juta ya Pak ya? 42 juta ya? Di tempat saya tuh dapat-dapat kavling Pak harga 42 juta tuh udah dapat kavling. Saya bilang sama pedagang sayur mau nggak kamu mewariskan kavling untuk keturunan mu hanya dengan membayar Rp 16.800 dan nggak pakai diapa-apain mendaftar Pak karena 3 bulan kadaluarsa saya lihat di sosmed mereka hari ini saling mengingatkan bayar Rp 16.800 supaya kita bisa kasih warisan kepada anggota keluarga kita, keren Pak luar biasa. Nah kami harapkan ini bisa di, di, dia masifkan Pak dimasifkan karena udah kami buktikan bahwa itu sangat membantu sosialisasi itu.

Kemudian kalau saya lihat pada paparan di sini yang ada peta Indonesiannya nih loh Pak perlindungan pekerja rentan, pekerja rentan tua tuh aneka rupa ada suku anak dalam, ada penderes kelapa, ada, ada nelayan, dan macam-macam darimana mereka tahu Pak kalau kita tidak sosialisasikan,

darimana apa cukup cuap-cuap eh Pak Bupati di sana banyak anak dalam tolong dong atau begitu aja. Saya rasa sosialisasi menjadi kunci yang Bapak tuliskan di peta ini betapa pangsa pasar yang sangat besar ini perlu kita sosialisasikan kebutuhan Rp 16.800 tiap hari menangkap ikan saya rasa nelayan bisa menjadi peserta nah sehingga yang tadi diceritakan kawan-kawan tentang perlu masif sosialisasi itu menjadi senjata baru Pak senjata terbaru dari BPJS Tenaga Kerja. Kami semua bisa menolong di dapil kami masing-masing dan saya buktikan dengan medsos yang saya baca hari ini saling mengingatkan bahwa 3 bulan gratis berakhir segera jangan sampai kita lupa dan lain-lain jadi ini program ketika orang tahu maka orang mau, tak kenal maka tak sayang Pak, sekali kenal *Insyah Allah sayang*. Itu tentang sosialisasi.

Kemudian dari bahan paparan Bapak saya longkap dulu ke halaman 8 Pak pada tingkat kesehatan keuangan sesuai PMK Rasio Likuiditas JHT 50.000%, JKK 536, JP 46.000, JKM 82 yang mana yang sehat ini Pak? Yang ribuan itu yang mana yang mana yang mengkhawatirkan? Kenapa mengkhawatirkan. Bapak cuma tulis tingkat kesehatannya aja tapi kami tidak bisa membaca tolong dijelaskan ke kami apakah yang ribuan persen kalau kalau sekali lintas yang ribuan persen itu aman tapi yang tinggal 82,27% itu sejauh mana dia mengkhawatirkan.

Kemudian pada halaman 6 Pak tentang, tentang dana operasional ya Pak ya, bentar Pak, untuk slide 6 ini halaman 6 ini disampaikan realisasinya tahun 2022 4,23 triliun, kemudian tahun 2021 4,11 triliun itu untuk operasional. Melihat realisasi tersebut cukup tinggi tapi kurang tinggi tingkat pertumbuhan yang disampaikan di slide 4 baik dari sektor PU, BPU, dan jasa konstruksi. Sesungguhnya Pak, kemana saja penggunaan dana ini baik tahun 2020 maupun 2021 dan bagaimana hubungannya dengan pertumbuhan kepesertaan aktif, berapa persen sesungguhnya alokasi ini dana ini yang digunakan untuk program pertumbuhan kepesertaan. Kemudian masih terkait hal yang sama, kalau dana ini sisa larinya kemana ya Pak? menjadi aset kah atau, atau sebagai dana tidak terserap biasa atau ke tempat yang lainnya. Itu tentang yang slide 6.

Kemudian Pak dengan keluarnya Undang-Undang Cipta Kerja dengan turunannya PP 35 Tahun 2021 tentang PKWT, Alih Daya, dan PHK, pemerintah membuka peluang status pekerja menjadi pekerja kontrak di seluruh bidang pekerjaan. Selama ini untuk pekerja kontrak perlindungan jamsos yang wajib diberikan hanyalah jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, artinya kalau bisa di, di apa status itu berganti akan ada penurunan target pertumbuhan iuran dari JHT dan JP karena yang wajib cuma JKK dan JKM kalau seandainya itu turun Pak sejauh mana BPJS menyikapi dan terobosan apa yang akan dilakukan untuk menghindari hal tersebut seandainya ini terjadi kalau, kalau tapi tetap saja menjadi badan terdahulu yang mengantisipasi perubahan status pekerja ini nanti. Itu dulu Ketua. Terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam

Istilahnya menarik tadi ya membeli warisan. Berikutnya kami persilakan kepada Ibu Arzeti, berikutnya Pak Kahfi, dan terakhir Ibu Kurniasih.

F-PKB (ARZETI BILBINA, S.E., M.A.P.):

Terima kasih, Pimpinan.

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

**Yang saya hormati Pimpinan beserta sahabat-sahabat anggota Komisi IX yang sangat saya banggakan,
Yang saya hormati Bapak Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan beserta jajaran.**

Pertama-tama selamat tahun baru Pak, semoga BPJS kedepannya menjadi lebih baik lagi dan berbahasanya adalah lebih kepada kepentingan masyarakat kita.

Saya ingin melanjutkan tadi bahasa yang disampaikan oleh Yuk Meliya dengan Ibu Meli, Rp 16.800 saya sangat mengapresiasi kinerja yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan khususnya dapil saya Surabaya Sidoarjo karena di tahun 2021 kemarin kami berkeliling Pak saya menjadi bagian ikut mempertemukan keluarga saya baik itu dari pekerja buruh, rentan atau pekerja keliling yang memang mereka notabene adalah penjual bakso atau gerobak yang memang notabene mereka per harinya pun mereka belum tahu dapat berapa tapi dengan sosialisasi yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan *alhamdulillah* keluarga saya semuanya sekarang di Surabaya Sidoarjo sudah menjadi bagian dalam kepesertaan BPJS mereka diundang hadir kemudian kehadiran mereka diberikan 1 bulan untuk apa kepesertaan mereka sebagai anggota dari BPJS Ketenagakerjaan. Terima kasih untuk apresiasi yang dilakukan apa apresiasi yang saya berikan untuk BPJS Ketenagakerjaan khususnya Dapil saya Surabaya Sidoarjo.

Nah yang saya ingin tanyakan melanjutkan lagi mungkin dari Meli yang slide 6, di sini BPJS menyatakan bahwa realisasi *fresh fund* 2021 itu sebesar 32,12 triliun, ini artinya turun 4,3% dari periode Januari-Desember 2022 karena adanya peningkatan beban klaim. Artinya kalau kita melihat di sini bahwa dengan adanya pengelolaan investasi yang baik hasil investasi tentunya tetap tumbuh 9,37%.

Nah kalau kita melihat ini pengelolaan yang baik ini seperti apa Pak saya mohon dijelaskan karena kalau saya baca di sini BPJS itu orientasinya lebih kepada mengikuti pasar ya Pak maksudnya penggunaan investasinya tu lebih banyak menggunakan logika investasi pada umumnya padahal kan kita tahu Pak lembaga BPJS ini dibentuk untuk kesejahteraan pekerja yang seharusnya

merekalah yang menjadi prioritas dalam pengelolaan dana jadi artinya bukan keluarga kita hanya menyetor dan kemudian menerima klaim tapi lebih kepada bagaimana pendalaman penggunaan dana BPJS yang perlu mereka juga harus dijadikan prioritas.

Karena kita melihat di sini dari Pasal 33 Undang-Undang BPJS dikatakan bahwa BPJS bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan, terpenuhinya kebutuhan dasar hidup bagi para pekerja kita, artinya di sini dikatakan bahwa tolak ukur keberhasilan pengelolaan dana anggota BPJS itu bukan hanya sekedar angka uang yang dihasilkan dari investasi tetapi bagaimana dampak pengelolaan investasi itu pada kondisi pekerja kita pada saat ini, karena kita tahu bekerja kita atau buruh apalagi adanya pandemi ini ya hidup mereka sangat di bawah standar kelayakan sehingga kalau kita melihat dari standar hidup dari keluarga atau masyarakat atau buruh pekerja kita ini bahwa program yang dilakukan BPJS boleh dikatakan belum berhasil ya artinya sekali lagi kami ingin mengingatkan bersama-sama bahwa BPJS bukan lembaga investasi biasa tetapi lembaga ini didirikan untuk kesejahteraan buruh.

Dan melanjutkan Pak Ramson tadi, kami berterima kasih tetapi di sini ada momen-momen dimana setiap dapil itu memiliki irama yang berbeda, di dapil saya khususnya saya punya ibu-ibu sepuh yang memang notabene mereka juga harus dilibatkan, diingatkan, diberikan sosialisasi BPJS karena mereka juga punya keturunan tetapi pada saat acara sosialisasi itu jangan dipersulit merekanya pada saat tadi dikatakan harus ada yang dibuka kemudian di foto itu rasanya kok nggak tega banget udah sepuh-sepuh kok diperlakukan seperti itu. Mohon kami minta kepada BPJS TK untuk bisa berkolaborasi yang baik dengan anggota yang ada yang memiliki dapil masing-masing yang tentunya punya irama yang berbeda setiap dapilnya. Itu yang ingin saya sampaikan.

Dan melanjutkan kembali pengen tanya target 2022 terkait kepesertaan pekerja di sektor ini agar mendapatkan perlindungan karena tadi kita sudah membahasakan adalah mereka adalah merupakan pekerja rentan saya ingin tahu ini seperti apa dan juga pertanyaan saya adalah BPJS sekarang punya kepanjangan tangan yang namanya Agen Perisai, Agen Perisai. Nah kalau kita melihat kepanjangan tangan Agen Perisai untuk BPJS ini untuk melakukan akuisisi pekerja yang belum terdaftar pada sektor formal ataupun informal dan juga melakukan sosialisasi terkait manfaat program BPJS Ketenagakerjaan. Nah kalau kita melihat ini boleh diinfokan kepada kami sudah berapa efektifkah keberadaan Agen Perisai ini terhadap kinerja BPJS di tahun 2021.

Satu lagi saja, satu lagi, saya minta untuk yang di *slide 9*, *slide 9* di sini pengen tahu indikatornya itu apa saja Pak mohon diinfokan ke kami, baik mungkin itu dulu banyak dari sahabat-sahabat anggota yang ingin pendalaman selanjutnya. Terima kasih, Pimpinan.

*Wallahul Muwafiq Ila Aqwamith Thariq
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam

Kita sudah sampai jam 12 kita perpanjang dulu kita perpanjang sampai 12.30 jadi setelah selesai pertanyaan kita langsung istirahat dulu ya biar makan siang dan sholat, nanti habis itu baru kita sambung lagi di jawaban dari Pak Dirut biar juga sekaligus bisa konsiderasi dengan semua direksi merespon semua pertanyaan. Untuk itu kita selesaikan dulu yang sisa biar paling lama 12.30.

(RAPAT: SETUJU)

Saya persilakan kepada Pak Kahfi dan kemudian Ibu Kurniasih, oh sama Pak Sungkono silakan terakhir ya.

F-PAN (Drs. H. ASHABUL KAHFI, M.Ag.):

Makasih, Pimpinan.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

**Bapak Direktur BPJS dan jajarannya yang saya hormati,
Pimpinan dan anggota yang saya muliakan.**

Saya cuman dua pertanyaan mungkin ini karena teman-teman tadi sudah menanyakan sebagian besar yang terkait dengan substansi dengan pelayanan BPJS TK ini.

Yang pertama begini Pak dari informasi yang saya dapatkan bahwa dalam waktu dekat realisasi JKP itu sudah mau di (1:55:57) sudah mau jalan gitu ya, saya ingin agar mungkin segera dilakukan sosialisasi karena jangan sampai mereka-mereka yang terdampak JKP ini pemahamannya bahwa akan langsung menerima tunjangan gitu padahal itu kan ada beberapa persyaratan yang mereka harus dilalui.

Contoh yang menerima JKP itu antara lain menjadi peserta BPJS Kesehatan terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan gitukan. Sama kemarin yang bisa mendapatkan BSU itu kan juga yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan sehingga banyak mereka yang menganggap di PHP sebenarnya nggak di PHP, mereka nggak dapat informasi. Nah tolong ini mungkin perlu sosialisasi.

Nah manalagi perusahaan-perusahaan besar yang nakal yang seharusnya mendaftarkan 4 program sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan JKP tapi mereka hanya mendaftarkan 3 program sehingga mereka tidak bisa mendapatkan JKP. Nah saya kira ini perlu sosialisasi dan sekaligus pengawasan Pak. Itu poin pertama sehingga JKP ini betul-betul bisa berjalan dengan lancar.

Nah yang kedua saya hanya ilustrasi begini Pak, saya nggak tahu berapa cadangan dana Bapak yang diinvestasikan dalam waktu jangka panjang dan dalam waktu jangka pendek itukan. Nah ketika tiba-tiba terjadi sesuatu kejadian yang luar biasa gitukan, kemudian terjadi klaim juga yang sangat luar biasa, kemudian investasi Bapak ini dilakukan investasi jangka panjang gitukan, itukan tentu akan mempengaruhi investasi jangka pendek Bapak dan tentu akan mempengaruhi dana cadangan Bapak untuk membayar klaim gitu kan. Nah ini seperti apa menurut Bapak tolong digambarkan kepada kami presentasinya itu Pak, karena saya lihat di halaman 8 jelas sekali di situ bahwa rasio kewajiban lancar lebih besar dibanding aset lancar jadi ya klaim pembayaran cukup lancar dan lebih besar jumlah klaimnya tetapi akhirnya lebih kecil berarti akan mempengaruhi dana cadangan. Tolong dijelaskan kepada kami.

Kemudian yang ketiga ini terkait pelayanan Pak, mudah-mudahan saya salah. Saya lihat di kurva, di kurva di atas itu menunjukkan terjadi penurunan klaim online terjadi penurunan klaim online dan peningkatan klaim offside ini artinya klaim online telah gagal gitukan memberikan pelayanan kepada masyarakat yang melakukan klaim karena ternyata klaim offside lebih, lebih tinggi gitukan, itu saya baca di kurva, apa saya yang salah baca atau gimana tapi sepertinya kayak gitu. Nah olehnya itu, tolong dijelaskan ke kami kenapa ini terjadi dan kendala-kendala apa saja yang dialami oleh BPJS TK sehingga klaim online ini menjadi menurun dan justru terjadi peningkatan klaim melalui offside. Saya kira hanya 3 pertanyaan itu Pak yang saya ingin sampaikan.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih Pak Kahfi. Dari virtual ada yang nanti akan bertanya Bu Dewi dan Bu Ruskati, kami persilakan dulu Pak Sungkono biar nanti Bu Ruskati yang terakhir ya ini canggih. Silakan Pak Sungkono nanti bersiap-siap Bu Ruskati dan Bu Dewi Asmara dari virtual.

F-PAN (H. SUNGKONO):

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Salam sehat kepada kita semua

**Yang kami hormati Pimpinan dan seluruh anggota Komisi IX,
Yang kami hormati Pak Dirut BPJS Tenaga Kerja.**

Saya cuman sedikit Pak mengenai investasi, dana investasi Bapak cukup, cukup menjanjikan Pak ya dengan aspek keuntungan yang sudah menunjukkan positif ya. Cuman saya tidak tahu sasaran investasi Bapak ini bisa menumbuhkan sektor riil di UMKM apa tidak, kalau Bapak hanya cari aman mungkin perusahaan-perusahaan besar yang menurut Bapak bisa kerja sama itu tapi bagi kami berharap investasi Bapak ini harus berpihak pada pertumbuhan ekonomi mikro terutama dari perusahaan-perusahaan kecil yang punya apa kredibilitas dan akuntabilitas yang bagus Bapak harus tertarik ke sana Pak karena pertumbuhan itu kan dari bawah Pak bukan dari atas ya.

Jadi saya berharap ini dana-dana yang bisa mengangkat di saat pandemi ini saya maklum investasi kan butuh aman ya jangan sampai terjadi investasi besar-besaran ke perusahaan terbatas kalau hilang, hilang semua Pak kayak kemarin ya Asabri dan termasuk Jiwasraya ya kalau ini penanaman Bapak itu dengan apa ya jumlah, jumlah lokus yang banyak kemungkinan lebih aman Pak memang kerja keras cari apa ya badan-badan usaha yang orientasi bisnis yang matang gitu. Jadi saya mohon ini karena saya tidak yakin kalau Bapak bisa mengangkat keuntungannya ganda Pak dapat pertumbuhan ekonomi bisa mengangkat derajat rakyat yang terbawah itu.

Dan kedua sektor *market*-nya mungkin untuk memperkenalkan BPJS Ketenagakerjaan ini kami selalu menjanjikan karena tidak ada pilihan bagi rakyat kecil kalau ada impian seperti ini saya rasa dengan membayar Rp16.000 samapi Rp 17.000 itu hal yang apa yang apa ya pasti menarik gitu.

Kami waktu di komisi ini kan belum lama tapi saya selalu sampaikan kami sebagai marketing Bapak saya membantu sebagai mitra tidak ada justru itu yang saya bangkitkan semangatnya yang dulu orang tidak mengenal asuransi yang namanya tahunya askes, askes gitu aja yang orientasi kesehatan sekarang kan sudah mulai bisa menerima persoalan jaminan masa depan termasuk didalamnya asuransi ketenagakerjaan ini. Barangkali itu yang penting.

Dan kedua saya dari aspek kewajiban saya mohon persoalan klaim ini namanya orang Indonesia asuransi ini baik di muka waktu promo waktu sosialisasi tu terutama asuransi swasta itu banyak masalah setelah jadi ada terjadi klaim itu agak sulit banyak permasalahan tapi kami percaya ini apa yang pemerintah yang *membackup* saya rasa berikanlah kemudahan dalam rangka setiap terjadi klaim. Barang itu aja, makasih.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Baik, kita ke virtual dulu ya sebelum nanti ke yang fisik. Kami persilakan berturut-turut nanti Ibu Ruskati, Bu Dewi Asmara, dan Pak Rahmad Handoyo. Silakan Bu Ruskati. Bu Ruskati? Kalau masih ada gangguan komunikasi, kami persilakan ke Bu Dewi Asmara dan Pak Rahmad dulu baru ke Bu Ruskati. Silakan Bu Dewi.

F-P. GOLKAR (Hj. DEWI ASMARA, S.H.,M.H.):

Oke, ya. Terima kasih.

Pimpinan dan segenap teman-teman Komisi IX juga terutama untuk Direksi BPJS Tenaga Kerja.

Bisa saya lanjutkan?

KETUA RAPAT:

Silakan Bu Dewi lanjut.

F-P. GOLKAR (Hj. DEWI ASMARA, S.H.,M.H.):

Iya, lanjut.

Yang pertama ya saya lakukan pendalaman. Keluarnya Undang-Undang Cipta Kerja ini kan memberikan kemudahan untuk masuknya investor asing ke Indonesia dengan membawa pekerjaannya, nah dengan membawa serta pekerjaan melalui proyek-proyek strategis nasional yang diatur dalam Perpres Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Perpres Nomor 3 Tahun 2016 mengenai Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional tentunya ini ada 10 program dimana terdapat 201 proyek untuk PSN Proyek Strategis Nasional.

Nah ini tentunya bisa menjadi peluang pemerintah dalam hal ini BPJS Ketenagakerjaan untuk meningkatkan iuran terutama kepesertaan pekerja asing yang bekerja lebih dari 6 bulan atau paling singkat 6 bulan sebagaimana ini diamanatkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial. Pertanyaannya adalah sejauh mana target dan capaian kepesertaan pekerja asing 2 tahun lalu dan berapa proyeksi target di 2022 ini, ini penting karena tentu salah satu penentu keberhasilan kinerja BPJS tenaga kerja. Jadi dimana satu sisi pemerintah memudahkan investasi dan program-program strategis nasional tentunya kalau ini ada suatu peluang BPJS harus menangkapnya.

Kemudian yang kedua tahun 2022 BKPM itu mengatakan tercatat akan ada 50 perusahaan asing melakukan relokasi usahanya ke Indonesia nah tentunya beberapa program investasi proyek strategis yang lain kalau saya tidak salah akan ada 80 program proyek strategis. Ini kan juga memberikan peluang penambahan peserta baik itu yang asing maupun yang non asing. Nah apakah BPJS Tenaga Kerja mengetahui hal ini, artinya selalu berkoordinasi juga dengan BKPM. Nah kalau memang memiliki kejelian apa saja yang akan dilakukan dan terjadi kedepan tentu seharusnya sudah membuat juga *planning-planning* yang diselaraskan antara program investasi dan percepatan-investasi yang dilakukan oleh BKPM tentu ini kan akan linier juga dengan pertumbuhan tenaga kerja. Nah bagaimana BPJS Tenaga Kerja menghadapi data dari Kementerian Investasi tersebut, berapa target dan proyeksi capaian yang dapat diraih pada tahun 2022.

Ketiga dalam menyelenggarakan program jaminan sosial BPJS ini kan memiliki dana operasional sebagaimana diketahui dana operasional ini kan sebesar 3% ya kalau saya tidak salah berdasarkan Permenkeu Nomor 218 PMK 02 Tahun 2021 sebesar 3% yaitu sekitar 4,52 triliun. Pertanyaannya dana 4,52 T tersebut berapa persen yang dialokasikan untuk membiayai operasional dan berapa persen yang dialokasikan untuk membiayai program agar program-program BPJS ini menjadi menarik khususnya bagi mereka-mereka yang pekerja bukan penerima upah.

Mengapa saya katakan demikian karena biasanya kalau yang pekerja penerima upah selain di BPJS mereka terkadang mempunyai asuransi-asuransi sendiri yang lain tetapi yang bukan pekerja upah yang ingin kita raih ya misalnya itu pedagang-pedagang atau masyarakat yang memiliki usaha-usaha kecil-kecilan yang kita coba raih mereka tentunya akan semakin tertarik seandainya memang BPJS ini memiliki program yang menarik dan mohon disampaikan besaran dana yang dialokasikan untuk peningkatan kepesertaan dan bagaimana capaiannya dalam 3 tahun terakhir karena kan tentu ada upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kepesertaan ini.

Pertanyaan keempat, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 72 Tahun 2019 ya tentang BPJS dan Putusan Nomor 91 Tahun 2020 tentang Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar. Memang kedua keputusan ini sedikit menimbulkan permasalahan di lapangan berkaitan dengan peserta ASN ya dimana MK menetapkan Taspen sebagai penyelenggara sosial pada lingkup ASN namun di lapangan Taspen justru sebagai menggunakan putusan MK itu menjadi acuan seluruh pegawai yang bekerja pada instansi pemerintah baik itu ASN maupun non ASN didaftarkan di Taspen.

Sementara Inpres Nomor 2 Tahun 2021 tentang optimalisasi Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan justru mengamanatkan pemerintah termasuk pemda dan BUMN, BUMD mendaftarkan pekerjaan non ASN pada BPJS Ketenagakerjaan. Nah berarti di sini diberikan ya suatu perhatian khusus pada BPJS. Pertanyaannya adalah langkah strategis apa yang sudah dilakukan BPJS untuk mengatasi hal ini karena Inpres ini kan adalah suatu dorongan keseriusan pemerintah dan jadi momen yang tepat untuk meningkatkan kepesertaan BPJS khususnya peserta non ASN dan honorer di lingkungan pemerintah jadi harus cepat-cepat jemput bola.

Nah ini kami menilai Inpres tersebut harus dijadikan acuan dan optimalisasi kepesertaan dengan Inpres Nomor 2 tersebut pendanaannya kan dibebankan pada APBN atau APBD melalui permendagri, Permendagri Nomor 27 Tahun 2021. Nah sejauh mana yang kamu ingin ketahui dukungan anggaran dari pemda, bagaimana BPJS berkoordinasi artinya BPJS-BPJS daerah sejauh mana dukungan anggaran ini dilaksanakan pemda dan bagaimana pekerja informal yang kami tahu sebagian besar sudah juga menjadi anggota seperti marbot masjid, guru ngaji, pengurus gereja, berapa jumlah yang belum merealisasikan APBD atau belum mampu mengalokasikan APBD untuk membayar iuran pekerja informal tersebut. Sebab kemampuan APBD tiap daerah berbeda-beda jadi kami mohon penjelasan sehingga kita bisa *clear*.

Dan yang terakhir untuk *slide 6*, *slide 6* itu disampaikan realisasi DAOPS Tahun 2020 adalah 4,23 triliun, sementara yang diterima adalah 5,27 triliun jadi sekitar 80,2%. Nah sementara tahun 2021 yang direalisasikan dari 4,11 dari 4,66 triliun direalisasikan 4,11 triliun sehingga sekitar 88,1%. Melihat realisasi tersebut maka SDHnya cukup tinggi namun mengapa tidak diikuti pertumbuhan peserta yang tadi disampaikan pada *slide 4* baik itu sektor PU,

BPU, dan juga pertumbuhannya bahkan menunjukkan negatif tahun 2020. Nah hal ini tentunya mohon maaf sangat mengecewakan.

Jadi sesungguhnya kemana saja penggunaan dana operasional tersebut khususnya tahun 2020, mengingat seperti saya katakan tadi pertumbuhannya tuh negatif dan dana operasionalnya saja juga seperti itu artinya realisasinya sebagaimana yang saya sebutkan itu dan tahun khususnya tahun 2020 begitupun tahun 2021 pertumbuhan kepesertaannya aktifnya itu bagaimana. Berapa sih makanya saya tanyakan lagi berapa persen sesungguhnya alokasi dana operasional untuk dipergunakan untuk program pertumbuhan kepesertaan, karena tadi di depan saya sudah uraikan panjang lebar begitu banyaknya kesempatan momen-momen yang bisa dipakai baik itu program strategis nasional, kemudian Inpres, kemudian putusan MK, lalu apa yang dilakukan BPJS apa cuma bisnis *as usual*, terobosannya seperti apa dan dari situ saya ingin tahu berapa persen dana operasional yang dipergunakan untuk program pertumbuhan daripada kepesertaan. Mungkin itu dulu Pimpinan, terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam

Terima kasih, Bu Dewi.

F-P. GERINDRA (Dra. Hj. ANDI RUSKATI ALI BAAL):

Ya, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Bu Ruskati sudah bisa? Ya silakan Bu.

F-P. GERINDRA (Dra. Hj. ANDI RUSKATI ALI BAAL):

Ya, sudah bisa. Ya, ya, terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Ini Bu Jakarta apa di Sulawesi Barat Bu ni Bu?

F-P. GERINDRA (Dra. Hj. ANDI RUSKATI ALI BAAL):

Di Sulbar, Pak.

KETUA RAPAT:

Sulbar, iya, baik Bu silakan.

F-P. GERINDRA (Dra. Hj. ANDI RUSKATI ALI BAAL):

Iya, baik.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Selamat siang

**Yang saya hormati Pimpinan beserta teman-teman anggota Komisi IX yang saya hormati,
Bapak Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan dan semua jajarannya.**

Saya ikut virtual karena masih banyak yang harus saya selesaikan kegiatan-kegiatan yang ada di Sulawesi Barat.

Baik saya melihatnya di sini ada di halaman 3 yang dijelaskan bahwa ada dana investasi iuran kepesertaan, kepesertaan ini dijelaskan bahwa ada realisasi 31 Desember tahun 2021 sebanyak 30.699.000 peserta, ini kami tidak melihat *detailnya* Pak. Pak Dirut kira-kira karena di sini banyak jaminan ada jaminan hari tua, ada jaminan pensiun, ada jaminan kecelakaan, ada jaminan kematian, ini langsung secara keseluruhan dijelaskan bahwa kepesertaannya seperti ini. Apakah bisa kita rinci supaya lebih detail lagi bahwa kepesertaan seperti-seperti ini sudah, sudah berapa yang ikut di jaminan JHTnya, JPnya, JKKnya, JKM dan apalagi di tahun 2022 ada lagi satu namanya JKP ya Jaminan Kehilangan Pekerjaan tapi ini belum masuk karena programnya Pak Dirut nanti di tahun 2022.

Kemudian di klaim jaminan juga sebesar 42,89 triliun tadi Pak Dirut menjelaskan ini hanya apakah memang hanya jaminan kematian karena itu saja yang disebut tadi Pak Dirut bahwa ini jaminan kematian tidak di singgung secara keseluruhan, jaminan yang saya tadi menyampaikan JHT, JP, JKK, dan JKM. Mungkin baiknya Pak Dirut kita bisa menjelaskan rincian-rincian seperti itu supaya jangan hanya saja kumulatifnya saja yang, yang disampaikan di sini kita juga mau mendengarkan penjelasan secara detail seperti ini kepesertaan aktif berapa, klaim jaminannya berapa-berapa seperti itu.

Kemudian yang kedua di halaman 16, ada program kerja unggulan tahun 2022 ini. Saya memberi apresiasi kepada BPJS Ketenagakerjaan ini karena ada satu layanan yang ditambah seperti layanan syariah. Layanan syariah ini sepertinya beda dengan layanan umum Pak Dirut karena kalau namanya syariah itu kayaknya kalau di bank itu ada harus pembagian hasil dan lain sebagainya. Kenapa harus ada syariah ya janganlah dipikirkan tadi sudah menyinggung tentang Aceh, apakah hanya Aceh apa tidak bisa kalau secara umum kitalah ya mengerti yang seperti itu. Apakah memang harus disosialisasikan secara keseluruhan di provinsi dengan daerah karena ini apa perlu memang disampaikan kepada masyarakat yang ada apakah dia mau ikut syariah atau mau masukin.

Kemudian apa keunggulannya kalau layanan syariah dibanding dengan layanan-layanan umum seperti yang sekarang, kita harus tahu secara keseluruhan harus memang disosialisasikan ya kalau perlu di data dulu, di

survei dulu kalau memang layanan syariah ini menguntungkan dibanding dengan layanan umum ya kita pakai seperti itulah.

Kemudian yang ketiga bagaimana dengan pengelolaan asetnya dengan hasil investasinya untuk ke depan karena kan pasti beda namanya layanan investasi dengan syariah, dengan umum juga beda. Jadi sekali lagi barangkali apa perlu di, dipikirkan karena oh umum secara syariah itu sangat-sangat kompleks sekali sangat beda dengan layanan umum. Jadi yang sudah disampaikan tadi bahwa ada penyesuaian *roadmap*nya layanan syariah. Nah ini perlu barangkali dikaji kembali untuk layanan seperti ini, sedangkan layanan umum sekarang belum mencapai target, belum secara keseluruhan.

Tadi teman-teman sudah menyampaikan bahwa di apa orang-orang yang di pegawai pemerintah.

KETUA RAPAT:

Baik, nampaknya mati. Sulawesi Barat memang masih ada banyak gangguan teknologi ini. Baik, kami masuk sekarang kita yang terakhir dari yang di fisik di gedung, kami persilakan 3 yang terakhir Bu (2:19:26) tetap yang terakhir ya, berarti Pak Rahmad Handoyo, Bu Hasnah nanti yang terakhir yang nutup Bu (2:19:31). Silakan Pak Rahmad.

F-PDIP (RAHMAD HANDOYO, S.Pi., M.M.):

Baik.

Bismillahirrahmanirrahim

KETUA RAPAT:

Kita perpanjang dulu ya sampai jam 1 paling lama ya.

F-PDIP (RAHMAD HANDOYO, S.Pi., M.M.):

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Salam sehat buat kita semua

Pak Dirut dan seluruh jajaran yang hadir, pengawas, dan Teman-teman Pimpinan Komisi.

Saya kalau bahasa dari indikator saya nggak bicara hal yang buruk, baik Pak indikator loh ya itu ada yang 100 targetnya, ada 103, ada yang 91, 94 indikatornya bagus, bagus tapi darimana kita mengukur Pak gitu. Mengukurnya itu targetnya darimana, kemudian yang lain saya ingin melihat menyampaikan pada temen-temen direksi ya.

Saya rasa bulan madu Bapak udah cukuplah, bulan madu setelah diangkat dilantik oleh Bapak Presiden untuk dapat amanah selama sekian

bulan ini mempelajari dan apa mimpi Bapak untuk menjadi penjaga gawang terhadap BPJS Tenaga Kerja ini. Salah satunya adalah gambar peta Pak kita rakyat kita berapa juta amanah rakyat, amanah undang-undang bahwa setiap pemberi kerja wajib hukumnya ada sanksi jelas itu tetapi kalau melihat kerja ketika saya diskusi dengan temen-temen saya di dapil maupun beberapa tempat di provinsi yang lain masih begitu banyak potensi yang bisa dimasukkan ini akan bersinergi dengan pertanyaan berikutnya. Apakah yang disampaikan oleh Bu Dewi itu 4 triliun sekian itu cukup atau tidak, kurang atau tidak, atau optimal atau tidak.

Mohon maaf Pak kesejahteraan Bapak mohon maaf ya bukan Bapak tetapi keluarga besar BPJS Tenaga Kerja *good*. Keluarga saya kalau orangnya mumpuni pintar saya bisa tak suruh minta kerja di situ kok karena kesejahteraannya bagus tapi saya berharap jangan terlena dengan zona nyaman Pak gaji kesejahteraan bagus tetapi ketika di *push* untuk mendorong rakyat kita dalam hal ini para pekerja baik perusahaan, perorangan yang memberi pekerja sudah kah banyak rakyat yang mau masuk di situ, ternyata belum. Tapi okelah saya beri apresiasi ya ada perangkat desa yang masuk di situ kerja sebagai peserta BPJS bagus tapi belum cukup Pak masih banyak saudara kita, rakyat kita yang belum tahu apa itu BPJS Tenaga Kerja, belum tahu Pak. Tapi ini luar biasa loh Pak amanah rakyat kita undang-undang itu, bagaimana itu perlindungannya, kematian, pekerja, hari tua, pensiun, dan lain-lain. Tukang ojek yang lain yang belum.

Nah untuk itu, saya berharap agar ke depan kita diberikan *mapping* yang jelas, berapa program kerja Bapak itu dalam satu tahun 2021 karena fungsi kami kan 3 hal Pak parlemen itu legislasi, pengawasan, dan anggaran. Okelah kalau dalam posisi kami sebagai fungsi pengawasan, saya ingin melihat portofolio Bapak bukan dari sisi investasi ya dalam satu tahun itu per direktorat berapa, berapa investasinya, berapa modalnya, berapa investasi untuk memperbaiki kinerjanya, apakah teknologi itu yang harus kita baca kalau ini kan gelondongan Pak.

Saya belum tahu kinerja Bapak kalau dari sisi itu parameternya indikator cuman terakhirnya saja. Tapi ketika di Direktorat Teknologi ini menginvestasikan ini, Direktur SDM menginvestasikan ini, sekolah atau apapun baru kita bisa mengukur kalau sekarang saya mohon maaf belum bisa Pak. Nah untuk itu saya kira sekali lagi jangan terlena dengan zona nyaman karena sudah di gaji besar staf-stafnya dibandingkan dengan yang lain ya maksud saya *benchmark* dengan yang lain ya perusahaan yang lain sehingga udahlah saya juga di kerja di *push* berapa persen apa namanya ditarget berapa persen, gajinya udah nyaman kok tidak ada *reward and punishment* kok.

Ketika staf Bapak, kepala divisi atau kepala kantor atau kepala di tingkat kota atau dimanapun ada *reward and punishment* Pak, ketika targetnya 150%, 200% kepesertaan kita beri kehormatan, ketika tidak jadi geser Pak karena rakyat kita mohon maaf Pak saya agak sedih ya membaca ribuan rakyat kita jutaan Pak Dirut, ini mohon maaf ya saya menyampaikan ini ingin memberi semangat karena kita akan bekerja sama ya Pak ya.

Ini ribuan 5,5 ribu, 16 ribu, 27 ribu angkanya nggak bisa itu Pak parameter kita juta, penduduk kita 200 juta sekian kok, berapa puluh juta orang yang dikasih kerja baik badan usaha, perseorangan, badan hukum yang lain, itu sanksi. Nggak usah jauh-jauhlah kalau Bapak memelototi yang dunia kerja yang wajib hukumnya untuk mendapatkan dan ikut peserta ini pelototin Pak.

Nah sambil kerja saya kira ke depan saya lewat Pimpinan mohon izin, tadi Bu Dewi juga secara spesifik 4 triliun buat apa tapi saya lebih menukik lagi Pak Pimpinan per direktorat berapa capeknya, untuk kegiatan, untuk membangun, untuk investasi apa membangun (2:25:43) informasinya, apakah ketika belanja investasinya ratusan miliar apakah sudah berimplikasi dengan kinerja, itu yang harus kita lihat baru Komisi IX melihat secara gamblang, memotret dengan dikasih anggaran segitu per direktorat apakah sudah sesuai dengan optimal belum? Kalau sekarang setiap mohon maaf Pimpinan dan teman-teman yang lain, setiap rapat dengan BPJS Kesehatan, Tenaga Kerja hanya kita gelonggongan seperti ini darimana kita bisa mengukur, bagaimana kita bisa melihat indikatornya kalau hanya indikator gelondongan seperti ini.

Makanya saya sangat *appreciate* ketika kita rapat dengan wajah-wajah baru semangat baru dengan segala pengalaman yang luar biasa saya kasih jempol tapi jangan terlena dengan zona nyaman nggak boleh itu kasihlah target, kita juga ingin lihat targetnya jangan begitu Pak Dirut tahun 2022 ini targetnya jangan sekian ribu, kita naikan itu fungsi parlemen untuk menggenjot gitu loh. Jangan gitu dong udah nggak jaman targetnya cuma sekian ratus ribu kenaikannya, nggak boleh itu karena kita dalam ini adalah amanah kita jelas Undang-Undang Ketenagakerjaan kita dari sisi BPJS Tenaga Kerja. Kita sama-sama Pak, saya dapat amanah, kami semua dapat amanah, Bapak dapat amanah. Saya berharap mimpi kita semua Bapak memberi *legacy* yang luar biasa, di *push* keras Pak, kesejahteraan Bapak besar loh. Mohon maaf bukan direksi tapi keluarga besar.

Satu lagi keluhan Pak, tadi semua teman-teman sudah sampaikan sosialisasi menjadi salah satu kata kunci untuk berhasil atau tidaknya kepesertaan. Lah gimana cemana kita cuma dikasih berapa titik itu, kita ini justru Pak, Ibu, Bapak-Bapak banyak kepala desa yang belum tahu tentang apa itu BPJS Tenagakerjaan. Itu kepala daerah itu adalah pemerintahan paling kecil yang di daerah apakah perlu penambahan SDM, apakah perlu hanya, saya mohon maaf Pak, saya agak, agak pesimis kalau hanya mengandalkan Bapak. Perlulah boleh kerja sama tidak harus kerja sama sebagai yang kerja sebagai karyawan tetap, nggak perlu. Kalau mengandalkan karyawan tetap Bapak, Aku pesimis Pak karena gajinya karyawannya ada Bapak besar tapi kinerjanya nggak begitu bagus. Mohon maaf ya nggak bagus. Targetnya dibesarpun juga bisa, gaji udah gede kok ngapain kerja jelek tidak gaji saya udah tinggi kok. Bisa ditambah kerja dengan kontrak.

Dengan menambah kabupaten-kabupaten yang belum terjamah BPJS Tenaga Kerja, kita kerjakan Pak. Ayo kita kerjakan bareng-bareng Pak, kami siap *support* kok tapi ketika saya bahkan termasuk begini mohon maaf, oke nanti akan saya fasilitasi kepala-kepala desa kumpul, saya hanya minta tolong BPJS Tenaga Kerja datang memberi informasi banyak yang tertarik Pak

Dirut ternyata. Saya *appreciate* Pak ketika saya tersentuh ya memang apa nggak tahu ya apa ketika saya sosialisasi diberikan contoh-contoh yang berhasil ada yang meninggal, perangkat desa Pak saya orang kampung, meninggal kemudian masih muda kemudian anak SD sampai kuliah diberikan akses kuliah itu kan luar biasa negara hadir lewat BPJS Tenaga Kerja untuk memberi keberpihakan pada rakyat kecil bayarnya 16.000 *sewu* Pak dan rakyat banyak yang belum tahu mayoritas ratusan juta belum tahu ini, belum ada yang tahu Pak.

Nah untuk itu dalam forum yang mulia yang terhormat ini saya mendorong kepada BPJS Tenaga Kerja memberikan fokus kepada sosialisasi nggak harus dengan kami Pak, Bapak kerja dengan karyawan terserah perkuat. Sekali lagi jangan hanya ternina bobokan zona nyaman dengan gaji kesejahteraan yang bagus, mohon maaf ya Bapak kalau nggak usah di, nggak usaha dikasih target tinggi udahlah gaji mereka kitakan udah tinggi ngapain gitu loh. Itu Bapak ya, saya ingin memberi semangat buat kita bersama.

Intinya Pak Pimpinan, saya ingin tahu per direktorat itu Bapak berapa anggarannya agar kita bisa *me-mapping*, bisa memotret, dan bisa mengevaluasi dan berkontribusi, memberi masukan kalau sekarang belum bisa *nuwun sewu* tapi indikatornya keren Pak, semua keren tapi aku belum bisa melihat dari targetnya cuman 100 padahal potensi targetnya 1.000 bisa, begitu terlalu banyak *gambleh* jadi nggak fokus nanti saya. *Matur suwun*.

Salam Sehat Buat Kita Semua
Merdeka

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

ANGGOTA KOMISI IX DPR RI:

Pak Ketua, Pak Ketua, lupa Pak Ketua, belum.

KETUA RAPAT:

Iya.

ANGGOTA KOMISI IX DPR RI:

Belum.

KETUA RAPAT:

Oh ya, nanti habis dari Bu Hasnah, senior terakhir tetap Ibu Kurniasih. Silakan ini biar kita ini semua yang hadir bicara ya. Silakan Bu Hasnah, yang kira-kira yang belum disebutkan teman-teman aja yang ditanyakan disampaikan juga yang lain biar, he'eh, biar kita bisa *ngeh*.

ANGGOTA KOMISI IX DPR RI :

Izin Pimpinan, mengingatkan aja kita jam 2 juga ada agenda lain.

KETUA RAPAT:

Iya siap, siap, siap, maka ini kita habis ini biar kita istirahat dulu sambil Pak Dirut merapihkan jawaban baru kita ambil kesimpulan. Silakan Pak, Bu Hasnah, senior, sama terakhir Bu.

F-P. NASDEM (Drg. Hj. HASNAH SYAMS, MARS.):

Terima kasih.

Saya sedikit saja yang ingin tambahkan.

**Yang saya hormati saya banggakan Bapak, Ibu Ketua, dan teman-teman Komisi IX,
Yang saya hormati Bapak Dirut BPJS Ketenagakerjaan bersama jajaran.**

Jadi saya hanya ingin menambahkan bahwa pada Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan pada Pasal 27 tentang Pengusaha Yang Tidak Mengikutsertakan Pekerja atau Buruh dalam Program JKP dan terjadi PHK, pengusaha wajib memberikan manfaat uang tunai dan pelatihan kerja dan juga disebutkan bahwa pengusaha wajib mengikutsertakan pekerjanya dalam program ini.

Pertanyaannya karena ini banyak juga kita temui di daerah di dapil kami bahwa banyak pengusaha-pengusaha yang enggan untuk membayarkan BPJS Ketenagakerjaan kepada pekerjanya. Yang saya ingin tanyakan, apakah BPJS Kesehatan punya data berap, BPJS Ketenagakerjaan berapa banyak perusahaan dan jumlah pekerja yang belum ikut serta dalam program ini kalau memang belum ini mesti ada langkah tegas dari pemerintah khususnya BPJS Ketenagakerjaan kepada perusahaan yang tidak taat oleh peraturan ini. Itu yang pertama.

Yang kedua tadi juga sudah disampaikan oleh Ibu Arzeti dan beberapa teman lain terkait dengan sosialisasi, kami juga membaca bahwa di dalam BPJS Ketenagakerjaan ada program PERISAI yaitu Program Agen Penggerak Jaminan Sosial Indonesia yang kami mau mengetahui sejauh mana program ini karena di daerah juga kami belum melihat daripada kegiatan ini bisa mungkin dijelaskan bagaimana dengan program ini sudah berapa banyak pekerja yang ikut menjadi peserta program ini dan terkait dengan kedisiplinan membayar iuran peserta.

Yang saya yang terakhir ingin saya tambahkan kalau tahun 2021 kemarin oleh BPJS Ketenagakerjaan kerja sama dengan mitra dalam hal ini anggota DPR RI Komisi IX untuk mengadakan sosialisasi, kalau saya sebagai anggota ada 5 titik dimana satu titik itu ada 200 kartu dan pembayaran iurannya

itu dibebaskan 3 bulan. Saya rasa ini program sangat bagus sekali menurut saya dan seharusnya BPJS Ketenagakerjaan juga terima kasih kepada anggota dari Komisi IX karena ini juga sudah sangat membantu mensosialisasikan dari program ini dan saya sama mungkin sependapat dengan Bapak Sukanto tadi kalau misalnya untuk membantu mensosialisasikan sekiranya ya program ini kalau untuk anggota ditambah lagi, artinya ini kan sudah cukup kita membantu di dalam mensosialisasikan. Jadi itu mungkin dari saya sekian.

Wabillahi Taufiq Wal Hidayah

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Iya, jadi sekali lagi semua demi kepentingan pekerja di daerah ini bukan kepentingan Komisi IX. Silakan Pak Hasan, terakhir Bu Kurniasih.

F-DEMOKRAT (HASAN SALEH):

Terima kasih, Pak Ketua.

Di sini ada halaman ini Pak, di situ angka yang Bapak sebutkan bahwa target yang mau dicapai sosialisasi ini hanya 1,2 juta Pak ya jadi hari ini Bapak dibikin di terlalu banyak masukan tentang sosialisasi termasuk kami sangat mengharapkan Bapak sosialisasi semakin banyak gitu Pak. Jadi kalau 1,2 juta target Bapak dibagi 83.381 desa kelurahan ya wajarlah kalau di tempat kami Sekatak sana ke Kalimantan Utara tidak mengenal BPJS Tenaga Kerja Pak sangat-sangat target ini sangat sedikit Pak ya. Teman-teman tadi sudah terlalu banyak masukan tentang sosialisasi jadi kami hanya mungkin Bapak sosialisasi yang dipadatkan.

Salah satu kasus baru terjadi Pak di Kalimantan Utara ada anak naik sepeda motor baru selesai kerja di rumput di apa namanya rumput laut, patah di operasi setelah itu datang peserta BPJS Tenaga Kerja hanya melihat Pak melihat setelah itu ditanya keterlibatan Bapak untuk menangani kasus ini bagaimana Pak ya? Diam tidak bisa menjawab apa-apa. Sangat sedih Pak ironis kejadian ini udah sosialisasinya tidak jalan dengan baik, me apa menangani kasus yang ada juga hanya nonton, lalu saya berpikir dengan kejadian ini ya *naudzubillahi min dzalik* Pak gitu. Sangat sedih Pak, sangat sedih.

Saya ulangi, sosialisasinya tidak jalan, melihat masyarakat yang sudah jelas-jelas dari tenaga kerja ditimpa dengan masalah hanya nonton melihat masah, lalu keberadaan Bapak dimana Pak kehadiran Bapak di negara ini dimana gitu Pak pertanyaan kita begitu. Terima kasih, Pak.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Pak Hasan.

Terakhir dan ini benar-benar yang terakhir adalah Ibu Kurniasih Mufidayati.

F-PKS (Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si.):

Terima kasih, Pimpinan Kakak Melki.

**Ibu Ketua dan juga teman-teman anggota Komisi IX,
Direksi BPJS Ketenagakerjaan dan semua jajaran.**

Ada berapa poin nih kenapa minta terakhir soalnya biar masuk ke kesimpulan ini Pimpinan. Yang pertama ya saya rasa kesimpulan kita harus cukup komprehensif karena ini ada 3 agenda terkait apa, apa tadi nih evaluasi, kemudian implementasi Inpres, dan program kerja unggulan. Tadi yang paling muncul banyak ini biar TA mulai menyiapkan tentang penambahan peserta dan juga beberapa laporan yang harus ditingkatkan lebih baik lagi.

Tentu saja kita memberikan apresiasi kepada direksi yang sudah melakukan segala upaya Pak Dirut ya dan juga seluruh direksi yang ada untuk meningkatkan kinerja dari BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan manfaat yang lebih besar lagi kepada peserta dan juga kepada masyarakat secara umum.

Yang pertama tentang evaluasi, saya dari tadi bolak-balik, bolak-balik evaluasi ini tentang investasi ya tentang investasi ini nggak detail di sini daripada kajian kita beberapa waktu yang lalu dalam setiap RDP ataupun dalam setiap rapat kita dengan BPJS Ketenagakerjaan selalu masalah investasi ini selalu menjadi masalah yang sangat krusial sekali, kenapa? Karena ya karena ini merupakan dana amanat kan sebenarnya kan dana amanat miliki seluruh peserta yang terhimpun di dalam BPJS Ketenagakerjaan ini jadi nih amanah gitu ya. Artinya dana amanat yang dititipkan kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Nah harusnya ini ada transparansi yang lebih details kepada Komisi IX bahkan menurut saya kepada anggota peserta BPJS Tenaga Kerja tentang pengelolaan investasi dana BPJS Ketenagakerjaan ini kemana saja dan kemudian juga capaian seperti apa gitu ya. Ini ada tapi rasanya masih normatif banget dan cuma satu kalimat ya atau dua kalimat gitu. Jadi saya rasa ini harus masuk perhatian kita Pimpinan tentang pengelolaan dana investasi yang selalu menjadi koncern dari Komisi IX. Ya kita ada Perpres Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Jaminan Sosial ya juga tentang RKAT gitu ya. Nah ini semuanya harus ada bagian dari rencana pengelolaan investasi juga.

Nah di rencana program, kami juga belum lihat nih Pak Dirut dan Pak Direksi yang lain, belum melihat tentang program rencana tata kelola investasi ke depan itu mau seperti apa, pengembangannya mau seperti apa, evaluasinya bagaimana, ini satu hal yang sangat prinsip buat Komisi IX ya.

Sampai dulu kita pada saat seleksi Dewas BPJS Ketenagakerjaan itu yang kita bener-bener perdalam itu adalah bagaimana komitmen dari Dewas Ketenagakerjaan ini berani melakukan evaluasi dan monitor terhadap pengelolaan investasi dana BPJS Ketenagakerjaan. Jadi saya rasa ini hal yang sangat penting dan harus masuk di dalam kesimpulan kita bagaimana kita meminta transparansi dan juga pendetailan dari BPJS Ketenagakerjaan tentang evaluasi investasinya bagaimana dan juga rencana pengelolaan investasi di masa yang akan datang.

Kemudian yang kedua adalah terkait dengan laporan ini ya artinya presentasi ini saya juga belum membaca tentang kendala sebagai mitra ya sebagai mitra tentu saja kami juga ingin tahu ada kendala-kendala apa yang dihadapi oleh BPJS Ketenagakerjaan sehingga mungkin bisa diselesaikan bersama juga di sini tidak hanya laporan yang baik-baik saja yang bisa kita terima tapi kita juga ingin menggali lebih dalam lagi ada tantangan apa, ada kendala apa, ada persoalan apa, ini kita tidak melihat satu paparan pun tentang kendala dan persoalan yang dihadapi.

Jadi saya rasa ini harus terbuka juga kendala, hambatan, dan juga persoalan yang dihadapi seperti apa sehingga kami bisa bantu juga niatnya tuh niat bantu Pak Anggoro, nih Pak Anggoro nih sekarang udah terkenal karena sudah tampil bareng sama Raffi Ahmad, Pimpinan cuma Kakak Melki nggak ada di situ sama Bu Ketua gimana itu. Nah, oh ya, ya, ya, harusnya Bu, Bu, Bu Ketua ikut ini Bu Ketua ya.

Nah terus yang ketiga sebagai, ini intermezzo aja biar nggak terlalu tegang kalau bicara investasi itu soalnya selalu tegang gitu ya. Nah yang terakhir ini yang terakhir ya, BPJS Ketenagakerjaan ini kan lembaga yang berada di bidang ketenagakerjaan. Saya sangat berharap sekali BPJS Ketenagakerjaan ini bisa menjadi contoh bisa menjadi *modeling* buat lembaga-lembaga yang lain dalam hal tata kelola ketenagakerjaan di BPJS Ketenagakerjaan itu sendiri.

Nah beberapa tahun yang lalu sebelum kita semua di ada di sini, eh mungkin Bu Irma udah ada di sini yang senior-senior pasti udah ada di sini ya di periode 2015 itu dan di, di 2020 apa 2021 sempat dibahas juga adalah tentang status tenaga kerja BPJS Kesehatan yang bukan pegawai tetap. Nah ini kita juga ingin menanyakan bagaimana ini tenaga kerja ataupun SDM-SDM yang di BPJS Ketenagakerjaan ini yang statusnya belum tetap itu bagaimana hak-haknya juga dan bagaimana apa namanya proyeksi dari BPJS sendiri ya.

Itukan dulu kalau nggak salah tuh ada kesimpulan lapsing itu yang 2015 ya kalau nggak salah pernah saya baca itu di situ ada kesimpulan bahwa BPJS Tenaga Kerja ini direkomendasikan untuk mengangkat pekerja *outsourcing* dari Lembaga BPJS Ketenagakerjaan itu sendiri ya Pak Anggoro belum ada di situ Pak tapi ini apa warisan dari periode yang lalu ya ini yang harus mungkin di seriusin juga bagaimana status ketenagakerjaan dari semua pegawai yang ada di BPJS Ketenagakerjaan itu sendiri, karena ini adalah satu lembaga yang mewadahi apa satu lembaga yang mewadahi dan bertema tentang

ketenagakerjaan saya rasa harus bisa menjadi model dan contoh terbaik untuk lembaga-lembaga yang lain. Terima kasih, Pimpinan.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih. Semua anggota telah menyampaikan pertanyaan yang fisik maupun virtual, kami persilakan sebelum saya skors Bu Felly mungkin Ketua, silakan.

KETUA RAPAT:

Saya langsung saja. Memang menarik bicara masalah investasi dan pelayanan ya, tadi saya sampai buka itu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Pak, jadi kalau di sana dibidang untuk dana jaminan sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besarnya kepentingan peserta.

Kemudian ada juga Pasal 2, BPJS menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional berdasarkan asas kemanusiaan manfaat, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, Pasal 13 di sini di bilang BPJS berkewajiban untuk ada a, b, c, d, dan sebagainya saya baca untu bagian C, memberi informasi melalui media mengenai kinerja, kondisi keuangan, serta kekayaan, dan hasil pengembangannya di F, memberikan infomrasi kepada peserta mengenai prosedur untuk mendapatkan hak dan memenuhi kewajiban, dan G, memberikan informasi kepada peserta mengenai besar hak pensiun satu kali dalam satu tahun. Apakah ini sudah dilaksanakan? Ini pertanyaan Pak.

Kemudian dari data berdasarkan data investasi BPJS Ketenagakerjaan per 31 Desember 2021 realisasinya ini 553,50 triliun seluruh investasi tersebut saat ini sebagai bagian dari realisasi kinerja tahun 2021 masih diinvestasikan dalam berbagai surat-surat berharga. Di samping itu iuran kepesertaan mencapai 79,12 triliun dan saat ini dalam pengelolaan keuangan BPJS Ketenagakerjaan. Nah capaian kinerja investasi dan iuran tersebut yang pengelolaan dananya ditujukan untuk penggunaan sebesar-besarnya kepentingan peserta yang menurut yang tadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS dibagi ke dalam aset dana jaminan sosial dan aset BPJS tidak menghilangkan unsur kepentingan peserta yang paling utama tentunya.

Ternyata capaian kinerja BPJS Ketenagakerjaan baik dalam penggunaan investasi jangka pendek maupun jangka panjang, pengolahan tanah tersebut sampai saat ini dapat dilihat terutama saat pandemi Covid-19 ini baik untuk peserta perusahaan maupun pekerja belum terlihat signifikan Pak. Dibandingkan dengan realisasi data klaim per 31 Desember 2021 yang sebesar 42,89 triliun dan investasi sebesar 553,50 T menunjukkan keberpihakan investasi belum menunjukkan sebesar-besarnya ke kepentingan peserta.

Hal ini juga dapat dilihat dari jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan yang masih ada 30,6 juta ya dibandingkan dengan angkatan kerja menurut data

BPS 2021 mencapai 137 juta. Hal ini berarti bahwa investasi yang dilakukan tidak berdampak signifikan bagi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, investasi yang dilakukan tidak berpengaruh pada naik turunnya jumlah peserta padahal amanat Undang-Undang SJSN adalah untuk melindungi pekerja dan permasalahan jaminan sosial sehingga kepentingan sebesar-besarnya untuk peserta tercapai.

Nah besaran data juga kepesertaan dukungan pemerintah melalui Inpres Nomor 2 ini Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sampai saat ini belum berdampak pada peningkatan kepesertaan pada ASN, sementara menurut Undang-Undang BPJS kepesertaan BPJS adalah seluruh penduduk Indonesia meskipun dukungan atas Inpres Nomor 2 2021 tersebut telah memberikan jalan tol untuk mengoptimalkan kepesertaan namun saat ini tentunya masih perlu ditingkatkan.

Saya kira ini Pak ada hal yang lain tapi mungkin di pertemuan berikutnya karena ada yang menyangkut kami ingin tanyakan yang menyangkut dengan Kementerian ketenagakerjaan yang menyangkut BSU kemarin begitu banyak persoalan yang kami dapatkan di bawah tapi nanti di kesempatan yang lain. Saya kira itu Pimpinan, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih Bu Felly yang menutup seluruh rangkaian pertanyaan dari anggota dan Pimpinan Komisi IX karena Pak Ansori, (2:49:07) dan Pak Charles sudah berkesempatan untuk memberikan pertanyaan. Untuk itu rapat kita skors sampai jam 1.30 mulai *on time* sehingga nanti bisa efektif nanti Pak Dirut tinggal nanti meng-*cluster* sesuai dengan jenis pertanyaan dan merespon sekalian sesuai jumlah pertanyaan. Saya skors sampai jam 1:30 ya untuk kita istirahat, sholat, dan makan.

(RAPAT DI SKORS PUKUL 12:58 WIB)

(SKORS DICABUT PUKUL 14:00 WIB)

DIREKTUR UTAMA BPJS KETENAGAKERJAAN:

Baik, terima kasih.

Bapak Pimpinan dan para anggota Komisi IX yang saya hormati.

Dari beberapa pertanyaan yang tadi disampaikan, pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas masukannya Bapak dan Ibu karena memang dalam 10 bulan ini kami langsung tancap gas Pak Rahmad Handoyo jadi nggak ada bulan madunya Pak langsung tancap gas sehingga apa-apa yang tadi disampaikan yang kami sampaikan itu adalah angka-angka yang memang kami berusaha betul bahwa itu adalah angka-angka yang riil bukan angka-angka yang tadi dikhawatirkan oleh Ibu Irma sebagai angka-angka yang contoh misalnya kenaikan iuran, kenapa kok kenaikan iuran tertinggi tetapi kesertaan

tidak tinggi tadi Pak Darul Siska karena memang kalau lihat di angka tadi Pak di angka pesertaan angka peserta yang turun itu adalah angka yang jasa konstruksi Pak, jakon, jasa konstruksi itu iurannya rendah sehingga jumlah pesertanya terlihat turun banyak karena tadi lihat di data tadi di *slide* tadi itu untuk penerima upah dan bukan penerima upah tetap naik tapi jakon itu turun.

Kontributor terbesar iuran adalah dari penerima upah Pak Darul Siska jadi memang angka iuran yang masuk itu angka yang sehat bukan angka yang hanya di akhir tahun lalu turun lagi dan jasa konstruksi yang turun yang berkurang banyak itu dampak keiurannya sedikit tetapi dampak kepada kepesertaannya banyak Pak maka tadi kalau dilihat dari target 33,6 juta peserta kok tercapainya 30,6 itu, itu memang karena sebagian besar yang turun itu adalah jasa konstruksi dan justru malah kami tidak khawatir Pak karena itu berarti kita lebih punya angka yang lebih sehat.

Tadi Bapak sampaikan juga target 30,5 itu adalah prognosa kami di tengah tahun tetapi target nggak dirubah Pak tetap 33,6 jadi artinya ya kalau dilihat dari ICK atau indeks kinerja ya berarti kita tercapai jadi kita nggak ngerubah targetnya Pak itu aneh hanya prognosa di internal supaya kita lebih riil sampai dengan akhir tahun ini di angka berapa yang harus kita kejar tetap di angka yang sehat Pak.

Tadi beberapa juga nanti saya juga minta dibantu oleh Pak Jay di kepesertaan juga Pak Edwin di investasi yang juga banyak ditanyakan tadi tetapi yang pasti kalau kita lihat dari dana operasional tadi beberapa pertanyaan terakhir ada ops, di tahun 2021 dari anggaran yang diberikan dana operasional yang diberikan 4,66 triliun realisasinya 4,41 sehingga kalau tidak terpakai ya berarti memang nggak ada yang kembali karena memang kita hanya memakai segitu.

Tadi juga ada pertanyaan bagaimana dengan hasil investasi apakah ada surplus atau tidak, semua hasil itu bukan *surplus*, semua hasil masuk kepada dana kelolaan karena kita yang kita gunakan dana operasional dan DAOPS porsi yang terpisah. Jadi kalau tadi menghasilkan hasil investasi 35 triliun ya semua masuk kepada dana kelolaan.

Kenapa kok tadi ada pertanyaan, *fresh fundnya* turun, karena kalau dilihat di slide tadi jumlah iuran yang 79 triliun lalu klaim yang terjadi adalah 42 triliun di tahun yang sebelumnya jumlah iuran 73 klaimnya 35 sehingga kalau dilihat antara iuran dan klaim selisihnya tahun ini tuh lebih sedikit karena banyaknya klaimnya.

Menjawab *concern* apakah klaim tertinggi dimana, klaim tertinggi adalah di JHT Pak Jaminan Hari Tua, kenapa karena banyak pekerja yang pada saat terkena PHK mereka mencairkan JHT-nya. Hal ini juga yang pernah kami sampaikan di rapat sebelumnya di RDP sebelumnya kami sedang dalam proses mengusulkan untuk mengembalikan JHT sesuai *khittah*-nya Pak tidak bisa dicairkan setiap saat JHT kembali kepada fungsinya dicairkan pada saat usia pensiun. Nah ini dalam proses Pak dalam waktu dekat rasanya peraturannya akan muncul dan akan JHT akan kembali seperti semula.

Namun kalau tadi Pak Darul Siska tanyakan porsi terbesarnya apa? Jawabannya JHT tetapi porsi JKM walaupun kecil tapi jumlahnya 2 kali lipat dibanding tahun lalu Pak. Jadi porsi JKM klaim tahun ini jumlahnya 2 kali lipat dari tahun lalu, itu menunjukkan bahwa memang banyak klaim JKM di era pandemi Covid ini. Jadi itu gambaran besarnya terkait dengan portur apa namanya anggaran kita.

Terkait juga dengan investasi nanti mungkin izin Bapak Pimpinan sebagian itu bisa kita tertulis mungkin yang sifatnya data-data detail tetapi memang dari sisi investasi, investasi yang dilakukan kami, kami saat ini menghasilkan investment di tahun 2021 ada 6,95%. Artinya kalau dikembalikan kepada target yang ditentukan bagi kami BPJS Tenaga Kerja adalah suku bunga deposito perbankan 12 bulan yaitu saat ini deposito sekitar 3% sehingga kalau investment 6,95 itu artinya lebih tinggi daripada suku bunga deposito.

Komposisi seperti apa nanti Pak Edwin yang sampaikan tapi yang ingin saya sampaikan adalah komposisi investasi yang kami optimalkan tentu saja kami sangat berhati-hati agar 553 triliun ini tidak salah penempatannya dan hasil tetap optimal, 80% memang ada di surat berharga dan memang kami melihat kenapa kok dari instrumen saham salah satunya itu jumlahnya tidak terlalu besar jumlahnya kita pastikan stabil karena kita melihat juga bagaimana perkembangan indeks harga saham jadi tahun lalu sangat fluktuasi tahun ini mulai stabil maka kita akan meletakkan itu di instrumen-instrumen yang memang punya peluang. Itu yang dari saya terkait gambaran besar kinerja kita baik dari pesertaan maupun dari layanan dan juga investasi.

Pak Jay silakan kalau mau nambahkan tentang pesertaan.

F-P. NASDEM (IRMA SURYANI, S.E.):

Sebelumnya interupsi Ketua.

KETUA RAPAT:

Silakan Bu Irma.

F-P. NASDEM (IRMA SURYANI, S.E.):

Ya, terima kasih Ketua.

Pak Dirut, soal investasi Bapak pernah tanyakan soal Jamsostek? Nah saya ingin ingatkan investasi itu sebaiknya tidak yang *risk* ya kan karena ini uang rakyat, nah itu yang pertama.

Yang kedua mohon maaf boleh nggak kita tahu diinvestasikan kemana ya diinvestasikan kemana, berapa besarnya yang diinvestasikan itu karena setiap saat klaimkan akan, akan terus ada, nah itu yang pertama.

Yang kedua terkait CSR harusnya BPJS TK nih punya CSR dan harus dikeluarkan kemana dikeluarkannya kan kita ini banyak Pak tenaga kerja kita yang misalnya cacat fisik ya cacat yang memang udah gak bisa kerja lagi kan bisa CSR itu dialihkan ke sana membantu para tenaga kerja yang sudah cacat yang sudah nggak bisa kerja lagi itu akan lebih bermanfaat. Nah ini yang saya, saya, saya belum lihat ini ya.

Jadi yang tadi ditanyakan oleh teman kita kemana CSR-nya bagaimana program sosial BPJS Tenaga Kerjanya kita nggak lihat program sosialnya kemana harusnya itu ada Pak. Bapak kan mendapatkan gaji dari tenaga kerja ini loh yang jadi anggota Bapak loh, nah salah satu anggota Bapak itu yang cacat tadi. Pernah nggak berfikir bahwa apa yang Bapak terima itu dari orang cacat yang, yang, yang nggak bisa kerja lagi maka kemudian apa yang Bapak terima, apa yang Bapak hasilkan dari institusi Bapak itu kembalikan melalui CSR kepada pekerja-pekerja yang memerlukan ini, ngapain dikekepin sendiri, keluarkan Pak, keluarkan. Kalau kita bicara agama sadaqohnya keluarin, sedekahnya Pak. Kan ada tuh Pak ya 2,5% yang harus dikeluarkan sama Bapak keluarkan 2,5% dari apa yang Bapak dapat untuk tenaga kerja yang cacat fisik dalam bentuk CSR Pak. Ini teman-teman tadi ngomong itu nih teman-teman saya tadi bisik-bisik tuh ngomong soalnya soal CSR-nya nggak ada.

DIREKTUR UTAMA BPJS KETENAGAKERJAAN:

Kami nggak punya CRS, Bu. Kami nggak punya CSR.

F-P. NASDEM (IRMA SURYANI, S.E.):

Iya makanya saya bilang harus ada.

DIREKTUR UTAMA BPJS KETENAGAKERJAAN:

Ya makanya itu tadi yang disampaikan juga bahwa TJSL namanya itu yang sedang mau diusahakan kembali karena kami belum punya.

F-P. NASDEM (IRMA SURYANI, S.E.):

Ya, itu yang saya bilang tadi Pak.

DIREKTUR UTAMA BPJS KETENAGAKERJAAN:

Jadi kami tidak, bukan tidak mengeluarkan Bu karena memang kami tidak punya.

F-P. NASDEM (IRMA SURYANI, S.E.):

Makanya saya bilang harus diadakan.

DIREKTUR UTAMA BPJS KETENAGAKERJAAN:

Ya, tapi kan berarti bukan tidak dikeluarkan kan Bu.

F-P. NASDEM (IRMA SURYANI, S.E.):

Kenapa?

DIREKTUR UTAMA BPJS KETENAGAKERJAAN:

Karenakan berarti bukan tidak dikeluarkan.

F-P. NASDEM (IRMA SURYANI, S.E.):

Bukan.

DIREKTUR UTAMA BPJS KETENAGAKERJAAN:

Karena memang nggak ada.

F-P. NASDEM (IRMA SURYANI, S.E.):

Bukan, saya bilang diadakan.

DIREKTUR UTAMA BPJS KETENAGAKERJAAN:

Iya, nggak tadi Ibu soalnya bilang tidak dikeluarkan.

F-P. NASDEM (IRMA SURYANI, S.E.):

Saya bilang diadakan kembali CSR-nya.

DIREKTUR UTAMA BPJS KETENAGAKERJAAN:

Iya, iya, nggak tadi soalnya Ibu bilang tidak dikeluarkan CSR-nya.

KETUA RAPAT:

Jadi melalui Pimpinan.

DIREKTUR UTAMA BPJS KETENAGAKERJAAN:

Saya nggak ada, bukan nggak mengeluarkan Bu memang kita nggak punya CSR.

F-P. NASDEM (IRMA SURYANI, S.E.):

Harus ada CSR, Pak.

KETUA RAPAT:

Jadi, nanti ini, ini pesan dari Bu, Bu Irma ini memang berarti BPJS belum punya.

F-P. NASDEM (IRMA SURYANI, S.E.):

Ketua, saya belum selesai Ketua maaf.

KETUA RAPAT:

Silakan.

F-P. NASDEM (IRMA SURYANI, S.E.):

Maaf ya Pak, nggak usah berdebat, Bapak saya cuma minta kami di Komisi IX minta tolong adakan CSR ke depan supaya ada manfaat dari yang disetorkan oleh rakyat pekerja ini kembali ke pekerja lagi itu intinya. Itu aja Pak ya, terima kasih Ketua. Maaf Ketua.

KETUA RAPAT:

Baik, berarti saya kira ini pesan saja nanti Pak Dirut tinggal nanti diteruskan kepada yang memberikan persetujuan anggaran nih kan dengan pihak layanan nanti tolong dibahas bersama mereka nanti. Silakan yang apa menanggapi pertanyaan yang lain, dari Pak ... Kepesertaan silakan.

DIREKTUR KEPESERTAAN BPJS KETENAGAKERJAAN (ZAINUDIN):

Ya, baik makasih Pak.

Yang terhormat Pak Pimpinan dan Bapak Ibu anggota Komisi IX.

Menambahkan apa yang disampaikan Pak Anggoro tadi, pertama dari angka-angka kepesertaan Bapak Ibu. 2021 itu memang kami fokusnya ke BPU Pak Darul Siska, jadi kalau lihat angka kami tadi memang meskipun secara total naik sedikit 2% tapi angka BPU kami ataupun informal itu naik 42% dibandingkan yang biasa.

Kemudian kalau lihat kenaikannya Bu Netty itu naik hampir 3 kali dari sebelum pandemi kalau kita banding dengan tahun 2019 misalnya kalau dibanding dengan 2020, 2020 memang kami *minus* semua itu ya.

Kemudian untuk penerima upah itu juga kami naik 1,5 kali, jadi secara angka memang kami fokusnya ke BPU dan PU itu fokus kami ke UKM memang itu. Nah ini di *slide* kami tadi, jadi nah tadi Pak Darul Siska nanya tahun depan gimana Pak Darul, tahun depan itu sama kami akan kembali fokus ke BPU. Tahun depan itu kami akan mencapai dari 30,6 saat ini itu kami akan target yang sekarang disusun itu ke angka 38 juta atau naik 22% dan kenaikan

tertinggi kembali Pak Darul Sika 69% nya BPU akan naik dari tahun sekarang itu. Nah itu fokus kami.

Kemudian strateginya gimana gitu ya, yang pertama strateginya tentu adalah strategi regulasi, regulasi itu *tools* yang kami mainkan tentu Inpres pertanyaannya Inpres selama apa berapa bulan ini apakah sudah nendang ke angka atau belum? Kami jawab belum, karena memang Inpres itu K/L K/L itu fokus kepada menyusun regulasi-regulasi karena bagaimana mereka mencairkan anggaran, pemda juga ngeluarin APBD-nya dan seterusnya baik itu untuk non ASN maupun untuk pekerja rentan tadi tentu itu harus ada regulasinya makanya tadi di inpres ini kami tampilkan berbagai dukungan regulasi dari kementerian dan pemerintah daerah. Pak Darul Siska nanti kami akan berikan daftar ini Pak segera kami akan berikan mana saja daerah yang sudah, mana aja yang belum dan seterusnya itu ya.

Nah tentu dari Inpres ini kemarin itu fokus kami, kami taruh dua memang Pak non ASN tadi seperti dipaparan kami non ASN itu memang baru 23% masih ada 70-an% lagi dan yang paling banyak memang ada di RT RW. Nah pertanyaannya adalah kenapa kami nyasarnya sampai ke RT, RW, dan aparat desa itu nah ini bagian dari sekaligus menjawab pertanyaan Bapak Ibu Anggota Dewan tadi terkait dengan sosialisasi karena kami sadar betul kalau aparat desa, RT, RW, dan terus itu paham tentang program Jamsostek mereka tentu yang terdepan Pak.

Nah dari data yang tadi kalau dilihat aparat desa sudah lumayan Pak aparat desa itu sudah kalau lihat angka tadi sudah diangka 64% nah kami akan terus gerakan 2% yang RT RW ini Pak, nah bagaimana caranya kami kolaborasi dengan pertama Kemendagri, Kemendagri sudah mengeluarkan Permendagri 27 dan itu secara intens sudah lebih dari 5 kali seluruh pemda provinsi kabupaten kota dikumpulkan *by zoom* oleh Kemendagri, Setkap, Menko PMK, dan Kantor Staf Kepresidenan memastikan *action* dari setiap pemda itu *action*nya apa, non ASN yang mau dianggarkan berapa, honorer ya Pak ya termasuk RT RW dan seterusnya itu nah termasuk apakah angka itu sudah masuk atau belum di dalam APBD mereka, nah itu sudah.

Nah sekarang dalam fase finalisasi anggaran dari setiap pemda itu Pak Pimpinan, nah itu di tiap provinsi kabupeten kota itu kami kawal bersama dengan Kementerian Dalam Negeri. Nah khusus yang guru honorer, guru dan tenaga kependidikan ini kami kolaborasi juga dengan Kementerian Pendidikan Ristek dan Dikbud, kemudian dan Kementerian Agama, baru saja keluar juga surat edaran dari, dari Pak Menteri dan Surat Keputusan dari Pak Menteri Agama. Nah itu sangat menyeluruh nanti perlindungan yang ada di dalam keputusan menteri itu, nanti kalau kami berikan keputusan menteri dan peraturan menteri itu sangat detail di situ Pak Darul Siska. Nah itu terkait dengan apa strategi dan seterusnya.

Nah kemudian di strategi yang kedua adalah kami perluas kanalnya, kanal orang untuk daftar untuk bayar kanalnya baik kanal fisik, kanal elektronik, kanal kami sendiri maupun kenal kerja sama. Kemarin di akhir Desember itu Pak Bapak Ibu kami baru aja kerja sama misalnya dengan Kantor Pos, Kantor

Pos itu ada 4.800 kantor pos dan itu kami hampir hadir Pak Pimpinan Pak Melki di hampir semua kecamatan. Jadi kalau dulu tuntutan kami hadir di seluruh kabupaten kota melalui PT. Pos itu kami hadir di hampir semua kecamatan.

Pos itu sekarang memang bertransformasi bisnisnya jadi dia butuh transaksi, butuh *number*, butuh bisnis nah ini momentum ini kami manfaatkan. Misalnya kemarin saya baru pulang dari Sanggau Pak dekat terus ke Entikong nah itu saya senang itu ada kantor pos sebelum Entikong itu, itu sudah ada bahwa daftar dan bayar Jamsostek itu bisa di kantor pos itu. Nah tentu keagenan yang seperti ini itu akan terus kami gerakan Pak kami juga jajaki misalnya sekarang dengan Pegadaian nanti sistemnya lagi dibangun, kemudian agen-agen perbankan juga Pak Melki itu karena perbankan punya sistem keagenan untuk merekrut teman-teman UKM itu juga terus kami gerakan.

Nah yang strategi yang kedua yang ketiga tentu yang tadi hangat dibicarakan dan jadi *keyword* hari ini yaitu sosialisasi edukasi gitu ya nah itu memang kami harus tata ulang mulai dari grand desainnya seperti apa sih sebenarnya gitu ya dari *brandingnya* tadi supaya orang kalau sebut BPJS itu nggak selalu ke kesehatan gitu Bu Netty ya. Nah itu *branding* juga harus kami benerin.

Kemudian dari sisi apa *marcomnya marketing communicationnya* juga harus kami susun ulang mau main dimana, media apa, dan seterusnya. Dan bentuk yang terakhir adalah fungsi penjualannya Pak *sellingnya* kalau *selling* ya tentu misalnya harus mencapai tahun depan itu tahun ini itu 38 ya gimana mencapai 38 gitu kan, sementara kalau branding dan marketing tadi gimana membangun *awareness* dan kesadaran dan seterusnya.

Nah kemudian kalau angka-angka yang lain mungkin nanti mohon izin Pak Pimpinan kami jawab tertulis cukup banyak tadi misalnya TK asing ya posisi TK asing misalnya sekarang posisinya 66.000, tahun ini kami targetkan kalau misalnya pandemi ini apa sudah normal dan seluruh investasi asing tadi berjalan seperti yang disampaikan Bu Dewi mungkin kami perkirakan akan naik sekitar 20% untuk tenaga kerja asing itu.

Yang PBI tadi saya pengen bagaimana progres PBI mungkin saya langsung ke dukungan Pak Pimpinan dukungan itu apa, pertama dari sisi regulasi mungkin kami perlu dukungan itu misalnya tadi terkait dengan non ASN itu memang jujur aja masih dinamika antara kami dan Taspen pasca putusan MK sebenarnya putusan MK itu tidak merubah bisnis kami sama sekali karena putusan MK itu dia hanya bilang, pertama peleburan bukan peleburan apa peralihan program JHT dan pensiun Taspen dan Asabri yang direncanakan tahun 2029 nggak jadi itu intinya pertama.

Intinya yang kedua, putusan MK sebenarnya kembali menegaskan semua badan penyelenggara yang mau mengelola jaminan sosial harus dibentuk oleh undang-undang. Nah jadi menurut keyakinan kami berdasarkan kajian hukum dan akademis di kami nggak ada yang berubah di bisnis kami. Jadi yang non ASN itu betul Bu Dewi Asmara tadi kami tetap istiqomah sesuai

dengan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021. Tentu ada dinamika salah satu dinamikanya adalah di K/L pusat tadi, kenapa K/L pusat itu progresnya nggak, nggak, nggak sebagus pemda. Nah karena K/L pusat itu masih menunggu putusan resmi dari Menpan, Menpan itu sedang menggodok regulasi itu Pak Melki memang nah dan mudah-mudahan regulasi itu juga sejalan dengan Inpres non ASNnya ke BPJS Ketenagakerjaan. Itu dukungan pertama.

Kemudian yang kedua ada perlindungan nelayan Pak, petani juga nah ini kami sedang komunikasikan terus dengan Kementerian Pertanian dan Kementerian KKP dan kami akan rencanakan mudah-mudahan bisa 1 juta petani 1 juta nelayan gitu kayak gitu. Nah yang lain mungkin mohon dukungan juga Bapak Ibu terkait dengan Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional nah kami sudah di undang oleh Komisi X nah di situ sedang digodok juga bagaimana perlindungan atlet baik atlet nasional, daerah, sampai dengan atlet yang istilahnya Pak Dede Yusuf itu yang apa tuh turnamen antar kampung kayak gitu, nah itu bagaimana melindungi mereka dan seterusnya.

Nah dukungan yang terakhir mungkin Permendagri 27 itu butuh pengawalan di setiap provinsi dan kabupaten kota dan itu dengan apa karena Bapak Ibu yang terhormat itu punya dapil tentu beberapa tempat misalnya yang didatangi oleh Bapak Ibu dari Komisi IX dorongannya makin kencang itu Pak Melki agar pemda benar-benar *aware* dan melaksanakan Permendagri 27 itu terutama untuk perlindungan teman-teman pekerja rentan tadi seperti petani, nelayan, penderes kelapa, dan seterusnya gitu. Mungkin itu beberapa hal tambahan dari saya sementara saya kembalikan ke Pak Anggoro. Makasih.

F-P. GERINDRA (Ir. SRI MELIYANA):

Ketua, melalui Ketua interupsi.

KETUA RAPAT:

Oh iya Bu Meli, silakan Bu Meli.

F-P. GERINDRA (Ir. SRI MELIYANA):

Kami ingin tahu Pak berapa banyak UMKM yang sudah, sudah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan khusus UMKM dan berapa yang di, dicanangkan oleh Presiden ke BPJS Ketenagakerjaan.

KETUA RAPAT:

Silakan, Pak.

DIREKTUR KEPESERTAAN BPJS KETENAGAKERJAAN (ZAINUDIN):

Posisi peserta kami itu tadi 30,6 nah itu 40%nya UKM Bu yang kan ada 3 *cluster* ya yang pertama, *clusternya* adalah penerima upah kemudian bukan penerima upah dan jasa konstruksi. Nah di penerima upah ini 40%nya UKM 60%nya usaha besar menengah. Nah.

F-P. GERINDRA (Ir. SRI MELIYANA):

Kalau dalam angka Pak?

DIREKTUR KEPESERTAAN BPJS KETENAGAKERJAAN (ZAINUDIN):

Kalau dalam angka, sebentar ya Bu ya izin lihat angka. Di skala besar menengah itu 10 jutaan Bu, nah kemudian di ini di penerima upaya ya Bu kecil mikro itu 8 jutaan itu Bu yang sudah jadi peserta. Nah gatenya memang paling banyak Bu Meliyana ada di UKM memang jadi kalau lihat profil peserta kami itu untuk besar menengah itu gatenya tinggal dikit sekitar 1,6 lagi tapi yang UKM ini dan BPU di sini yang paling banyak itu nah makanya *concern*nya kami tumbuhnya pun tadi itu dari UKM sama dari informal Bu Meliyana. Makasih Bu.

F-P. GERINDRA (Ir. SRI MELIYANA):

Oke, saya tambah sedikit saya hanya mengingatkan saja saat ini kita punya 64,2 juta UKM Pak, UMKM nah ini saya harapkan BPJS Ketenagakerjaan punya strategi khusus untuk meng*handle* UMKM ini. Terima kasih.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E.):

(PENGGANTIAN KETUA RAPAT)

Bu Meli sudah selesai, baik silakan Pak Sung.

F-PKB (H. SUKAMTO, S.H.):

Baik, makasih. Saya mengapresiasi kiat-kiat apa yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan, gabungan dengan apa tu kantor pos, guru, nelayan, petani ya, penderes kelapa, UKM, ini semuanya sebetulnya sudah tercakup di dalam satu RT dan RW apabila kita *concern* dengan RT RW seperti halnya anggota dewan kalau ada sosialisasi di luar yang selalu diundang mesti tidak lepas dari lurah pasti ada, ketua RW, pak dukuhnya ada, ketua RW, ketua RT, ini karena semua terwakil di situ Pak. Jadi tolong untuk difokuskan ke situ bagaimana caranya ya kita ini kan mitra, kita ini mitra Bapak. Untuk itu, bergandenganlah kita untuk mensosialisasikan yang paling tepat paling ampuh adalah dengan lurah, dukuh, RT, dan RW karena apa yang Bapak cantumkan di sini apa kantor pos atau guru, UMKM, nelayan, semua ada diwadahi di RT RW. Terima kasih, makasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Ya, baik. Silakan direspon, siapa Pak Anggoro atau silakan Pak.

DIREKTUR UTAMA BPJS KETENAGAKERJAAN:

Ya, Bu Felly izin tadi beberapa pertanyaan terkait investasi, Pak Edwin, tadi juga dari Bu Irma ada terkait dengan investasi. Silakan.

DIREKTUR PENGEMBANGAN INVESTASI BPJS KETENAGAKERJAAN (EDWIN MICHAEL RIDWAN):

Terima kasih, Pak Dirut.

Yang saya hormati Ibu Pimpinan dan Bapak Ibu anggota Komisi IX

Mungkin tadi saya ingin.

KETUA RAPAT:

Mungkin Pak deketin lagi biar bisa dengar, iya.

DIREKTUR PENGEMBANGAN INVESTASI BPJS KETENAGAKERJAAN:

Iya. Saya ingin menyampaikan mengenai *breakdown* dari investasi yang kami lakukan di BPJS Ketenagakerjaan, jadi kalau kita lihat dari data yang kita miliki untuk deposito itu besarnya adalah 18,8% jadi hampir 19% nilainya itu 105 triliun, lalu untuk obligasi 62,94 atau hampir 63% dan sebagian besar adalah obligasi pemerintah karena memang secara aturan dari OJK kami disyaratkan harus investasi itu minimum 50% ada di obligasi pemerintah jadi angkanya 60 hampir 63% untuk saham adalah alokasinya 11% dari total dana kelolaan, reksadana 6,7%, sedangkan untuk properti dan penyertaan nilainya tidak sampai 0,5% jadi nilainya adalah 0,45% dari dana kelolaan.

Mungkin tadi beberapa Bapak Ibu ada yang menyampaikan mengenai dukungan apa yang kami lakukan dari sisi investasi untuk para peserta kami, memang tidak secara langsung tapi karena kami adalah salah satu pemegang surat hutang negara yang paling besar dan tentunya dengan kami membeli surat hutang negara ini adalah kita turut membiayai apa namanya pengeluaran pemerintah yang mana penggunaannya apalagi di saat pandemi seperti sekarang ini adalah sebagian besar adalah untuk apa namanya memberikan kesempatan kerja juga kepada para pekerja jadi kami melihat bahwa apa yang kami lakukan ini walaupun tidak langsung tapi sebenarnya juga mendukung para peserta kami.

Begitu juga dengan tadi dari Pak Sungkono mengatakan apa dukungan kami terhadap UMKM dan usaha mikro, kami memang tidak secara langsung memberikan dukungan tapi karena kami menempatkan deposito hampir lebih dari 100 triliun saat ini dan sebagian besar itu kami tempatkan di BPD jadi saya kami yakin bahwa dukungan tersebut sudah ada walaupun tidak secara langsung karena memang kami melalui BPD.

Tadi ada juga pertanyaan dari Pak Darul Siska mengenai langkah-langkah apa yang kami lakukan untuk mengatasi *potential loss*, kami saat ini

sudah melakukan penyempurnaan Pak Darul untuk PPI atau Pedoman Pengelolaan Investasi dimana di dalam PPI yang lama itu kami hanya diperbolehkan membeli saham di satu perusahaan itu maksimum 5% sedangkan banyak dari posisi-posisi yang kita sudah miliki itu sudah mendekati 5% sehingga untuk kami melakukan *averaging down* atau membeli lebih banyak di *market* untuk supaya harga pembelian kami itu turun itu kami kesulitan gitu. Oleh karena itu, salah satu hal yang kami sempurnakan di dalam PPI adalah kita membuka ruang supaya kita bisa membeli lebih dari 5% dari kepemilikan di setiap perusahaan.

Lalu setelah kita lakukan itu tentunya *averaging down* adalah langkah strategi yang kita akan lakukan selain itu juga kami menambah universe saham dalam, dalam arti nama-nama saham yang kita bisa investasikan itu kita tambah seperti misalnya lebih banyak selama ini tidak ada nama-nama yang seperti berhubungan dengan sektor *communities* misalnya ya sedangkan hari ini atau saat ini *commodities* itu adalah salah satu sektor yang paling menjanjikan jadi kami menambah nama-nama tersebut dan juga dari universe yang selama ini adalah jumlahnya 45 saham saja kita kembangkan menjadi maksimal 100 saham jadi kami bisa melakukan investasi di lebih banyak perusahaan.

Namun demikian karena dana kelolaan yang sangat besar saat ini sudah di atas 550 triliun memang kami mengalami kendala di dalam apa namanya melakukan investasi terutama di pasar modal karena kalau kita ibaratkan bahwa kita ini kapal tanker gitu kita akan sangat sulit untuk bermanuver mengingat bahwa banyak saham-saham yang *listing* di Bursa Indonesia itu likuiditasnya kurang sehingga kami terus terang mengalami kesulitan seperti tadi Pak Ramson mengatakan bahwa kalau kita pintar-pintar investasi mestinya bisa dapat *return* yang baik gitu ya tapi kami laporkan di sini bahwa dengan *size* seperti kami ini Bursa di Indonesia ini saya pikir likuiditasnya tidak terlalu baik artinya kami mungkin sudah terlalu besar dengan kondisi yang ada di pasar sehingga mungkin solusinya salah satunya adalah kalau bisa adalah kita diperbolehkan untuk melakukan investasi ke luar negeri misalnya jadi itu adalah salah satu solusinya.

Lalu mengenai KPR dari dari Pak Anas Thahir.

F-P. GOLKAR (DRS. H. DARUL SISKA):

Bu Ketua boleh interupsi sedikit Bu.

KETUA RAPAT:

Silakan Pak Darul.

F-P. GOLKAR (DRS. H. DARUL SISKA):

Pak Edwin tadi ada pikiran untuk melakukan investasi di luar?

DIREKTUR PENGEMBANGAN INVESTASI BPJS KETENAGAKERJAAN:

Iya Pak.

F-P. GOLKAR (DRS. H. DARUL SISKA):

Kendalanya kendala regulasi ya Pak ya?

DIREKTUR PENGEMBANGAN INVESTASI BPJS KETENAGAKERJAAN:

Betul Pak saat ini belum diperbolehkan Pak.

F-P. GOLKAR (DRS. H. DARUL SISKA):

Oke, makasih Pak.

KETUA RAPAT:

Lanjut Pak.

DIREKTUR PENGEMBANGAN INVESTASI BPJS KETENAGAKERJAAN:

Baik saya lanjutkan. Tadi dari Pak Anas Thahir menanyakan mengenai KPR atau program KPR yang kami miliki di BPJS Ketenagakerjaan, kami lakukan ini melalui nama programnya adalah manfaat layanan tambahan atau MLT memang MLT ini kami berikan KPR kepada peserta tapi melalui perbankan jadi tidak secara langsung jadi kami melakukannya melalui mitra perbankan dan saat ini mitra yang sudah melakukan tanda tangan PKS dan kami baru dua yaitu pertama adalah Bank BTN untuk Himbara dan untuk BPD adalah dengan Bank Bali.

Memang untuk MLT ini sebenarnya program lama tapi kita lakukan revitalisasi atau *re-launching* karena memang juga ada apa namanya permenaker yang baru yang mengatur MLT yang baru ini dimana lebih banyak kemudahan-kemudahannya lalu juga untuk penyalurannya tidak terbatas pada Himbara saja tapi juga menyertakan bank-bank daerah atau BPD. Jadi memang ini baru di *launch* dan kami berharap bahwa MLT ini bisa semakin baik dan lebih baik daripada program MLT yang sudah pernah kita *launch* sebelumnya. Mungkin demikian yang saya bisa tambahkan saya kembalikan kepada Pak Dirut dan Bu Pimpinan. Terima kasih.

DIREKTUR UTAMA BPJS KETENAGAKERJAAN:

Makasih Pak Edwin.

Untuk investasi tadi ada kebutuhan dukungan tadi seperti Pak Edwin sampaikan peraturan yang membolehkan ke luar negeri sama satu lagi mungkin ini Ibu Pimpinan yang selama ini pernah kita bahas adalah aturan atau *legal standing* untuk *cut loss* yang selama ini pernah kita bahas dan kita butuh aturan itu agar karena kita investasi kan ada di saham ya saham bisa naik bisa

turun dan di institusi manapun pada saatnya nggak punya instrumen saham dengan *return* yang tinggi juga dengan resiko yang tinggi ada mekanisme-mekanisme *cut loss* nah ini kita belum punya itu. Itulah yang kenapa pada waktu terakhir ini sering dibahas di media tapi sebenarnya lebih kepada kalau kita punya mekanisme *cut loss* itu maka kita bisa melakukannya dengan hati-hati dan *best practices* memang begitu jadi ada 2 mungkin yang terkait investasi.

Kalau tadi terkait dengan kepesertaan tadi Pak Zai sudah sampaikan beberapa kebutuhan dukungan, investasi saya tambahkan tentang *cut loss*. Itu terkait dengan investasi. Bu Oci bisa menambahkan lagi terkait layanan dan juga ada tentang JKP tadi ada beberapa pertanyaan, silakan.

DIREKTUR PELAYANAN BPJS KETENAGAKERJAAN (ROSWITA NILAKURNIA):

*Bismillahirrahmanirrahim
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

**Yang kami hormati Ibu Pimpinan Komisi IX dan Bapak Ibu Komisi IX anggota DPR RI,
Pak Dirut.**

Terkait dengan ada tadi pertanyaan dari Pak Shabul untuk kurva layanan dimana kita mengarahkan kepada arahnya digitalisasi tapi bukan berarti kita meninggalkan yang *on site* jadi yang kita kembangkan mungkin bisa digeser kurva halaman, halaman 5 ya di sini menjelaskan sebenarnya bukan kurva secara onlinenya itu mengalami penurunan artinya kalau kita di lihat di sini secara *on site* itu tetap berjalan sementara memang secara online itu sudah berganti dengan sebagian mengambil secara digital dan jadi artinya bukan berarti 100% kita mengarah kepada digital itu menjadi salah satu berbagai macam bentuk kanal dimana saat ini yang sudah ada adalah kanal fisik ataupun *on site* maupun dengan online yaitu yang kita kenal dulu sebenarnya sebagai lapak asik.

Dan yang sedang dikembangkan itu adalah mengarah kepada satu digital yang mengarahkan kepada menjadi nanti ke depan menjadi satu ekosistem untuk layanan dan juga manfaat yang lain-lain seperti tadi manfaat layanan tunai, mungkin juga *job service* dan sebagainya itu yang akan kami rencanakan sebagai bagian penambahan manfaat bagi peserta.

Nah kemudian terkait dengan masalah JKP jadi.

F-PAN (Drs. H. ASHABUL KAHFI, M.Ag.):

Sebentar dulu Bu, ndak maksud saya ini pilihan 2 opsi ini atau gimana Bu yang pasti ini kan onlinenya yang turun gitu kan.

DIREKTUR PELAYANAN BPJS KETENAGAKERJAAN:

Iya memang online turun.

F-PAN (Drs. H. ASHABUL KAHFI, M.Ag.):

On sitenya naik gitu kan.

DIREKTUR PELAYANAN BPJS KETENAGAKERJAAN:

Tapi berganti dengan yang merah Pak.

F-PAN (Drs. H. ASHABUL KAHFI, M.Ag.):

Nah ini artinya apa pilihan atau, pilihan kepada para nasabah untuk melakukan klaim kan kenapa mesti onlinenya yang turun justru *on sitenya* yang naik itu kan yang saya pertanyakan tadi.

DIREKTUR PELAYANAN BPJS KETENAGAKERJAAN:

Iya jadi memang terjadi pergeseran sebagian dari yang online itu mengambil secara otomatisasi dengan JEMO Pak secara digital jadi dimana prosesnya kalau yang online itu kombinasi *hybrid* jadi dia *upload* dokumen kemudian dilakukan verifikasi secara video dan juga apa namanya baru diproses secara mengikuti dengan tahapan-tahapan untuk pembayaran klaimnya, sementara yang merah itu secara otomatis tapi syaratnya harus ada pengkinian data dan juga apa biometrik sehingga memastikan untuk keabsahan dari sisi pemilik tabungan.

Yang sekarang kita lagi kerjakan untuk digitalisasi konsentrasinya kepada JHT karena sifatnya itu adalah *provident fund* atau sifatnya tabungan jadi menjawab juga tadi pertanyaan dari Ibu tentang beberapa ada *issue* kesulitan surat keterangan bekerja pada saat orang mengambil klaim ini sebenarnya juga kenapa *success rate* kita itu naik selain karena mengarah kepada digitalisasi tapi juga simplifikasi proses dimana karena sebenarnya penonaktifan pekerja itu juga sudah melalui sistem yang ada di kami oleh pemberi kerja melalui SIPPU Sistem Informasi tentang Pekerja yang dinonaktifkan oleh pemberi kerja jadi secara otomatis bisa kita lakukan pembayaran sehingga *success ratenya* bisa meningkat.

Kenapa kita bilang surat keterangan bekerja ini karena juga nanti yang tadi disinggung oleh Pak Dirut bila dilakukan dalam waktu dekat *Insyallah* penyesuaian Permenaker 19 2015 terkait dengan JHT masalah paklaring atau keterangan bekerja ini juga sudah sedang ditinjau oleh Kemenaker karena arah ke depan mengarah untuk cakupan kepesertaan yang sifatnya informal tentu ini juga dan mengarah kenapa tentunya surat keterangan bekerja yang sifatnya pekerja mandiri itu menjadi tidak mungkin tidak relevan lagi sebagai dasar makanya di sini mungkin penguatan di kami adalah *engagement* dan penguatan data dari sisi kepesertaan itu sendiri sebagai syarat klaim jadi individual IDnya Pak, Bu. Jadi ini yang kami lakukan terkait dengan apa

penyesuaian paklaring tersebut yang mengarah kepada digitalisasi di Jamsostek Mobile melalui biometrik. Kemudian itu kaitan dengan masalah digitalisasi.

F-PKS (Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si.):

Izin, izin Ketua.

KETUA RAPAT:

Silakan Bu Netty:

F-PKS (Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si.):

Sedikit saja menanggapi berarti ada yang harus direvisi ya Bu dari Permenaker Nomor 19.

DIREKTUR PELAYANAN BPJS KETENAGAKERJAAN:

Kenapa?

F-PKS (Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si.):

Tentang surat keterangan dari perusahaan itu.

DIREKTUR PELAYANAN BPJS KETENAGAKERJAAN:

Ya, paklaring ya.

F-PKS (Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si.):

Berarti harus ada yang direvisi dari Pemenaker?

DIREKTUR PELAYANAN BPJS KETENAGAKERJAAN:

Iya, iya, sekarang lagi harap harmonisasi mungkin akan dilakukan segera terkait dengan Pemenaker 19 ini.

F-P. GERINDRA (Ir. SRI MELIYANA):

Melalui Ketua.

KETUA RAPAT:

Silakan Bu Meli.

F-P. GERINDRA (Ir. SRI MELIYANA):

Izin Ketua. Kalau mengenai JMO itu ya Bu, JMO itu terbatas hanya untuk peserta yang sudah non aktif baik karena pensiun, meninggal dunia atau catat total tetap dengan saldo di bawah 10 juta.

DIREKTUR PELAYANAN BPJS KETENAGAKERJAAN:

Ya, untuk JMO.

F-P. GERINDRA (Ir. SRI MELIYANA):

Untuk JMO, oke. Kemudian hanya juga untuk WNI, untuk WNI, untuk WNA tidak bisa.

DIREKTUR PELAYANAN BPJS KETENAGAKERJAAN:

Kenapa?

F-P. GERINDRA (Ir. SRI MELIYANA):

Hanya untuk pekerja yang WNI.

DIREKTUR PELAYANAN BPJS KETENAGAKERJAAN:

Iya.

F-P. GERINDRA (Ir. SRI MELIYANA):

Hanya untuk.

DIREKTUR PELAYANAN BPJS KETENAGAKERJAAN:

Nggak pemilik daripada JHT Bu, jadi kan bisa itu kan ada WNI atau pekerja asing tapi rata-rata kan kalau kerja asing rata-rata saldonya di atas 10 juta.

F-P. GERINDRA (Ir. SRI MELIYANA):

Nah ini masalahnya Bu, masalahnya saya rasa ini menjawab pertanyaan Pak Kahfi tadi kalau yang di bawah 10 juta bisa dengan JMO di atas 10 juta tidak bisa padahal hari ini kita menggiatkan digital dan kemudian pandemi dan kemudian lain-lain hal sehingga seharusnya yang JMO itu lebih berjalan tapi karena limitnya di bawah 10 juta maka semakin banyak orang yang terpaksa pergi ke *site*.

DIREKTUR PELAYANAN BPJS KETENAGAKERJAAN:

Secara komposisi kami Bu dari rata-rata klaim yang JHT masih di angka 10 juta kebanyakan Bu karena memang kan posisinya bisa mengklaim JHT

tidak sampai usia pensiun saat ini berdasarkan peraturan jadi dengan berdasarkan yang klaim dari komposisi yang kita lihat itu rata-rata *engagement*nya baru mengikat pada kepesertaan 3 tahun atau 5 tahun terlebih pada saat masa pandemi kemarin yang mengklaim itu pada saat mereka baru terdaftar 2 tahun atau 3 tahun atau maksimal 5 tahun. Jadi secara *size* masih memang di bawah 10 juta. Jadi tahap awal pada saat kami *me-launching* untuk JMO ini baru limitasi pada *size* yang di 10 juta gitu jadi tidak tertutup kemungkinan untuk juga dilakukan penyesuaian.

F-P. GERINDRA (Ir. SRI MELIYANA):

Sudah Ketua, makasih.

KETUA RAPAT:

Baik, silakan dilanjutkan.

DIREKTUR PELAYANAN BPJS KETENAGAKERJAAN:

Iya, izin melanjutkan untuk JKP terkait dengan persiapan JKP ini kan sebagai operatornya adalah secara peraturan itu adalah kami dengan Kemenaker dimana sebagai pembayar untuk manfaat tuna JKP itu adalah dibayarkan melalui BPJS Ketenagakerjaan, sementara pelatihan vokasi ataupun pasar kerja itu ada di Kementerian Ketenagakerjaan namun sesuai dengan Permenaker dari turunan dari PP 37 sebagai tindak lanjut daripada program KJP ini di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu disampaikan bahwa aplikasi dibangun dalam SISNAKER Sistem Informasi Ketenagakerjaan yang ada di Kementerian Ketenagakerjaan.

Jadi yang kami lakukan tahap persiapannya karena memang akan *launching* jadi kita karena peraturan yang turunan daripada PP itu berjenjang munculnya pertama terkait dengan permenaker untuk rekomposisi iuran, pendaftaran, dan rekomposisi iuran dan juga manfaat, kemudian yang terakhir adalah permenkeu itu terkait dengan masalah dana awal dan juga porsi iuran dari pemerintah itu baru munculnya di Oktober. Jadi proses penyiapan itu terus berlangsung dari sejak mulainya dari permenaker di Juli untuk rekomposisi sampai sekarang sehingga kita membangun dalam aplikasi yang secara bersama antara BPJS Ketenagakerjaan dan juga Kemenaker.

Nah tahapan yang sedang dilanjutkan itu adalah tahapannya saat ini untuk sistem persiapan kita sudah berkolaborasi di setiap titik dikarenakan syarat untuk manfaat pertama itu kan syaratnya dari sisi kami adalah *eligible* sebagai peserta tentunya dengan datanya itu direkomposisi di rekonsiliasi dengan JKN itu tercatat sebagai peserta dan itu kita ada tanda sebagai bila memang tercatat sebagai peserta JKP.

Kemudian dari situ tahapannya *sorting*nya itu adalah calon penerima manfaat jadi itu ada di domain database kami, sementara syarat untuk pengajuan itu tergantung bahwa yang bersangkutan PHK sudah di *endorse*

dengan Disnaker ataupun mediator dan sebagainya secara dari sisi Kemenaker itu yang muncul dari sisi koordinasi kami.

Jadi tahapan berikut, jadi tahapan berikutnya kesiapannya kita itu yang lagi kita susun dan setelah pembayaran pertama baru masuk ke vokasi dan sebagainya, jadi kalau dibilang bahwa aplikasi kita siap sudah tahap *finish* untuk dijalankan jadi rencana akhir sebelum Februari akan dilakukan *launching*, Pak, Bapak, Ibu, untuk program JKP ini sosialisasi sudah kami lakukan, aturan-aturan yang mendasari karena setelah turunan dari undang-undang, PP, Permenaker, Permenkeu baru muncul di kami per ban dan per dir itu dalam proses akhir finalisasi sehingga nanti bisa siap *launching* untuk dijalankan.

Jadi kalau ditanya bagaimana kesiapannya, kami terus berkoordinasi secara intens dengan Kemenaker karena dalam rangkaian prosesi KP itu memerlukan koordinasi antara pihak kami dengan pihak Kemenaker karena Kemenaker sebagai pelaksana untuk pengantar kerja di pasar kerja dan juga pelaksana untuk vokasi, sementara pembayaran manfaat adalah oleh pihak BPJS Ketenagakerjaan. Itu mungkin dari saya Bapak Ibu, saya kembalikan Pak Anggoro.

DIREKTUR UTAMA BPJS KETENAGAKERJAAN:

Baik, terima kasih Bu Oci.

Selanjutnya Pram bisa menambahkan tadi ada pertanyaan dari Bu Meliyana juga tentang kesehatan, mana yang sehat, mana yang nggak sehat. Tadi Bu Arzeti juga tanya mengenai indikator tadi ya Bu Arzeti ya mengenai kesehatan, mungkin Pak Pram bisa menjelaskan.

DIREKTUR PERENCANAAN STRATEGIS DAN INVESTASI BPJS KETENAGAKERJAAN (PRAMUDYA IRIAWAN BUNTORO):

Bismillah

Izin Pimpinan sidang.

**Kemudian Anggota Dewan Komisi IX yang kami Hormat,
Pak Dirut, Pak Anggoro.**

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Izin menyampaikan beberapa terkait dengan tadi pertanyaan mengenai.

F-PKB (HJ. NUR NADLIFAH, S.AG., M.M.):

Izin Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Silakan Bu Nadlifah.

F-PKB (HJ. NUR NADLIFAH, S.AG., M.M.):

Mungkin mic-nya dideketin Pak biar kita dengar Pak.

DIREKTUR PERENCANAAN STRATEGIS DAN INVESTASI BPJS KETENAGAKERJAAN:

Maaf, iya, makasih.

Jadi terkait dengan tadi apakah rasio likuiditas yang seperti apa sih yang disebut rasio likuiditas yang baik ya Bu ya. Kalau terkait rasio likuiditas makin tinggi angkanya makin baik rasio likuiditas, rasio likuiditas ini menunjukkan kemampuan badan untuk membayarkan kewajiban-kewajiban jangka pendek. Nah terkait dengan ini dari kalau kita lihat 4 program yang ada dari JKK, JKM, JHT, dan JP memang kita lihat rasio likuiditas JKM ini masih di bawah 100% artinya kemampuan dana jaminan sosial kematian ini untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya hanya 82% dan ini memang kita tunjukkan selain rasio likuiditas juga ada ratio claim yang saat ini menunjukkan rasio claimnya di atas 100%, artinya iuran yang diterima di tahun yang sama itu tidak cukup untuk memenuhi pembayaran manfaat.

Namun demikian dana jaminan sosial kematian ini kita masih punya ruang sehingga nanti ada rasio satu lagi disebut rasio kesehatan keuangan bahwa resiko kesehatan keuangan dana jaminan sosial kematian ini kita bisa membayarkan manfaat sampai dengan 39 bulan ke depan. Nah ini mungkin parameter-parameter terkait dengan kesehatan keuangan salah satunya likuiditas, kemudian rasio claim dan kesehatan keuangan diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2015.

Izin untuk tadi meneruskan terkait dengan indikator-indikator apa saja yang menjadi alat ukur kinerja untuk BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan yang ada di Per BPJS Nomor 2 Tahun 2021, sudah ditetapkan indikator apa saja yang menjadi alat ukur kinerja untuk BPJS Tenaga Kerja. Di sana ada 40 indikator yang terbagi dalam 4 perspektif, baik itu perspektif keuangan, peserta, proses internal, maupun pertumbuhan pembelajaran.

Dan terkait dengan bagaimana mengukurnya tadi ditanyakan juga oleh Anggota Dewan bahwa terkait dengan tata cara pengukuran kinerja ini juga diatur dalam peraturan BPJS tersebut terkait dengan (4:38:32) atau bagaimana mengukur kinerja di BPJS Ketenagakerjaan ini.

Jadi ada dari, dari 40 indikator itu kurang lebih kami kelompokkan ada terkait dengan tingkat imbal hasil, dana jaminan sosial masing-masing dana jaminan sosial baik itu JKK, JKM, JHT, dan JP, kemudian juga terkait dengan rasio claim, terkait dengan indikator cakupan kepesertaan dan tingkat kepuasan peserta, kemudian ratio kolektibilitas iuran, kemudian (4:38:57) *lecturer agreement* dari layanan masing-masing program baik JKK, JKM, JHT, dan JP dan yang lain-lain terkait dengan kesiapan organisasi dalam menjalankan kegiatan-kegiatan operasional seperti *strategic job readiness*

index, employee engagement, indeks tata kelola, dan lain sebagainya. Jadi kurang lebih seperti itu ada 40 indikator yang menjadi referensi ukuran untuk kinerja BPJS Ketenagakerjaan. Mungkin demikian Pak, Bapak, Ibu Anggota Dewan dan Pak, saya kembalikan ke Pak Anggoro, terima kasih.

F-P. GERINDRA (IR. SRI MELIYANA):

Melalui Ketua.

KETUA RAPAT:

Silakan Bu Meli.

F-P. GERINDRA (IR. SRI MELIYANA):

Pak, saya mau tanya aja apakah rasio likuiditas JKM yang hanya 82,27% itu aman?

DIREKTUR PERENCANAAN STRATEGIS DAN INVESTASI BPJS KETENAGAKERJAAN:

Kalau 80% saya bilang belum cukup aman Bu sehingga nanti dalam konteks pengelolaan dananya harus dilakukan perubahan buat penyesuaian. Artinya kalau di sini dana liquid kita hanya 80% dari kebutuhannya sehingga harus menyediakan paling tidak 100% sehingga nanti dalam konteks pengelolaan asetnya tentunya harus ada aset yang direalokasikan ke aset-aset yang sifatnya liquid. Kalau dalam konteks aset besarnya Bu kita masih punya kemampuan tadi kemampuan kita sampai 39 bulan pembayaran manfaat. Kurang lebih seperti itu Bu.

F-P. GOLKAR (DRS. H. DARUL SISKI):

Bu, Ketua.

KETUA RAPAT:

Silakan Pak Darul.

F-P. GOLKAR (DRS. H. DARUL SISKI):

Iya, saya mewakili pekerja Pak.

Maksud saya pertanyaan Bu Meli tadi itu kan saya ingin melanjutkan kan 82% dari kemampuan yang mestinya 100% gitu ya Pak ya, nah nanti kan Bapak bilang secara keseluruhan masih aman masih bisa direalokasi dari dana yang lain. Apakah itu juga adalah kendala regulasi kemudian pada tingkat perpres atau tingkat kepmen gitu atau internal saja regulasinya untuk merealokasi memenuhi kebutuhan JKM itu, makasih.

KETUA RAPAT:

Silakan, Pak.

DIREKTUR UMUM DAN SDM BPJS KETENAGAKERJAAN (ARDUR RAHMAN IRSYADI):

Secara umum nggak ada kendala regulasi Pak tapi kita portofolionya karena ada ketentuan OJK yang kita harus punya 50% di surat hutang yang surat hutang itu sifatnya lebih ke *longterm* ya Pak ya, *middle* sama *longterm* sehingga kita lihat portofolionya seperti apa tapi secara umum tidak kendala-kendala regulasi yang, yang menyebabkan kita tidak bisa melakukan perubahan alokasi tersebut. Makasih Pak.

KETUA RAPAT:

Lanjut Pak Anggoro masih ada lagi.

DIREKTUR UTAMA BPJS KETENAGAKERJAAN:

Baik, baik, terima kasih.

Pak Ari tadi terkait dengan kepegawain tadi, silakan.

DIREKTUR UMUM DAN SDM BPJS KETENAGAKERJAAN:

Baik, terima kasih.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Deketin Pak biar bisa dengar.

DIREKTUR UMUM DAN SDM BPJS KETENAGAKERJAAN:

Iya.

Bapak, Ibu yang terhormat anggota DPR RI yang kami hormati.

Terkait dengan pertanyaan dari Bu Kurniasih.

KETUA RAPAT:

Bapak dekatan lagi pengeras suaranya.

DIREKTUR UMUM DAN SDM BPJS KETENAGAKERJAAN:

Iya, terkait dengan pertanyaan dari Bu Kurniasih tadi menanyakan bahwa bagaimana dengan status karyawan *outsourcing* di BPJS

Tenagakerjaan. Setahu kami Bu, itu sudah selesai di tahun 2020 jadi sampai saat ini kami untuk kaitan dengan *case* yang terdahulu sudah tidak ada lagi, sudah tidak ada lagi Bu. Sudah iya, iya, kalau *outsourcing* itu untuk yang *cleaning service* itu dengan pihak ketiga Bu yang karyawan tetap yang untuk yang *core* nggak ada, nggak ada, nggak ada, iya udah selesai, udah selesai.

Jadi itu kasusnya sebagian itu sudah iya, kita sudah selesaikan Bu, kita udah selesaikan jadi itu udah kita rumah apa sudah kita kasih pesangon kemudian yang sisanya itu kita sudah pekerjakan ke anak usaha seperti itu. Saya rasa itu Bu, makasih.

DIREKTUR UTAMA BPJS KETENAGAKERJAAN:

Ibu Pimpinan, sementara itu yang dapat kami sampaikan beberapa data yang ter yang detail akan sampaikan tertulis dari mulai komposisi (4:43:09) sama yang tertulis. Terima kasih.

F-P. GERINDRA (IR. SRI MELIYANA):

Melalui Ketua.

KETUA RAPAT:

Silakan, Bu Meliyana.

F-P. GERINDRA (IR. SRI MELIYANA):

Pak yang tadi tentang dana operasional.

DIREKTUR UTAMA BPJS KETENAGAKERJAAN:

Menambahkan, silakan.

DIREKTUR KEUANGAN BPJS KETENAGAKERJAAN (ASEP RAHMAD SUWANDAHA):

Izin.

KETUA RAPAT:

Silakan, Pak.

DIREKTUR KEUANGAN BPJS KETENAGAKERJAAN:

Yang terhormat Ibu Pimpinan dan Bapak Ibu Anggota Dewan Komisi IX.

Izin menyampaikan bahwa untuk dana operasional yang sudah kita gunakan untuk tahun 2021 seperti yang disampaikan Pak Anggoro tadi adalah 4,4 triliun dari angka 4,66 jadi sekitar penyerapannya adalah 94,5%. Kemudian angka 4,4 itu adalah dibandingkan dengan tahun sebelumnya itu ada

peningkatan sebesar 12,82% yang sebagian besar tentu di, disebabkan oleh adanya peningkatan di beberapa belanja yang tetap seperti belanja pegawai.

Kemudian menginformasikan juga bahwa anggaran untuk tahun 2022 itu mengalami penurunan dibandingkan anggaran tahun 2021 yaitu angkanya sebesar 4,52 triliun dari anggaran sebelumnya 4,66 triliun. Jadi di sini untuk tahun 2022 di masa kepemimpinan kami, kami sangat berkomitmen untuk mengajukan anggaran yang betul-betul sangat efisien ya di beberapa anggaran-anggaran yang kami anggap tidak perlu atau bisa kita efisienkan itu kita bisa lakukan efisienkan. Ini komitmen kami.

Terkait dengan tadi ada pertanyaan berapa aset BPJS saat ini dan juga aset DJS per 31 Desember yang sekarang sudah kami keluarkan laporan unauditnya itu untuk aset BPJS sendiri mengalami peningkatan sebesar saat ini menjadi 16,16 triliun, kemudian aset DJS sendiri tadi sudah disampaikan sebesar per 31 Desember 2021 sebesar.

F-P. GOLKAR (DRS. H. DARUL SISKA):

Ibu, Ketua.

KETUA RAPAT:

Iya silakan, Pak Darul.

F-P. GOLKAR (DRS. H. DARUL SISKA):

Iya Pak, ini karena menyangkut angka.

DIREKTUR KEUANGAN BPJS KETENAGAKERJAAN:

Iya Pak.

F-P. GOLKAR (DRS. H. DARUL SISKA):

Di samping penjelasan lisan ini kita butuh tertulis Bu.

DIREKTUR KEUANGAN BPJS KETENAGAKERJAAN:

Siap.

F-P. GOLKAR (DRS. H. DARUL SISKA):

Ini telinga kita juga mulai.

KETUA RAPAT:

Iya, iya.

F-P. GOLKAR (DRS. H. DARUL SISKA):

Nggak tajam ini.

KETUA RAPAT:

Pak Darul, nanti disertakan jawabannya tertulis atau Pak Darul mu lihat sekarang untuk bisa ditampilkan, bisa ditampilkan Bapak?

DIREKTUR KEUANGAN BPJS KETENAGAKERJAAN:

Ada nggak, ada laporan unaudit nggak?

KETUA RAPAT:

Oh.

DIREKTUR KEUANGAN BPJS KETENAGAKERJAAN:

Mungkin nanti kami bisa sampaikan Pak laporan unauditnya Pak karena ini baru selesai dengan proses dengan kantor akuntan publiknya Pak, mohon izin.

KETUA RAPAT:

Berarti nanti dilampirkan.

DIREKTUR KEUANGAN BPJS KETENAGAKERJAAN:

Iya, siap.

KETUA RAPAT:

Baik, lanjut Pak.

DIREKTUR UTAMA BPJS KETENAGAKERJAAN:

Baik Bu nanti kita bisa sampaikan juga, tadi disampaikan Pak Asep laporan unauditnya karena auditednya akan selesai di akhir Februari jadi awal Maret sudah audited sekarang sudah ada yang unaudit tapi sudah ada laporannya.

Darul Siska tadi saya maaf, Pimpinan tadi saya lupa yang Ibu nanyakan terkait dengan informasi hak pensiun untuk JHT saat ini di Jamsostek Mobile itu sudah bisa dilihat langsung Bu berapa saldo JHT pekerja setiap saat dia bisa lihat langsung.

Lalu yang emailnya terdaftar mereka juga bisa melihat dari *by* email karena kita kirim juga melalui email berapa saldo mereka sehingga mereka bisa

memonitor juga berapa pengembangannya yang mereka dapatkan di setiap bulannya.

Tadi menambahkan keterangan Bu Oci tadi yang di *slide* tadi itu ada Jamsostek Mobile, ada online itu maksudnya adalah yang dengan handphone, dengan website, dan yang datang ke cabang jadi 3 *channel* itu sekarang mulai tergantikan dengan yang handphone tetapi di handphone kita bisa lihat langsung saldo ada di situ langsung, jadi peserta bisa langsung lihat tanpa harus datang ke cabang. Itu mungkin Bu beberapa informasi yang harus, harus sehingga dapat selain memang di website kami juga setiap selesai laporan tahunan akan ada di website laporan tahunan yang audited ada di website juga tahun terakhir tahun 2020 berarti, 2021 akan muncul di bulan Maret. Demikian, Bu Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih jawaban yang diberikan.

F-P. GOLKAR (DRS. H. DARUL SISKA):

Bu Ketua, Bu Ketua kelihatannya cenderung mau ke kesimpulan ya.

KETUA RAPAT:

Nggak juga karena tadi sudah disampaikan kalau mau dijawab lagi secara tertulis dan data-data yang dibutuhkan akan dilampirkan tapi kalau ada yang mau ditanyakan silakan Pak Darul, iya biar *clear*.

F-P. GOLKAR (DRS. H. DARUL SISKA):

iya, Ibu Ketua hanya *meremind* saja.

KETUA RAPAT:

Iya, silakan.

F-P. GOLKAR (Drs. H. DARUL SISKA):

Hal-hal yang menyangkut angka-angka tadi Pak tolong dana operasionalnya juga dan catatan saya efisien penting Pak tapi kalau Bapak mau nangkap ikan besar jangan umpannya cacing Pak, nah maksud saya terkait dengan peningkatan jumlah peserta jadi harus ada upaya-upaya yang lebih *huge* gitu loh Pak agar pesertanya bisa mencapai target yang 38 juta itu Pak. Nah jadi maksud saya efisien sih efisien tapi jangan juga mengurangi efektifitas. Makasih, Bu Ketua.

KETUA RAPAT:

Makasih Pak Darul.

F-PKB (H. HARUNA, M.A., M.B.A.):

sedikit Bu Ketua, sedikit.

KETUA RAPAT:

Silakan Pak Haruna.

F-PKB (H. HARUNA, M.A., M.B.A.):

Makasih Pak. Yang kami tanyakan ke anu Pak investasi tadi, Pak Direktur Investasi, ini properti 0,45 Pak apa penyebabnya sehingga di bawah 1% dan berapa target untuk komposisi perspektif ya, jadi pertama apa penyebabnya cuma 0,45 dan berapa target yang sesuai dengan standar yang telah ditentukan untuk anggaran apa ini pandangannya di properti. Makasih Pak.

ANGGOTA KOMISI IX DPR RI:

Ibu Pimpinan, mohon maaf.

KETUA RAPAT:

Pak Haruna, sebentar ya yang dari virtual. Mungkin butuh respon apa yang disampaikan oleh Pak Haruna, Pak Anggoro, siapa yang bisa merespon.

DIREKTUR UTAMA BPJS KETENAGAKERJAAN:

Baik, Bu Pimpinan, terima kasih.

Pak Haruna biasanya favoritnya ke Pak Edwin Bu jadi Pak Edwin yang ngejawab. Silakan Pak Edwin.

DIREKTUR PENGEMBANGAN INVESTASI BPJS KETENAGAKERJAAN:

Izin Pak Dirut.

Baik, Pak Haruna terima kasih pertanyaannya. Jadi memang untuk investasi langsung dan properti itu saat ini masih sangat kecil 0,45% dari data kita. Ke depan rencana kita adalah kita akan meningkatkan porsi tersebut dan maksimalnya adalah 5% tadi juga ada Pak Edy Wuryanto tadi mengatakan bahwa untuk penempatan investasi langsung itu disebutkan lewat LPI gitu ya tapi mungkin saya luruskan di sini bahwa kita tidak punya rencana untuk menempatkan melalui LPI tapi kita melakukan *co-investment* atau investasi bersama-sama.

Lalu juga kenapa kita tingkatkan investasi langsung ini adalah karena salah satunya adalah untuk penciptaan lapangan pekerjaan juga gitu ya selain untuk meningkatkan imbal hasil karena memang untuk investasi langsung ini

bentuknya adalah penyertaan di perusahaan-perusahaan tertutup sebagian besar selain properti.

Jadi menjawab pertanyaan Pak Haruna, memang saat ini masih 0,45% alokasinya tapi ke depan itu kita akan tingkatkan dan maksimalnya adalah di angka 5% dari dana kelolaan Pak.

F-PKB (H. HARUNA, M.A., M.B.A.):

Makasih Pak, makasih Pak.

KETUA RAPAT:

Baik, Bapak Ibu.

F-PDIP (RAHMAD HANDOYO, S.Pi., M.M.):

Sedikit dari virtual Pimpinan, saya nggak bertanya cuma hanya menyampaikan sedikit.

KETUA RAPAT:

Oh dari virtual Pak.

F-PDIP (RAHMAD HANDOYO, S.Pi., M.M.):

Rahmad Handoyo.

KETUA RAPAT:

Rahmad Handoyo ya, kami persilakan Pak Rahmad.

F-PDIP (RAHMAD HANDOYO, S.Pi., M.M.):

Baik, Ibu Pimpinan terkait dengan jawaban terima kasih cuma nanti saya minta jawaban untuk disampaikan ke Komisi, terkait dengan program kerja kaitan dengan anggaran untuk ditampilkan kepada Komisi rinciannya untuk dipergunakan untuk apa saja ya per, per direktorat, kemudian direktorat mana saja, berapa kemudian kita bisa melihat mengukur apa namanya berapa sehingga kita bisa ikut memberikan masukan-masukan ke depannya. Begitu saja, Pimpinan. Makasih, nggak perlu jawaban tapi perlu disampaikan ke kita gitu. Makasih.

KETUA RAPAT:

Kembali Pak.

Baik, Bapak Ibu.

Hari ini kita sudah membahas evaluasi kinerja tahun 2021 dan pembahasan program kerja BPJS Ketenagakerjaan di dalamnya tentang peningkatan investasi, pelayanan klaim, dana operasional, dan lain sebagainya, dan ada yang paling terakhir dari Pak Darul Siska efisien boleh kata Pak Darul tapi jangan mengurangi efektivitas ya. Kita butuh tentunya permintaan dari anggota jawaban-jawaban dan tentunya lampiran-lampiran yang dibutuhkan kita masuk ke kesimpulan sementara, boleh ditampilkan.

Draf kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI dengan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan pada hari Kamis 20 Januari 2022.

1. Demi meningkatkan perlindungan jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan, Komisi IX DPR RI mendesak untuk:
 - a. Meningkatkan upaya terobosan strategi perluasan kepesertaan dengan melakukan kerja sama dengan para *stakeholder* baik pekerja formal maupun informal termasuk pekerjaan non ASN di lingkungan kementerian lembaga;
 - b. Mensosialisasikan secara masif kepada masyarakat tentang penggunaan manfaat layanan ketenagakerjaan dari BPJS Ketenagakerjaan;
 - c. Membangun skema dan terobosan dalam rangka mengatasi korban PHK yang sedang terjadi; dan
 - d. Meningkatkan rasa kepedulian terhadap, terhadap kebencanaan dan kearifan lokal; dan
 - e. Mengalokasikan program CSR BPJS Ketenagakerjaan yang digunakan untuk kepentingan peserta.

Bapak, Ibu, Pimpinan, anggota.

Boleh dilihat lagi poin 1 a sampai dengan e apakah ada tambahan, penyempurnaan, dan lain sebagainya kami persilakan. Nggak, untuk poin a bagaimana Bapak Ibu sekalian?

F-PKB (H. HARUNA, M.A., M.B.A.):

Permisi Bu, barangkali c bisa ditambah sedikit Bu. Itu PHK ada sekarang istilah PHK, perumahkan juga itu kan PHK juga merumahkan.

KETUA RAPAT:

A Itu yang.

F-PKB (H. HARUNA, M.A., M.B.A.):

Cuma PHK, itukan merumahkan PHK apa ya PHK mini.

KETUA RAPAT:

Yang mengatas.

F-PKB (H. HARUNA, M.A., M.B.A.):

Merumahkan ditambah merumahkan di situ.

KETUA RAPAT:

Mungkin di bagian d ya sudah iya. Tapi yang a dulu Bapak Ibu, bagaimana?

F-PKB (H. HARUNA, M.A., M.B.A.):

Saya rasa a oke.

KETUA RAPAT:

A sudah setuju?

F-PKB (H. HARUNA, M.A., M.B.A.):

Oke.

KETUA RAPAT:

Baik.

(RAPAT: SETUJU)

B.

ANGGOTA KOMISI IX DPR RI:

B ditambah dan, mensosialisasikan secara masif pada masyarakat tentang penggunaan dan manfaat layanan ketenagakerjaan dari BPJS Ketenagakerjaan.

KETUA RAPAT:

Iya dan manfaat.

ANGGOTA KOMISI IX DPR RI:

Ditambah dan kata sambung dan.

KETUA RAPAT:

Koma dan manfaat. Komanya hilang kalau begitu.

F-P. NASDEM (IRMA SURYANI, S.E.):

Interupsi, interupsi Ketua.

KETUA RAPAT:

Silakan Bu Irma.

F-P. NASDEM (IRMA SURYANI, S.E.):

Mohon maaf Ketua mungkin soal CSR perlu Komisi IX mendorong BPJS Tenagakerja untuk bisa punya CSR.

KETUA RAPAT:

Iya.

F-P. NASDEM (IRMA SURYANI, S.E.):

Saya kira itu perlu masuk Ketua.

KETUA RAPAT:

Itu di bagian e, 1e mengalokasikan.

F-P. NASDEM (IRMA SURYANI, S.E.):

Oke, oke, *thank you, thank you.*

KETUA RAPAT:

Baik. B bagaimana Bapak Ibu? Setuju?

(RAPAT: SETUJU)

C. Mungkin di bagian d sudah terakomodir Pak coba lihat. C oke.

F-PKB (HJ. NUR NADLIFAH, S.AG., M.M.):

Saya rasa c ini skema dan terobosan dalam rangka mengatasi korban PHK ini maksudnya apa ya.

KETUA RAPAT:

Bagaimana Bu Nadlifah.

F-PKB (HJ. NUR NADLIFAH, S.AG., M.M.):

Kalau kepesertaannya kan sudah ada, terobosan mengatasi korban PHK apanya yang diatasi, coba.

KETUA RAPAT:

Mau di *drop*?

F-PKB (HJ. NUR NADLIFAH, S.AG., M.M.):

Saya rasa di *drop* itu.

F-PKB (HJ. NUR NADLIFAH, S.AG., M.M.):

Jadi c di *drop* ya, oke. Bagaimana dengan yang d jadi c sekarang?

F-P. GERINDRA (IR. SRI MELIYANA):

Pimpinan, itu kebencanaan kenapa nggak diganti bencana aja. Meningkatkan rasa kepedulian.

F-PKB (HJ. NUR NADLIFAH, S.AG., M.M.):

Saya rasa c dan d itu senada, senafas itu.

KETUA RAPAT:

Jadi yang c *drop* juga?

F-PKB (HJ. NUR NADLIFAH, S.AG., M.M.):

C itu nggak perlu menurut saya.

KETUA RAPAT:

Oke.

F-P. GERINDRA (IR. SRI MELIYANA):

Yang c itu.

KETUA RAPAT:

Sudah, sudah hilang.

F-P. GERINDRA (IR. SRI MELIYANA):

Itu masuk ke TJSL ya, harus meningkatkan TJSL harusnya kalau mau b itu di, di, loh kok udah ilang satu.

KETUA RAPAT:

Yang mana Bu Meli.

F-P. GERINDRA (IR. SRI MELIYANA):

Kepedulian terhadap kejadian bencana dan kearifan lokal ini, BPJS Tenagakerja ini sudah ada programnya namanya TJSL. Nah ini yang harus ditingkatkan ini masih sangat kecil memang, nah ini yang perlu ditingkatkan dari saya begitu Ketua.

KETUA RAPAT:

Baik, coba TA sempurnakan kalimatnya.

F-P. GERINDRA (IR. SRI MELIYANA):

Meningkatkan alokasi dana TJSL pada, udah, iya sehingga lebih peduli terhadap lingkungan dan lain-lain tadi.

ANGGOTA KOMISI IX DPR RI:

Itu 7, kurung tutupnya belum tuh.

KETUA RAPAT:

Yang c coba dibaca dilihat lagi Bapak Ibu. Setuju meningkatkan alokasi dana program TJSL.

(RAPAT: SETUJU)

Bagian d, dan d mengalokasikan program CSR. 1 d bagaimana Bapak Ibu setuju ya.

(RAPAT: SETUJU)

Sekarang untuk poin 2.

2. Komisi IX DPR RI mendesak BPJS Ketenagakerjaan melakukan percepatan transformasi digital dan penguatan teknologi informasi.

Gimana Bapak, Ibu? Normatif atau bagaimana itu untuk poin itu, poin 2 setuju? sebelah kiri saya, bagaimana Bapak, Ibu?

ANGGOTA KOMISI XI DPR RI:

Kalau, kalau dari paparan Pak Dirut tadi ini jadi program unggulan apa BPJS jadi artinya normatif nggak, nggak perlu ada.

F-P. GERINDRA (IR. SRI MELIYANA):

Dengan sendirinya mereka akan lakukan itu Ketua.

KETUA RAPAT:

Jadi di *drop* aja.

F-P. GERINDRA (IR. SRI MELIYANA):

Jadi tidak perlu percantum secara implisit di dalam kesimpulan.

KETUA RAPAT:

Tidak perlu kita, di *drop* aja ya. Oke, lanjut.

Komisi IX DPR RI mendesak BPJS Ketenagakerjaan mempersiapkan dan antisipasi terkait dengan risiko kesehatan keuangan dan investasi jangka pendek dan jangka panjang atas pengelolaan aset BPJS Ketenagakerjaan dan aset dana jaminan sosial. Gimana? Bagaimana?

Poin ke-2 Bapak, Ibu sekalian. Bu Alia, setuju?

F-P. NASDEM (IRMA SURYANI, S.E.):

Ketua, maaf Ketua.

KETUA RAPAT:

Bu Irma, silakan.

F-P. NASDEM (IRMA SURYANI, S.E.):

Menurut saya yang nomor 2 ini lebih kepada BPJS itu harus hati-hati aja dalam berinvestasi, risknya aja, kalau itu kayaknya nggak perlu juga deh.

F-PKS (Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si.):

Izin Ketua.

KETUA RAPAT:

Silakan Bu Netty.

F-PKS (Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si.):

Pada beberapa rapat yang lalu kan juga sudah ada tuh tema tentang investasi mungkin coba dilihat agar *in line* dengan keputusan rapat sebelumnya.

F-P. NASDEM (IRMA SURYANI, S.E.):

Itu udah ada Teh.

KETUA RAPAT:

Di *drop* aja ya.

F-P. NASDEM (IRMA SURYANI, S.E.):

Di *drop* aja karena hasil keputusan yang lalu juga sudah ada kata Mbak Netty jadi di *drop* aja.

KETUA RAPAT:

Oke, yang lalu juga sudah ada seperti ini ya. Baik.

F-PKS (Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si.):

Kalaupun mau, kalaupun mau tetap ada harus sinkron dengan kita kan juga harus mengingatkan berkali-kali di setiap kesimpulan harus disinkronkan.

KETUA RAPAT:

Oke sambil itu dilihat untuk disinkronkan kita ke poin ini ya.

Komisi IX DPR RI meminta BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan data terkait:

- a. Rincian Pemerintah Daerah yang telah mengeluarkan aturan dalam rangka tindak lanjut Inpres Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
- b. Akumulasi dana nasabah yang belum definitif;
- c. Rincian dana operasional BPJS Ketenagakerjaan;
- d. Rencana kerja dan portofolio program kerja BPJS Ketenagakerjaan.

F-PKS (Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si.):

Izin, izin Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Silakan Bu Kurniasih.

F-PKS (Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si.):

Maaf, maaf sebelum ke nomor ini tentang investasi. Mungkin kalimatnya perlu di reminder aja ya. Mengingatkan kembali, Komisi IX mengingatkan kembali kepada BPJS Ketenagakerjaan tentang kesimpulan pada rapat tanggal sekian, poin sekian mengenai tata kelola investasi misalnya seperti itu. Gimana?

F-P. NASDEM (IRMA SURYANI, S.E.):

Kalau gini Ketua, saya bacain aja Ketua ya, saya bacain ya.

Kesimpulan di, di tanggal 4 Oktober 2021 itu Komisi IX DPR RI mendesak BPJS Ketenagakerjaan untuk mengambil langkah yang mempertimbangkan kehati-hatian, keamanan, dan dana yang, keamanan dana dengan hasil investasi memadai dan menghindari penempatan investasi yang berpotensi menimbulkan kerugian. Nah daritadi kan saya bilang kan bahwa jangan yang beresiko tinggi yang *high risknya* itu mesti di hati-hatiin itu aja. Ini sudah ada jadi dimasukkan lagi kesimpulan ini karena itu memang penting bagi kita untuk mengingatkan kawan-kawan di BPJS Tenagakerja. Saya kira itu Ketua, makasih Ketua.

KETUA RAPAT:

Baik.

F-PKS (Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si.):

Menambahkan sedikit Ketua.

KETUA RAPAT:

Silakan Bu Kurniasih.

F-PKS (Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si.):

Jadi kalau yang saya tanyakan itu ya selain memang kita mengingatkan kembali tadi disampaikan oleh Bu Irma terima kasih sudah dibacakan reminder kembali kepada kesimpulan sebelumnya, tadi juga di dalam presentasi.

ANGGOTA KOMISI IX DPR RI:

Interupsi ya.

F-PKS (Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si.):

Detail masalahnya ya kan, kita kan nggak dapat informasi apapun dari sini tentang investasi cuma kesimpulan aja bahwa investasi berjalan baik, nah baiknya tuh seperti apa gitu. Nah ini mungkin perlu, perlu diberikan juga informasi perkembangan tata kelola investasinya tuh ke kita secara tertulis nanti.

F-P. NASDEM (IRMA SURYANI, S.E.):

Izin Ketua, mungkin itu bisa dimasukan ke poin apa ke nomor 4 ya poin yang kita minta untuk disampaikan dalam bentuk tertulis.

KETUA RAPAT:

Iya dan memang di, di kesimpulan itu ada, ada kesepakatan bahwa nanti 6 bulan, 6 bulan sekali laporan tertulis tentang program investasi bisa diberikan

kepada Komisi IX jadi selain kepada publik tentunya yang harus diberikan juga tentu kita sudah kemarin sudah sepakat 6 bulan sekali diberikan pada Komisi, tinggal nanti coba di, di apa diperkuat lagi dengan kesimpulan 4 Oktober.

Jadi ini Bu Felly tadi pertegas lagi kalau kita hitung 6 bulan tu dari bulan Oktober berarti 6 bulan setelah bulan Oktober bulan April berarti ya karena karena nanti April Pak Dirut nanti diberikan progress tertulis saja tentang investasi kita yang sudah berjalan, kemana, dimana, dan bagaimana hasilnya.

Bacakan ya Nomor 2 ya, ini masih di Komisi IX, Komisi IX DPR RI mengingatkan kembali hasil kesimpulan pada RDP ya pada RDP tanggal 4 Oktober 2021 tentang langkah, RDP pada 4 Oktober 2021 tentang langkah investasi yang mempertimbangkan kehati-hatian, keamanan dana dengan hasil investasi yang memadai, dan menghindari penempatan investasi yang potensial menimbulkan kerugian, dan memberikan laporan investasi secara periodik 6 bulan sekali mulai pada April 2022, dan memberikan laporan investasi secara periodik kepada Komisi IX, 6 bulan sekali kepada Komisi IX mulai pada bulan April 2022. Oke ya.

F-P. GERINDRA (IR. SRI MELIYANA):

Ketua, Ketua.

KETUA RAPAT:

Silakan, Bu.

F-P. GERINDRA (IR. SRI MELIYANA):

Memberikan laporan investasi secara periodik 6 bulan sekali itu sama saja dengan memberikan laporan per semester ya kan, singkatnya per semester.

KETUA RAPAT:

Oke.

F-P. GERINDRA (IR. SRI MELIYANA):

Jadi setiap semester setiap semester pada, pada laporan keuangan mereka.

KETUA RAPAT:

Karena kita hitungnya dari mulai Oktober keputusan jadi mulainya berarti April?

F-P. GERINDRA (IR. SRI MELIYANA):

Iya pokoknya per semester pada laporan keuangan mereka gitu.

KETUA RAPAT:

Dan memberikan laporan tu huruf kecil, titiknya hilang, oke. Poin kedua setuju?

F-PKS (Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si.):

Izin Ketua, mungkin kalimatnya aja dibuat efektif ya dengan hasil investigasi yang memadai, menghindari penempatan sampai kerugian, baru dan. Makasih.

KETUA RAPAT:

Poin kedua sudah disetujui? Oke, kita ke poin ketiga.

Komisi IX DPR RI meminta kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan data terkait:

- a. Rincian Pemerintah Daerah yang telah mengeluarkan aturan dalam rangka tindak lanjut Inpres Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
- b. Akumulasi dana nasabah yang belum definitif.
- c. Rincian dana operasional BPJS Ketenagakerjaan.
- d. Rencana kerja dan portofolio program kerja BPJS Ketenagakerjaan.

Ini sudah seperti catatan teman-teman tadi atau ada yang masih kurang? Di tertulis, oke, berarti Pak Kamto langsung mau pindah keempat ini. Cuma nomor 3 dulu, 3 sudah setuju? 3 setuju? kalau 3 setuju berarti 4 (5:13:52) kita bahas Pak Sukamto sudah mendahului tadi. Oke, jadi di kita untuk kesimpulan di Komisi IX setuju ya.

(RAPAT: SETUJU)

Saya kembalikan sekarang kepada Pak Direktur Utama untuk menanggapi, silakan Pak.

DIREKTUR UTAMA BPJS KETENAGAKERJAAN:

Baik, terima kasih Bapak Pimpinan. Boleh digeser ke nomor 1, untuk nomor 1 yang 1a setuju, lalu 1b mungkin ada sedikit koreksi saja usul, mensosialisasikan secara masif pada masyarakat tentang manfaat program manfaat perlindungan program BPJS Tenagakerjaan karena kalau penggunaan lebih tepat ke manfaat tadi sempat banyak dibahas mengenai manfaat jadi fokus ke manfaat. Jadi sosialisasi masif (5:14:50) tentang manfaat dari, gini, mungkin manfaat dari program jaminan sosial ketenagakerjaan. Itu mungkin lebih, lebih *direct*.

KETUA RAPAT:

Oke, jadi program.

DIREKTUR UTAMA BPJS KETENAGAKERJAAN:

Jaminan sosial ketenagakerjaan.

KETUA RAPAT:

Jaminan sosial ketenagakerjaan dari BPJS Ketenagakerjaan ya.

DIREKTUR UTAMA BPJS KETENAGAKERJAAN:

Iya.

KETUA RAPAT:

Nggak, nggak itu BPJS Tenagakerja dibuang aja tuh

DIREKTUR UTAMA BPJS KETENAGAKERJAAN:

Nggak usah, iya nggak usah, cukup.

KETUA RAPAT:

Oke.

DIREKTUR UTAMA BPJS KETENAGAKERJAAN:

Iya, lalu untuk yang c dan d minta izin sebenarnya itu bisa digabung karena di kami kan memang diksinya bukan CSR, diksinya adalah TJSL dan, dan kalau melihat dari situasinya justru kami butuh dukungan mungkin di narasinya bisa begini Bapak Pimpinan, izin.

Yang itu adalah mendorong regulator untuk menyempurnakan regulasi terkait alokasi TJSL, karena memang kami sebagai operator jadi regulasinya menyebutkan TJSL itu sangat kecil sehingga tidak punya ruang gerak sehingga kalau TJSLnya di, di, diperbesar maka program-program tadi terkait dengan kepedulian atau apapun menjadi punya apa namanya punya kesempatan.

Jadi kalau boleh di c dan d itu narasinya adalah mendorong regulator untuk menyempurnakan regulasi terkait alokasi program TJSL pada BPJS Ketenagakerjaan. Nanti bisa disusun dengan yang akan digunakan untuk penilaian peserta itu mungkin jadi sambungannya bisa ke sana.

KETUA RAPAT:

TJSLnya dikasih panjang aja.

DIREKTUR UTAMA BPJS KETENAGAKERJAAN:

Iya.

KETUA RAPAT:

Jangan disingkat, orang nggak paham.

DIREKTUR UTAMA BPJS KETENAGAKERJAAN:

Yang digunakan untuk kepentingan peserta.

KETUA RAPAT:

Oke.

DIREKTUR UTAMA BPJS KETENAGAKERJAAN:

Jadi langsung nyambung ke poin d yang paling akhir itu Pak, Bapak Pimpinan. TJSJ yang digunakan untuk penilaian peserta karena diksi CSR kan nggak ada di kami Pak, Pak Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Oke.

DIREKTUR UTAMA BPJS KETENAGAKERJAAN:

CSR itu TJSJ di kami namanya. Untuk nomor 2 mungkin sedikit.

ANGGOTA:

Itu kurang huruf a itu. Membigungkan.

DIREKTUR UTAMA BPJS KETENAGAKERJAAN:

Yang digunakan kurang huruf a.

KETUA RAPAT:

Oke, poin 2.

DIREKTUR UTAMA BPJS KETENAGAKERJAAN:

Yang nomor 2 sedikit konfirmasi saja Pak Pimpinan karena *startnya* dimulai di Oktober maka jatuhnya di April sehingga tiap semesternya itu menjadi agak.

KETUA RAPAT:

Itu waktu yang tepat kira-kira bulan apa Pak itu yang biar bagus tu per semester.

DIREKTUR UTAMA BPJS KETENAGAKERJAAN:

Sebenarnya kalau di tahun ini, di tahun-tahun sebelumnya laporan *audited report* itu laporan keuangan KAP itu selalu muncul di bulan Juni tapi tahun ini kami persiapkan lebih cepat bulan Februari sudah selesai jadi awal Maret atau pertengahan Maret sudah bisa kami sampaikan *audited report* yang lengkap itu rinciannya lengkap termasuk investasinya ada kemana dan bagaimana tingkat kesehatannya. Jadi walaupun tadi Ibu Meliyana menyampaikan semester mungkin semesternya akan lebih cepat di bulan Juni tapi mungkin bukan mungkin tapi untuk tahun ini di bulan Maret pun sudah bisa kami sampaikan.

KETUA RAPAT:

Udah bisa ya, oke.

DIREKTUR UTAMA BPJS KETENAGAKERJAAN:

Gitu Bu, jadi kalau.

KETUA RAPAT:

Jadi kita hitungnya Maret.

DIREKTUR UTAMA BPJS KETENAGAKERJAAN:

Sebenarnya April ni bingungin Pak Pimpinan, Aprilnya jadi bingung kita.

KETUA RAPAT:

Oke jadi nanti kita bisa minta Maret, kemudian 6 bulan kemudian lagi ya lihat progresnya ya.

DIREKTUR UTAMA BPJS KETENAGAKERJAAN:

Kalaupun semesternya berarti di Juni lagi Pak Pimpinan karena kalau yang Maret kalau itu adalah laporan *audited report* 2021.

KETUA RAPAT:

Oke.

DIREKTUR UTAMA BPJS KETENAGAKERJAAN:

Nanti pada saat Juni berarti kita sampaikan yang semester 1 2022.

KETUA RAPAT:

Oke, jadi kita pakai aja biar kita pakai berarti Maret dulu nanti sambil melihat perkembangan 6 bulan kemudian kita lihat progress dari BPJS.

DIREKTUR UTAMA BPJS KETENAGAKERJAAN:

Iya, iya.

KETUA RAPAT:

Oke.

DIREKTUR UTAMA BPJS KETENAGAKERJAAN:

Baik.

KETUA RAPAT:

Maret berarti ya. Berikut poin ketiga Pak.

DIREKTUR UTAMA BPJS KETENAGAKERJAAN:

Poin ketiga mungkin yang kami perlu memberikan masukan adalah yang poin b karena kalau tadi Bu Meliyana masuk adalah yang belum definitif karena sebenarnya sejatinya kita semua peserta yang mendaftar itu terdaftar dan berarti dia definitif sebagai peserta jadi nggak ada yang tidak definitif untuk peserta hanya saja tadi tadi contohnya kalau misalnya baru mengiur tiga bulan lalu dia nggak klaim ya karena sifatnya asuransi sosial maka memang itu hilang tetapi kalau yang sifatnya JHT karena sifatnya itu simpanan ya dia nggak hilang.

Jadi tetap ada nama dan saldonya jadi mungkin yang poin b ini sedikit masukan saja karena tidak ada nasabah yang belum definitive, semua nasabah begitu masuk langsung punya nomor KPJ langsung nomor peserta. Itu mungkin masukan Bapak Pimpinan terkait dengan nomor 3.

KETUA RAPAT:

Baik, catatan dari Pak Dirut ini diinformasikan kemana nih sudah. Data yang menggantung ini tadi darimana ya? Ada yang bisa kasih contoh nggak ya? Poin b, poin b, 3b, dari Pak Dirut bilang katanya sudah nggak ada lagi datanya. Oh, iya, iya, dari Pak Dirut bilang semua sudah dibersihkan.

DIREKTUR UTAMA BPJS KETENAGAKERJAAN:

Ada terminologi belum efek, belum definitif karena di kami semua peserta yang terdaftar langsung membayar langsung terdaftar jadi nggak ada yang menggantung. Tadi kalau permintaan data yang belum definitif kami tidak memiliki data belum definitif karena semua langsung menjadi peserta.

KETUA RAPAT:

Oke kalau memang maksudnya seperti itu kan berarti memang berarti yang sudah masuk mestinya ter, tercatat ya. Saya nggak tahu maksudnya Bunda Nadlifah ni yang mana nih, Bu Nadlifah ada masih di virtual?

F-PKB (HJ. NUR NADLIFAH, S.AG., M.M.):

Boleh nggak.

KETUA RAPAT:

Kalau nggak ada kita *drop* ya.

F-PKB (HJ. NUR NADLIFAH, S.AG., M.M.):

Interupsi Ketua.

ANGGOTA:

Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Silakan.

ANGGOTA:

Ini membantu Bu Nadlifah sebetulnya kalau Bu Nadlifah udah nggak ada, kalau saya nggak salah mendengar tadi Bu Nadlifah tu mempertanyakan ada dulu orang yang sudah daftar terus dia nggak sempat ngambil terus uangnya gimana statusnya gitu loh. Ada nggak yang seperti itu masih, pertanyaan kira-kira begitu Bu Nadlifah tadi.

KETUA RAPAT:

Atau akumulasi data nasabah yang tidak aktif atau apa tu bahasanya.

DIREKTUR UTAMA BPJS KETENAGAKERJAAN:

Itu pengertiannya bukan belum definitif tapi belum, belum mengambil atau non aktif. Itu maksudnya.

KETUA RAPAT:

Mungkin itu kali ya.

DIREKTUR UTAMA BPJS KETENAGAKERJAAN:

Kalau itu non aktif ada.

KETUA RAPAT:

Mungkin itu aja.

DIREKTUR UTAMA BPJS KETENAGAKERJAAN:

Jadi peserta yang sudah mengiur dia sudah pensiun tapi belum mencairkan karena ada beberapa peserta memang belum merasa belum butuh jadi dia belum cairkan kalau itu ada, jadi peserta sudah pensiun tapi belum mencairkan itu ada, datanya ada. Jadi kalau itu dianggap menggantung memang dananya masih ada.

KETUA RAPAT:

Oke.

DIREKTUR UTAMA BPJS KETENAGAKERJAAN:

Iya, nah kalau itu ada itu bisa kami sampaikan.

KETUA RAPAT:

Jadi berarti, bahasa apa itu Pak Dirut bahasanya biar akumulasi data nasabah yang?

ANGGOTA KOMISI IX DPR RI:

Ketua, satu lagi yang dimaksud itu adalah yang putus Pak, putus, umpamanya dia belum memang belum, belum harus menerima tapi dia putus jadi peserta gitu loh.

DIREKTUR UTAMA BPJS KETENAGAKERJAAN:

Atau izin Bapak Pimpinan.

ANGGOTA KOMISI IX DPR RI:

Atau setengah jalan lah kira-kira gitu.

KETUA RAPAT:

Ini kepesertaan nih, coba nih Pak Dir. Kepesertaan coba bahasa apa yang tepat ini data peserta begini nih.

DIREKTUR KEPESERTAAN BPJS KETENAGAKERJAAN (ZAINUDIN):

Makasih, Pak Pimpinan.

Kalau boleh Pak Pimpinan, Bapak, Ibu, kan nanti di poin 4 itu pertanyaan Bu Nadlifah tu nantikan kami jawab pasti kami sertakan datanya situ menurut saya nggak perlu sih di poin 3 itu.

F-P. GOLKAR (Hj. DEWI ASMARA, S.H.,M.H.):

Interupsi Pimpinan.

F-P. NASDEM (IRMA SURYANI, S.E.):

Melalui Ketua.

F-P. GOLKAR (Hj. DEWI ASMARA, S.H.,M.H.):

Ini interupsi nih dari tadi nih.

ANGGOTA KOMISI IX DPR RI:

Sependapat dengan Bapak dari BPJS Pak, jadi ini kan pertanyaan.

F-P. NASDEM (IRMA SURYANI, S.E.):

Ketua.

F-P. GOLKAR (Hj. DEWI ASMARA, S.H.,M.H.):

Ngga perlu data lain dong sama pertanyaan beda kok.

ANGGOTA KOMISI IX DPR RI:

Katakanlah putus di tengah jalan nggak lanjutkan pertanyaannya duitnya dimana kan seperti itu.

KETUA RAPAT:

Oke, berarti nanti data apa pertanyaan ini dijawab tertulis dan nanti bisa kita cek lagi ya.

F-P. GOLKAR (Hj. DEWI ASMARA, S.H.,M.H.):

Interupsi Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Silakan Bu Irma sama Bu Dewi.

F-P. NASDEM (IRMA SURYANI, S.E.):

Iya, melalui Ketua. Sebenarnya pertanyaan ini relevan dan harus ditaro di sini karena seperti kepesertaan yang tadi disampaikan Pak Dirut itu betul

bahwa memang ada yang belum mengambil manfaatnya saya kira ini wajib masuk nggak ada masalah kok ya kan.

DIREKTUR KEPESERTAAN BPJS KETENAGAKERJAAN (ZAINUDIN):

Kalau, kalau ada datanya dan itu banyak.

KETUA RAPAT:

Jadi rumusan ini benar nggak nih akumulasi data nasabah yang belum ngambil manfaat.

DIREKTUR KEPESERTAAN BPJS KETENAGAKERJAAN (ZAINUDIN):

Ya ini rasanya lebih lebih, lebih relevan ketimbang tadi belum definitif Pak Pimpinan, kalau tadi belum definitif kita malah nggak ada yang semua definitif.

KETUA RAPAT:

Oke pakai bahasa ini ya.

DIREKTUR KEPESERTAAN BPJS KETENAGAKERJAAN (ZAINUDIN):

Iya.

KETUA RAPAT:

Jadi akumulasi data nasabah, dana nasabah yang belum mengambil manfaat.

DIREKTUR KEPESERTAAN BPJS KETENAGAKERJAAN (ZAINUDIN):

Oh, oke, oke. Mungkin ditambahkan.

F-P. NASDEM (IRMA SURYANI, S.E.):

Mohon maaf Pak Dirut.

DIREKTUR KEPESERTAAN BPJS KETENAGAKERJAAN (ZAINUDIN):

Iya.

F-P. NASDEM (IRMA SURYANI, S.E.):

Kalau belum definitif artinya dia belum terdaftar.

DIREKTUR KEPESERTAAN BPJS KETENAGAKERJAAN (ZAINUDIN):

Iya.

F-P. NASDEM (IRMA SURYANI, S.E.):

Dia sudah terdaftar tapi dia berhenti.

DIREKTUR KEPESERTAAN BPJS KETENAGAKERJAAN (ZAINUDIN):

Iya, Bu.

F-P. NASDEM (IRMA SURYANI, S.E.):

Tadi dia belum mengambil manfaatnya saya kira narasinya itu yang, yang benar.

DIREKTUR KEPESERTAAN BPJS KETENAGAKERJAAN (ZAINUDIN):

Iya, karena tadi sebelumnya narasinya adalah peserta yang definitif nah itu kita nggak punya malah.

F-P. NASDEM (IRMA SURYANI, S.E.):

Iya, jadi yang disampaikan Pak Dirut tadi betul karena ini kan narasinya konstruktif, saya kira ini baik kok.

DIREKTUR KEPESERTAAN BPJS KETENAGAKERJAAN (ZAINUDIN):

Iya, iya.

KETUA RAPAT:

Oke, jadi nanti.

F-P. NASDEM (IRMA SURYANI, S.E.):

Thank you.

DIREKTUR KEPESERTAAN BPJS KETENAGAKERJAAN (ZAINUDIN):

Betul.

KETUA RAPAT:

Rumusannya jadi menjadi, rumusannya jadi akumulasi data peserta dan dana nasabah yang belum mengambil manfaat.

DIREKTUR UTAMA BPJS KETENAGAKERJAAN:

Apa tambahannya tadi, sebentar, tambahannya apa tadi, iya.

F-P. GOLKAR (Hj. DEWI ASMARA, S.H.,M.H.):

Interupsi Pimpinan.

DIREKTUR UTAMA BPJS KETENAGAKERJAAN:

Tambah, Pimpinan saya tambahkan. Kalau peserta yang belum mengambil manfaat ini berarti semuanya berarti semua 30 jutanya yang dimaksud tadi kalau nggak salah adalah peserta yang sudah pensiun.

ANGGOTA KOMISI IX DPR RI:

Pensiun dan belum mengambil manfaat.

KETUA RAPAT:

Data peserta yang sudah pensiun dan belum mengambil manfaat, oke.

ANGGOTA KOMISI IX DPR RI:

Izin, izin, izin, kan nggak cuma pensiun yang udah PHK dia nggak nerusin jadi yang mungkin sudah tidak aktif kali.

DIREKTUR UTAMA BPJS KETENAGAKERJAAN:

Tidak aktif.

ANGGOTA KOMISI IX DPR RI:

Kalau dia masih yang pensiun masih aktif nggak statusnya? Nggak kan?

DIREKTUR UTAMA BPJS KETENAGAKERJAAN:

Masih aktif

DIREKTUR KEPESERTAAN BPJS KETENAGAKERJAAN (ZAINUDIN):

Kalau status non aktif itukan sebenarnya kan di JHT ada ketentuan kapan munculnya hak Bu ya, nah kalau yang non aktif tadi itu belum tentu karena JHT ini prinsipnya hari tua usia 56, jadi sebenarnya kalau terkait usia 56 sebenarnya Ibu bahwa peserta yang udah di atas 56 itu yang belum mengambil mungkin kita bisa, bisa jadikan apa fokus gitu ya Pak ya.

ANGGOTA KOMISI IX DPR RI:

Berarti beda ya, kalau misalnya PHK tapi belum mau ngambil gitu memang belum jatuh tempo, oke. Tapi kan udah nggak, nggak aktif lagi statusnya kan karena udah di PHK kan.

DIREKTUR UTAMA BPJS KETENAGAKERJAAN:

Dia bekerja lagi, dia bisa teruskan lagi.

KETUA RAPAT:

Baik.

F-P. GOLKAR (Hj. DEWI ASMARA, S.H.,M.H.):

Interupsi, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Iya silakan.

F-P. GOLKAR (Hj. DEWI ASMARA, S.H.,M.H.):

Pertama sama mau nyampein permintaan data dengan pertanyaan tuh hal yang berbeda pertanyaan tolong dijawab data ini dibutuhkan kan dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan juga sebagai masukan karena kita kan nantinya juga akan beralih pada panja. Nah jadi tolong dipisahkan kalau apa yang dimaksud dengan data peserta tadi saya katakan kan data dana yang belum diambil manfaatnya contoh JHT, JHT itu tentukan ada batas umur tapi belum diambil maka dia tetap terakumulasi.

Kalau dana PHK itu lain lagi biasanya itu *automatically* ya jadi kepada yang di PHK ataupun berhenti pemutusan hubungan kerja dapat surat untuk diambil atau ketika dia pindah di kantor lain maka itu dipindah akunnya tapi harus melapor.

Nah jadi yang saya inginkan itu adalah tolong rincian diberikan kepada Komisi IX itu adalah data-data dari dana-dana yang masih belum tersalurkan. Satu, untuk setiap program contohnya misalnya JHT sudah jatuh tempo tapi ada yang belum mengambil, kemudian kedua yang PHK kemudian ataupun yang berhenti kerja itu disurati mohon maaf kadang-kadang ada yang sudah meninggal tidak melapor, kemudian ada juga yang pindah kantor tapi juga tidak bilang. Nah ini itulah yang namanya menjadi dana tidak bertuan.

Adakah saya yakin pasti ada, itu berapa banyak jumlahnya sampai karena supaya nanti kita bahas di sini apa upaya daripada BPJS untuk mencari solusi atas dana itu karena kan dana ini kan ada (5:29:28) ini UPM semua ini dana. Jadi banyak sekali dari kalangan-kalangan buruh-buruh kecil mereka tuh ngiur tapi ketika pindah kerja manalah mereka ngerti mau ngurus-ngurus di kantor harus begini, harus begitu, mungkin nggak paham.

Nah dana-dana ini kan karena dibayarkan kemudian menjadi tetap ada makanya kan pengelolaannya tadi dibilang 500 triliun, nah padahal banyak yang belum ambil nih pasti ada karena dalam rapat-rapat tahun lalu 2 tahun lalu dana itu ada dan solusinya nggak pernah ada. Nah itu ingin diingatkan

nggak usah dijawab sekarang tapi itu berapa pasti ada proyeksinya. Nah jadi masing-masing dana itu agar kita tahu.

Kemudian yang berikutnya yang saya ingin tambahkan di sini Pimpinan, kan tadi kita bicara mengenai investasi tadi dikatakan 500 triliun kurang lebih ya kalau saya tidak salah aset yang dikelola itu kan aset yang dalam bentuknya mungkin nilai uang atau pun nilai portofolio ada saham, ada obligasi, dan macam-macam.

Saya ingin menanyakan sekaligus kalau tidak mau dicantumkan di sini, peralihan dari Jamsostek ke BPJS dulu kan asetnya banyak sekali ya dalam rapat-rapat tahun lalu itu masih ada beberapa aset-aset properti bermasalah itu kan tetap aset, itu kan bisa dinilai dia *approach* nilainya sekian ratus milyar misalnya.

Contohnya saja gedung yang ada di Gatot Subroto itu kan miliknya Jamsostek, nah ini sekarang apa ditarik ke pemerintah atau apa tapi kan itu aset kemudian saya juga pernah lihat itu gedung di dekat BUMN jalan apa itu jalan yang ada DPRD DKI misalnya, Merdeka Selatan, apa Merdeka apalah, Kebon Sirih maaf Kebon Sirih nah atau mungkin saya salah lihat. Artinya banyak sekali properti-properti Astec Jamsostek pada saat itu.

Nah yang saya hanya inginkan di sini, tidak usah dijawab dicantumkan saja langsung kalau aset itu kan terdiri dari kalau yang tadi dikelola kan yang uang nah yang properti ini bagaimana paling tidak kita tuh tahu kan ada yang memang sudah bisa dinilai uang dimasukkan, ada yang disewakan atau bagaimana tidak mungkin itu tidak dikelola kalau dikelola apa properti manajemennya diserahkan ke orang *incomenya* diterima banyak sekali Jamsostek punya gedung di seluruh Indonesia.

Jadi kalau tadi bicara 500 berapa tadi miliar apa di triliun apakah itu termasuk aset properti atau nilai daripada *cash*, *paper* lah ya artinya bon apapun surat berharga, SBN, dan lain-lain itu supaya ada juga Pimpinan. Jadi kita tahu bener kekayaannya berapa, sehingga nanti kita bisa elaborate bersama-sama lebih dalam dan untuk bagaimana supaya nanti tujuan akhirnya bukan apa-apa supaya kita bisa mengusulkan juga apa yang bisa menjadi lebih melahirkan program-program kemanfaatan sehingga menarik. Sebenarnya itu saja yang belum ada di sini.

Sementara tadi dibicarakan jumlahnya tapi kita tidak tahu jumlah itu apa hanya angka nilai atau karena aset propertinya banyak sekali pada periode-periode yang lalu dan itu belum pernah disolusikan dengan jelas, nah sehingga persiapan untuk pembuatan panja kalau tidak mau di sini sama aja kan nanti kita minta juga mendingan sekalian ada di sini, kira-kira seperti itu. Terima kasih.

F-P. NASDEM (IRMA SURYANI, S.E.):

Sedikit nambahin Ketua. Saya kira yang dimaksud Bu Dewi soal properti dan lain sebagainya itu yang dimaksud dengan Imbregng, jadi Imbregngnya saya

kira ada itu ada waktu peralihan dari Jamsostek ke BPJS ini Pak Dirut itu ada di Imbrenghya biasanya jadi bisa dijelaskan secara baik seharusnya karena kan Imbrenghya ada ya kan yang diserahkan kemudian dikelola misalnya untuk disewakan dan lain sebagainya pasti ada dan sebenarnya itu yang diinginkan yang diminta. Saya kira itu saja jadi jelas juga permintaan yang disampaikan Bu Dewi tadi, Imbrenghya gitu ya. Mungkin itu saja, Ketua. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, memang kita punya ada juga Panja nih ya jadi ada panja tentang kepesertaan dan manfaat yang juga sudah sementara bekerja. Jadi kalau nanti ini bisa diberikan data juga bagus untuk memulai juga bahan di panja nanti Pak. Jadi ada tambahan terkait dengan ini usulan ya aset dana jaminan sosial dan aset BPJS Ketenagakerjaan. Diberikan juga datanya kepada Komisi IX nanti Pak dan juga sama ini nanti di panja juga pasti akan ketemu juga kurang lebih yang sama akan diminta. Poin tambahan ini bisa disepakati Komisi IX dan BPJS Tenagakerja?

DIREKTUR UTAMA BPJS KETENAGAKERJAAN:

Mungkin tadi yang poin b Bapak Pimpinan, diperjelas saja apakah tadi maksudnya ya memang setelah masuk di usia pensiun sehingga dia belum dicairkan masih ada dana.

KETUA RAPAT:

Yang poin b tadi ya.

DIREKTUR UTAMA BPJS KETENAGAKERJAAN:

Yang b, 3b, itu bisa diperjelas karena kalau akumulasi data peserta dan yang belum ngambil manfaat semua peserta yang saat ini kan memang belum mengambil manfaat jadi si 30 juta itu memang belum mengambil manfaat. Artinya ya berarti semuanya, kalau memang itu ya kita sampaikan.

Dan kedua kalau yang tadi poin c dan juga Bu Asmara sampaikan tadi itu nanti di laporan *audited report* kita di bulan Februari akhir itu semua ada di sana, aset dan liabilities ada di sana semua termasuk dengan asas yang kita miliki apa saja dan dimana saja itu tertera di sana semua. Jadi pada prinsipnya yang poin c, poin d, poin e itu nanti akan ada di laporan KAP. Hanya saja yang poin b tadi yang mungkin kita perjelas karena kalau poin b seperti ini (5:35:55)

KETUA RAPAT:

Poin b kita perjelas lagi data peserta apa nih yang kita mau minta ya peserta pensiun kah? atau apa nih. Jadi data peserta pensiun ya yang dimaksud ya.

DIREKTUR UTAMA BPJS KETENAGAKERJAAN:

Yang sudah masuk di usia pensiun ya Bu ya masuk.

KETUA RAPAT:

Jadi akumulasi data peserta.

F-P. GOLKAR (Hj. DEWI ASMARA, S.H.,M.H.):

Interupsi Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Iya.

F-P. GOLKAR (Hj. DEWI ASMARA, S.H.,M.H.):

Bukan hanya JHT Pak mungkin nggak ada yang seperti saya bilang meninggal dia nggak melapor, kan ada tunjangan kematian atau kecelakaan kerja dia kecelakaan tapi dia nggak ambil atau yang dan yang kualifikasi kedua ya tidak seperti ini tapi yang sudah berhenti kerja dia nggak ambil. Artinya ada dana yang dia tidak mengiur lagi tapi nggak diambil-ambil waktu itu pernah disampaikan oleh direksi sebelumnya bahwa ada orang itu tiba-tiba sudah membayar dananya ada tapi nggak tahu kabarnya tuh.

Nah ini dibidang bertuan tetapi tidak bertuan, artinya tuannya nggak tahu nih udah pindah ke perusahaan mana, kehilangan alamat atau bagaimana, itu kan ada batasnya seharusnya kalau *by law*nya dana yang sudah tidak tahu tidak ada kabar berapa lama harusnya malah disimpannya bisa di pengadilan, bisa di balai penitipan negara, nah tapikan ini dikelola terus. Nah kalau dikelola terus tuh bagaimana gitu artinya apakah seorang itu tiba-tiba suatu saat ambil mungkin juga tidak tapi jangan terus dianggap bahwa secara hukum itu berarti miliknya daripada BPJS, harus hati-hati di situ.

Nah itu yang ingin kami tahu supaya ada kehati-hatian saja maksudnya tuh seperti itu, itu kan itu bisa juga dititipkan konsinyasi di pengadilannya masuknya *toh* tetap ke kas negara. Artinya jangan itu dicampuradukkan dengan sebagian ansih itu adalah milik daripada BPJS karena itu adalah *other people money*, kira-kira seperti itu yang dititipkan pengelolaannya pada BPJS. Makasih.

KETUA RAPAT:

Nambahin? Nggak.

DIREKTUR KEPESERTAAN BPJS KETENAGAKERJAAN (ZAINUDIN):

Izin Bapak Pimpinan.

Bapak, Ibu Anggota Dewan.

KETUA RAPAT:

Silakan.

DIREKTUR KEPESERTAAN BPJS KETENAGAKERJAAN (ZAINUDIN):

Terkait yang ini tadi mungkin untuk JHT mungkin kita *clear* Pak karena tentang JHT kan sesuai undang-undang usia 56 itu sebenarnya usia dimana JHT bisa diambil sehingga kalau kita bisa bahasakan bahasa jatuh temponya 56 tapi kalau ada peserta yang belum ngambil mungkin itu bagian yang kita akan fokuskan untuk kita sampaikan datanya.

Kemudian kedua yang barusan disampaikan oleh Bu Dewi Asmara bahwa bahwa terkait dengan program-programnya asuransi Pak, JKK, JKM, itu kan sebenarnya prinsipnya dia akan dibayarkan manfaatnya ketika resikonya muncul. Tapi terkait dengan peserta-peserta yang terjadi resikonya tapi tidak melaporkan itu sebenarnya kami punya porsi yang disebut dengan cadangan Pak. Jadi dan semua itu dikelola dalam satu, satu apa namanya, satu keranjang dana jaminan sosial. Jadi kita punya empat saat ini kami punya lima dana jaminan sosial dan 1 BPJ, dana BPJS dan ini tidak saling bercampur.

Nah kalau tadi bicara ada nggak peserta-peserta yang sebenarnya dia meninggal atau kecelakaan kerja tapi tidak melaporkan ada Pak tapi kita nggak tahu kalau sebelum dia melaporkan tapi apakah ada dana yang disisihkan oleh dana jaminan sosial ada namanya cadangan. Nah jadi dalam konteks itu sebenarnya semua dana peserta itu semua ada di dalam keranjangnya masing-masing, BPJS hanya punya ruang dari dana jaminan sosial yang nama dengan dana operasional tadi Pak, dan itu diatur para pemerintah.

Jadi kalau izin Pak, untuk terkait dengan yang poin b ini kalau kita fokus ke data peserta JHT dan dana, dana, dana, dana JHT yang sebenarnya jatuh temponya tuh ada di usia 56 tapi kalau dia ternyata dia setelah jatuh tempo belum mengambil haknya itu mungkin kita perlu *remind* kembali.

Nah itu yang perlu kita *remind* kembali, nah kita butuh kalau misalkan nanti kita perlu sampaikan di dalam apa dewan ini kita fokus bisa, bisa, bisa fokus ke sana Pak. Jadi akumulasi data peserta dengan nasabah yang sudah memasuki usia 56 yang belum mengambil manfaat JHTnya. Mungkin itu Pak, izin kalau misalnya seperti itu.

DIREKTUR UTAMA BPJS KETENAGAKERJAAN:

Menambahkan mungkin Bapak Pimpinan, kalau misalnya seperti itu Bu Dewi Asmara mungkin poin b akan lebih enak kalau narasinya begini, “peserta yang sudah jatuh tempo dan belum mengambil manfaat” itu mungkin lebih yang *clear*, yang poin b mungkin kalimatnya bisa begitu Bapak Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Ini berlaku buat semua ya baik yang pensiun, yang meninggal, dan seterusnya ya.

DIREKTUR UTAMA BPJS KETENAGAKERJAAN:

Iya.

KETUA RAPAT:

Oke. Jadi b itu menjadi peserta yang.

DIREKTUR UTAMA BPJS KETENAGAKERJAAN:

Sudah jatuh tempo.

KETUA RAPAT:

Sudah jatuh tempo dan belum mengambil manfaat.

DIREKTUR UTAMA BPJS KETENAGAKERJAAN:

Dan belum mengambil manfaat.

F-PAN (Drs. H. ASHABUL KAHFI, M.Ag.):

Tapi gini Pimpinan, tapi kana da juga mereka karena aturan sehingga ndak bisa mendapatkan manfaatnya lagi tapi mereka sudah membayar 2 sampai 3, 4 bulan seperti apa itu mereka yang begitu, apakah hilang percuma atau gimana itu.

Maksudnya saya kan begini Pak, ada pekerja karyawan ya itu kan sudah membayar iuran selama 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan tetapkan ada aturan bahwa yang bisa menerima JKP itu setelah membayar sekian bulan, nah kalau dia tidakenuhi persyaratan itu otomatis dia tidak bisa mendapatkan JKP ketika di, di apa di PHK. Nah pertanyaannya, tabungan mereka tuh dikemanakan kan nggak bisa diterima lagi kembali oleh mereka. Ah itu.

DIREKTUR KEPESERTAAN BPJS KETENAGAKERJAAN (ZAINUDIN):

Baik Pak, mungkin ini bisa di, bisa untuk JKP, bisa untuk program yang lain JKK dan JKM khususnya yang asuransi Pak, karena jaminan sosial ketenagakerjaan ini ada dua skema besar, satu skema tabungan, satu lagi skema asuransi. Kalau skema tabungan tentunya kalau walaupun dia baru mengiur 3 atau 4 bulan haknya atas tabungannya masih ada Pak, tapi untuk yang program asuransi JKK, JKM, dan JKP itu ketika dia ikut hanya 3 bulan kemudian tidak ikut mengiur, kemudian setelah 1 tahun kemudian dia mengalami risiko maka atas haknya itu tidak ada lagi. Nah ini konteks, konteks

yang disebut dengan asuransi. Jadi memang ada dua skema di, di, kami Pak kalau konteks asuransi seperti itu. Terima kasih.

DIREKTUR UTAMA BPJS KETENAGAKERJAAN:

Intinya yang sifatnya simpanan nggak hilang Pak, yang sifatnya simpanan tidak hilang, yang sifatnya asuransi sosial yang memang sudah tidak berlaku.

KETUA RAPAT:

Baik Pak Kahfi ya *clear* ya. Jadi kita sudah punya 4 poin kesimpulan dan ini menjadi bagian tidak terpisahkan nanti dari ada panja juga yang beberapa barang di sini. Untuk itu sebelum saya tok kita sudah sepakat ya 4 poin ini ya teman-teman Komisi IX setuju ya, BPJS Tenagakerja? Oke.

(RAPAT: SETUJU)

Baik, Bapak, Ibu sekalian.

Kita sudah selesai mendengarkan kesimpulan yang sudah kita sepakati bersama ini dan sebelum kami tutup, kami persilakan Pak Direktur Utama BPJS Tenagakerja untuk menyampaikan catatan penutupnya.

ANGGOTA KOMISI IX DPR RI:

Setuju.

DIREKTUR UTAMA BPJS KETENAGAKERJAAN:

Baik, terima kasih.

Bapak Pimpinan dan anggota Komisi IX.

Pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas masukan-masukannya ini menjadi amunisi kami di awal tahun bulan ini adalah bulan ke-10 kami bertugas mohon *supportnya* karena spirit kami sama, sama Bapak Ibu bagaimana kita meningkatkan *coverage* dimana tantangan utamanya adalah literasi banyak pekerja penerima upah bukan penerima upah literasi rendah dan memang tugas kita adalah mengingatkan mereka betapa besar manfaat menjadi peserta BPJS Jamsostek. Jadi kami mohon *supportnya* terkait dengan sosialisasi kami sangat senang karena tahun lalu banyak sekali sosialisasi yang sangat efektif semoga tahun ini juga bisa lebih baik lagi sosialisasinya. Demikian, terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam

Terima kasih kata-kata penutup dari Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Pak Anggoro. Kita, kita tutup bersama dengan doa sesuai dengan keyakinan masing-masing, berdoa mulai, berdoa selesai. Dengan mengucapkan syukur *alhamdulillah* rapat saya tutup.

Selamat sore

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Shalom

Salve

Om Santi Santi Om

Namo Buddhaya

Salam Kebajikan

(RAPAT DITUTUP PUKUL 15:55 WIB)

Langsung kita lanjut rapat internal di pimpin oleh Ibu Felly.

Jakarta, 20 Januari 2022

A. n. KETUA RAPAT

Sekretaris Rapat

ttd

Suryatna, S.IP

NIP. 196408241986031003